



PEMERINTAH DAERAH
KOTA DUMAI



2024 PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI



0811 7771 256



dinkesdumai kota@gmail.com



dinkes.dumaikota.go.id



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2024, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan terhadap kondisi yang ada saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 28 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 42 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 28 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2024 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang dapat diubah dengan adanya Perubahan kebijakan baik ditingkat Pemerintah Pusat maupun ditingkat pemerintah daerah yang tidak perlu merubah RPJMD, penambahan kegiatan baru yang tidak perlu merubah RPJMD dan terdapat perubahan dan/ atau penambahan program baru pada RPJMD.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disesuaikan dengan Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Perangkat Daerah.
- (3) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, Prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024.
- (4) Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2024 dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2024;
 - b. pedoman penyempurnaan Renja Perubahan PD Tahun 2024.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penjabaran Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun Berkenaan;
 - c. BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
 - f. BAB VI : Penutup.

- (2) Penjabaran Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 26 Juli 2024

WALI KOTA DUMAI,



Diundangkan di Dumai
pada tanggal 26 Juli 2024

SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI,



INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024 NOMOR 12 SERI D.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya maka Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024 yang berisi tentang Rencana Kegiatan Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2024 telah selesai disusun.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sebagai pelaksana sebagian tugas pemerintah daerah di bidang kesehatan, maka Dinas Kesehatan Kota Dumai telah menyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021-2026 sebagai kerangka perencanaan dan pengelolaan pembangunan daerah di bidang kesehatan yang dijabarkan melalui Rencana Kerja (Renja) yang disusun pada setiap tahunnya. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di Kota Dumai untuk tahun 2024.

Kepada semua pihak yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya sehingga tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024 ini, kami mengucapkan terimakasih.

Dumai, Agustus 2024

**Kepala Dinas Kesehatan
Kota Dumai**

Dr. SYAIFUL, M.KM

**Pembina Utama Muda/IV c
NIP 197107242001121004**



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Grafik.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024.....	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2024.....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan.....	15
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan.....	59
2.4 Review Terhadap Perubahan Renja Tahun 2024.....	63
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	68
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	68
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan.....	70
3.3 Program dan Kegiatan.....	71
3.4 Rencana Kinerja Tahun 2024.....	79
3.5 Kerangka Pendanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024	80
BAB IV PENUTUP.....	95
4.1 Kaidah Pelaksanaan.....	95
4.2 Rencana Tindak Lanjut.....	96

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Pencapaian Realisasi Keuangan Berdasarkan Program Dinas Kesehatan Kota Dumai s.d Triwulan II Tahun 2024.....	13
Tabel 2.2 Pencapaian Realisasi Keuangan Berdasarkan Unit Kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai s.d Triwulan II Tahun 2024.....	14
Tabel 2.3 Evaluasi Pencapaian Indikator Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021-2026.....	16
Tabel 2.4 Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023.....	17
Tabel 2.5 Pencapaian Sasaran IKU Dinas Kesehatan Kota Dumai dari Tahun 2020 s.d 2023 dan Proyeksi Tahun 2024 dan Tahun 2025	19
Tabel 2.6 Umur Harapan Hidup (UHH) di Indonesia, Provinsi Riau dan Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2023.....	26
Tabel 2.7 Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Menurut Jenis Kepesertaan Kota Dumai Tahun 2023.....	43
Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan (SPM) Dinas Kesehatan Kota Dumai	45
Tabel 3.9 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022 s/d 2026.....	71
Tabel 3.10 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Dumai Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.....	73
Tabel 3.11 Rencana Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Tahun 2024 Dinas Kesehatan Kota Dumai.....	79
Tabel 3.12 Kerangka Pendanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024.....	81

DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 2.1 Pencapaian Angka Kematian Bayi Kota Dumai Tahun 2020 sampai dengan 2023	21
Grafik 2.2 Jumlah Kematian Bayi Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai tahun 2023.....	21
Grafik 2.3 Pencapaian Angka Kematian Balita Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2023	22
Grafik 2.4 Jumlah Kematian Balita Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2023	23
Grafik 2.5 Pencapaian Angka Kematian Ibu di Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2023	24
Grafik 2.6 Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2023	24
Grafik 2.7 Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Jenis Kematian Ibu dan Kelompok Umur di Kota Dumai Tahun 2023	25
Grafik 2.8 Pencapaian Umur Harapan Hidup di Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2023.....	26
Grafik 2.9 Pencapaian Angka Kesakitan Malaria Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023	27
Grafik 2.10 Jumlah Kasus Malaria Berdasarkan Kecamatan Di Kota Dumai Tahun 2023.....	28
Grafik 2.11 Pencapaian Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA + Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023.....	29
Grafik 2.12 Jumlah Kasus TB Paru BTA+ Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2023.....	29
Grafik 2.13 Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023	31
Grafik 2.14 Data Kumulatif Kasus HIV Kota Dumai Dari Tahun 2020 s/d 2023.....	32
Grafik 2.15 Pencapaian Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023.....	33
Grafik 2.16 Jumlah Kasus DBD Berdasarkan Kecamatan Di Kota Dumai Tahun 2023.....	34
Grafik 2.17 Pencapaian Persentase Balita Dengan Gizi Buruk Kota Dumai Tahun 2020 sampai dengan 2023.....	35

Grafik 2.18	Jumlah Kasus Balita Dengan Gizi Buruk Berdasarkan Kecamatan Di Kota Dumai Tahun 2023.....	36
Grafik 2.19	Pencapaian Persentase Balita Dengan Gizi Kurang Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2023.....	37
Grafik 2.20	Jumlah Kasus Balita Dengan Gizi Kurang Berdasarkan Kecamatan Di Kota Dumai Tahun 2023.....	38
Grafik 2.21	Pencapaian Prevalensi Stunting Pada Balita Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2023.....	40
Grafik 2.22	Jumlah Kasus Balita Stunting Berdasarkan Kecamatan Di Kota Dumai Tahun 2023.....	40
Grafik 2.23	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kota Dumai Tahun 2020 – 2023.....	42
Grafik 2.24	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Kota Dumai Tahun 2020 s/d 2023.....	47
Grafik 2.25	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Kota Dumai Tahun 2020 s/d 2023.....	47
Grafik 2.26	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Kota Dumai Tahun 2020 s/d 2023.....	49
Grafik 2.27	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Kota Dumai Tahun 2020 s/d 2023.....	50
Grafik 2.28	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Kota Dumai Tahun 2020 s/d 2023.....	51
Grafik 2.29	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Kota Dumai Tahun 2020 s/d 2023.....	52
Grafik 2.30	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Kota Dumai Tahun 2020 s/d 2023.....	53
Grafik 2.31	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Kota Dumai Tahun 2020 s/d 2023.....	54
Grafik 2.32	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Kota Dumai Tahun 2020 s/d 2023.....	55
Grafik 2.33	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Kota Dumai Tahun 2020 s/d 2023.....	56
Grafik 2.34	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Kota Dumai Tahun 2020 s/d 2023.....	57
Grafik 2.35	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Kota Dumai Tahun 2020 s/d 2023.....	58



BAB I
PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Pembangunan daerah harus selaras dengan tujuan pembangunan Nasional, sehingga pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah berdasarkan jangka waktu perencanaan salah satunya adalah dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 tahun. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena di dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Mengacu pada pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Perubahan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan terhadap Rencana Perangkat Daerah salah satunya Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen Rencana Kerja dengan waktu satu tahun yang disusun oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya guna mengoperasionalkan Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk tahun rencana yang dimaksud. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah juga merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD

Dinas Kesehatan Kota Dumai sebagai salah satu Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Dumai yakni sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesehatan, wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan Kota Dumai pada tahun 2024. Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2024. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024 dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD Kota Dumai Tahun 2024.

Lebih lanjut, mengacu pada pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024 melalui tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan d.

pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan Perubahan; dan f. penetapan.

Adanya dinamika perubahan kebijakan dan regulasi terkait perencanaan dan penganggaran khususnya urusan kesehatan baik di tingkat Pusat, Provinsi Riau dan Kota Dumai menyebabkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024 yang telah disusun dan ditetapkan sudah tidak relevan atau tidak selaras lagi dengan kebijakan tersebut di atas. Apabila Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024 yang telah disusun dan ditetapkan sudah tidak relevan atau tidak selaras lagi, maka akan sulit untuk melakukan pengukuran kinerja. Oleh sebab itu Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024 perlu dilakukan perubahan dengan menyesuaikan pada perkembangan kebijakan dan regulasi yang berlaku saat ini. Untuk itu perlu dilakukan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024. Dengan demikian diharapkan dapat mewujudkan keselarasan, perencanaan dan penganggaran pembangunan di Dinas Kesehatan Kota Dumai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran Pusat, Provinsi dan Kota Dumai.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2024 pada tanggal 26 Juli 2024 dan mempedomani pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka perangkat daerah diminta untuk segera menyampaikan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan selanjutnya menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun RKA perangkat daerah.

Dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024 ini acuan utama yang digunakan adalah rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Program Indikatif Walikota/Wakil Walikota Dumai periode Tahun 2021–2026. Adapun visi Walikota/Wakil Walikota Dumai adalah:

“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu “.

dan dengan memperhatikan tema pembangunan Kota Dumai tahun 2024 yakni **“Memperkuat Instrumen Pendukung Yang Kondusif Bagi Untuk Memantapkan Kota Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (DUMAI KOTA IDAMAN)”**. Ada 5 (lima) prioritas pembangunan Kota Dumai untuk tahun 2024 yakni: 1) Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan pelabuhan, 2) pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya melayu, 3) peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi, 4) peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana dan 5) peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai juga mengacu kepada RPJP Nasional, RPJM Nasional, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, Rencana Strategis Dinas Kesehatan Propinsi Riau, Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai serta berbagai kebijakan dan prioritas program pemerintah pusat dan propinsi.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024 ini, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai rujukan yaitu:

1. Undang-Undang nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Perubahan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2023;
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Riau Tahun 2019-2024;
17. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E)
19. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 3 Seri A)
20. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D)
21. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 1 Seri E)
22. Peraturan Walikota Dumai Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 3 Seri D)
23. Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 12 Seri A)

24. Peraturan Walikota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor I Seri E)
25. Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 12 Seri D)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Dumai di Tahun 2024, dengan berdasarkan pada Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 dan Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021-2026, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai secara berkesinambungan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024 ini adalah untuk:

1. Menyediakan data performance dan analisis kinerja pembangunan Dinas Kesehatan pada tahun 2023 dan triwulan 2 tahun 2024
2. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024.
4. Sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2024 dan juga penyusunan Perubahan RAPBD Kota Dumai Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024

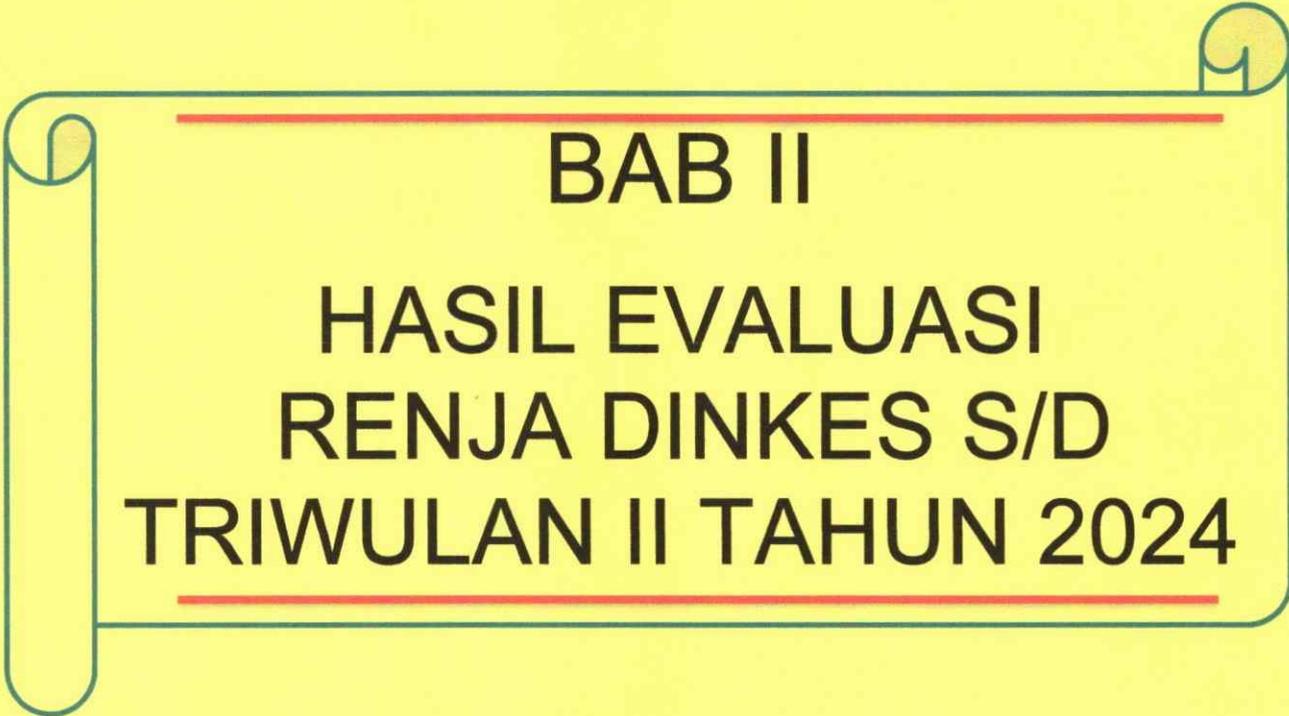
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Bab ini memaparkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai tahun 2023 dan triwulan II tahun 2024, analisis kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kota Dumai, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Dumai.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

Bab ini memaparkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) dan Pendanaan Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024

BAB IV. PENUTUP



BAB II

**HASIL EVALUASI
RENJA DINKES S/D
TRIWULAN II TAHUN 2024**

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023 dan Renja Dinas Kesehatan Kota Dumai s.d Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun 2023 dianalisa dengan membandingkan hasil pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun 2022. Penyusunan Renja Dinas Kesehatan tahun 2022 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah. Renja Dinas Kesehatan tahun 2022 terdiri dari 5 program (1 program rutin dan 4 program wajib), 22 kegiatan dan 95 sub kegiatan. Renja Dinas Kesehatan Tahun 2022 merupakan periode tahun pertama Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021-2026. Adanya pengurangan program pada Renja Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022 yakni Program Pengelolaan Barang Milik Daerah karena berdasarkan hasil review program tersebut merupakan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sehingga kegiatan pengelolaan barang milik daerah dan sub kegiatan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD dihapuskan pada Renja Dinas Kesehatan Tahun 2022. Sub kegiatan yang juga dihapus pada Renja Dinas Kesehatan Tahun 2022 adalah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan karena berdasarkan hasil rewiuw sub kegiatan tersebut hanya untuk kendaraan dinas Walikota Dumai. Selain itu pada Renja Dinas Kesehatan Tahun 2022 ada penambahan sub kegiatan dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD. Renja Dinas Kesehatan.

Renja Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023 disusun mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah. Renja Dinas Kesehatan Tahun 2023 terdiri dari

5 program, 24 kegiatan dan 93 sub kegiatan dengan perincian: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebanyak 1 program, 9 kegiatan dan 40 Sub Kegiatan; dan Program Urusan Wajib terdiri dari 4 program, 15 kegiatan dan 53 Sub Kegiatan. Dengan demikian pada tahun 2023 ada penambahan 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan pada Renja Dinas Kesehatan Kota Dumai terkait Pemberlakuan Kebijakan Pusat tentang Pemetaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI Nomor RI PR.01.01/1/10217/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Pemetaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2023, ada 24 sub kegiatan hasil Pemetaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2023 yang dijadikan acuan dalam penyusunan penganggaran kegiatan bersumber DAK Non Fisik Bidang Kesehatan dalam APBD Tahun 2023. Hasil pemetaan menunjukkan dari 23 sub kegiatan yang ada pada menu DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2023, sebanyak 21 sub kegiatan atau sebesar 91.30% sudah ada pemetaannya pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021-2026. Dengan demikian ada 2 sub kegiatan lain yakni Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK), dan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota belum terpetakan pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023.

Sementara Renja Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024 disusun mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dengan diberlakukannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tersebut, maka ada perubahan kode dan perubahan sub kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024 (pengurangan jumlah sub kegiatan karena ada sub kegiatan yang dihapus, dimerger atau diganti dengan sub kegiatan baru). Selain itu ada pemberlakuan keseragaman satuan, indikator dan kinerja penunjang urusan menyebabkan dilakukannya penyesuaian satuan, indikator dan kinerja kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024 dan penyesuaian Kodefikasi dan Nomenklatur sub kegiatan pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023 menunjukkan bahwa total rata-rata capaian kinerja sebesar 74.50% dengan predikat kinerja sedang dan capaian realisasi anggaran dari seluruh sebesar 91.94%. Sedangkan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022 menunjukkan bahwa total rata-rata capaian kinerja sebesar 94.92% dengan predikat kinerja sangat tinggi dan capaian realisasi anggaran dari seluruh sebesar 91.72%. Dengan demikian, ada penurunan pencapaian kinerja pada tahun 2023, namun disisi lain ada sedikit peningkatan capaian realisasi anggaran pada tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2024 telah ditetapkan pagu Renja Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024 sebesar Rp 146.731.802.600,-. Namun berdasarkan hasil pembahasan KUA dan PPAS Tahun 2024 antara Pemerintah Kota Dumai dan DPRD Kota Dumai ada kebijakan pengurangan anggaran perjalanan dinas di setiap perangkat daerah, sehingga pagu Renja Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024 berkurang menjadi sebesar Rp 146.531.802.600,- atau ada pengurangan anggaran sebesar Rp 200.000.000,-. Dalam perjalanannya anggaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024 beberapa kali mengalami pergeseran. Pada pergeseran kedua APBD Kota Dumai per 1 Maret 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kota Dumai bertambah menjadi Rp 217.593.388.440,-. Selanjutnya pada pergeseran ketiga APBD Kota Dumai per 28 Maret 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kota Dumai bertambah menjadi Rp 233.707.394.142,-. Kemudian pada pergeseran kelima APBD Kota Dumai per Mei 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kota Dumai berkurang menjadi Rp 232.168.177.067,-. Anggaran pergeseran tersebut terdiri dari anggaran Dinas Kesehatan Kota Dumai sebesar Rp 210.094.980.957,- (ada penambahan DAK Fisik dan Non Fisik Dinas Kesehatan sebesar Rp 8.749.174.444,- dan penambahan APBD sebesar Rp 69.898.362.023,-) dan anggaran BLUD Puskesmas se Kota Dumai dan BLUD Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A sebesar Rp 22.073.196.110,- (ada penambahan DAK Non Fisik BOK puskesmas sebesar Rp 6.988.838.000,-). APBD Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024 terdiri dari 5 Program (1 program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan 4 program urusan pemerintahan wajib), 23 Kegiatan (9 kegiatan rutin dan 14 kegiatan wajib) dan 91 sub kegiatan (39

sub kegiatan rutin dan 52 sub kegiatan wajib).

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kota Dumai sampai dengan triwulan II Tahun 2024 (berdasarkan pergeseran ketujuh per Juni 2024) menunjukkan bahwa dari total Rp 232.168.177.067,- anggaran Dinas Kesehatan Kota Dumai telah terealisasi sebesar Rp 86.217.797.887,14 dengan capaian realisasi anggaran sebesar 37,14% dengan predikat kinerja sangat rendah. Berdasarkan unit kerja, dari total Rp 210.094.980.957,- anggaran Dinas Kesehatan Kota Dumai telah terealisasi sebesar Rp 76.413.014.780,14 dengan capaian realisasi anggaran sebesar 36,37% dengan predikat kinerja sangat rendah dan capaian kinerja sebesar 36,37% dengan predikat kinerja sangat rendah. Masih belum optimalnya penyerapan anggaran Dinas Kesehatan Kota Dumai tersebut atau belum mencapai 50% karena proses pembayaran beberapa kegiatan dilaksanakan di bulan Juli 2024, ada beberapa kegiatan yang sedang dalam proses pelaksanaan atau baru akan dilaksanakan setelah triwulan II, ada beberapa kegiatan belum terlaksana karena menunggu proses perubahan APBD Tahun 2024, ada beberapa kegiatan pengadaan barang dan jasa yang masih dalam proses pelaksanaan atau dalam proses sistem LPSE (proses validasi dan verifikasi data SIRUP). Beberapa kegiatan Dinas Kesehatan bersumber dana BOK baru bisa dilaksanakan setelah mendapat konfirmasi jadwal yang ditentukan oleh Bapelkes sebagai pihak dari Kementerian Kesehatan. Sedangkan untuk anggaran BLUD Puskesmas se Kota Dumai dan BLUD Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A sebesar Rp 22.073.196.110,- sampai dengan bulan Juni 2024 baru terealisasi sebesar Rp 9.804.783.107,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar 44,42% dengan predikat kinerja sangat rendah. Rendahnya penyerapan anggaran BLUD Puskesmas se Kota Dumai karena ada kendala terkait penyaluran dana BOK puskesmas yang baru tersalurkan pada akhir bulan Maret 2024 ke rekening puskesmas.

Pencapaian realisasi keuangan berdasarkan program Dinas Kesehatan Kota Dumai sampai dengan triwulan II Tahun 2024 menunjukkan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program dengan realisasi keuangan tertinggi yakni sebesar 40,35% disusul dengan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sebesar 31,69%. Sementara program dengan realisasi keuangan terendah adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yakni sebesar 16,05% seperti terlihat pada tabel 2.1 di bawah.

Tabel 2.1
Pencapaian Realisasi Keuangan Berdasarkan Program
Dinas Kesehatan Kota Dumai sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Uraian Program	Pagu Anggaran	Realisasi sd Triwulan II	% Realisasi
	Semua Bidang			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	157.185.580.910	63.431.019.392	40,35
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	64.618.590.032	19.667.483.602,14	30,44
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	8.824.986.000	2.796.288.120	31,69
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	978.517.100	233.046.000	23,82
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	560.503.025	89.960.773	16,05
	Jumlah	232.168.177.067	86.217.797.887,14	37,14

Pencapaian realisasi keuangan berdasarkan unit kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai sampai dengan triwulan II Tahun 2024, menunjukkan BLUD Puskesmas Dumai Barat merupakan unit kerja dengan realisasi keuangan tertinggi yakni sebesar 57,74%, sementara unit kerja dengan realisasi keuangan terendah adalah Dinas Kesehatan Kota Dumai yakni sebesar 36,37% seperti terlihat pada tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2
Pencapaian Realisasi Keuangan Berdasarkan Unit Kerja
Dinas Kesehatan Kota Dumai sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Unit Kerja	Pagu Anggaran	Realisasi sd Triwulan II	% Realisasi
1	Dinas Kesehatan Kota Dumai	210.094.980.957	76.413.014.780,14	36,37
2	BLUD Puskesmas Dumai Kota	2,752,707,500	1,051,152,210	38.19
3	BLUD Puskesmas Dumai Barat	1,876,692,000	1,083,577,781	57.74
4	BLUD Puskesmas Bukit Kapur	2,031,361,000	921,300,244	45.35
5	BLUD Puskesmas Sungai Sembilan	3,276,335,960	1,733,074,149	52.90
6	BLUD Puskesmas Medang Kampai	1,467,582,000	722,316,695	49.22
7	BLUD Puskesmas Bumi Ayu	1,856,715,000	826,763,235	44.53
8	BLUD Puskesmas Bukit Timah	1,140,749,000	485,020,726	42.52
9	BLUD Puskesmas Jaya Mukti	3,570,229,000	1,305,269,783	36.56
10	BLUD Puskesmas Purnama	1,641,111,000	717,964,318	43.75
11	BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur	2,271,073,650	883,057,669	38.88
12	BLUD Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A	188,640,000	75,286,297	39.91
	Jumlah	232.168.177.067	86.217.797.887,14	37,14

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Dumai

2.2.1 Pencapaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran

Pada tahun 2023, pencapaian indikator tujuan Dinas Kesehatan Kota Dumai yang ditunjukkan dengan pencapaian Indeks Kesehatan adalah sebesar 0.778. Bila dibandingkan dengan target Indeks Kesehatan pada tahun 2023 yakni sebesar 0.789-0.790, maka persentase capaian kinerja adalah sebesar 98.61% yang berarti pencapaian indikator tujuan Dinas Kesehatan Kota Dumai sangat tinggi dengan atribut capaian indikator kinerja sangat berhasil. Bila dibandingkan dengan pencapaian Indeks Kesehatan pada tahun 2022 yakni sebesar 0.771, maka terlihat ada peningkatan pencapaian Indeks Kesehatan sebesar 0.007 point pada tahun 2023. Bila dibandingkan persentase capaian kinerja Indeks Kesehatan pada tahun 2022 yakni sebesar 98.22%, maka terlihat ada peningkatan persentase capaian kinerja Indeks Kesehatan sebesar 0.39 point pada tahun 2023 (98.61%).

Pencapaian Sasaran Strategis 1 yakni meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat yang ditunjukkan dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH), terlihat pencapaian AHH Kota Dumai pada tahun 2023 sebesar 71,67 tahun. Bila dibandingkan dengan target AHH Kota Dumai pada tahun 2023 yakni sebesar 71,29-71.33 tahun, maka persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% yang berarti pencapaian indikator Sasaran Strategis 1 yakni meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat sangat tinggi dengan atribut capaian indikator kinerja sangat berhasil. Bila dibandingkan dengan AHH pada tahun 2022 yakni sebesar 71.25, maka terlihat ada peningkatan pencapaian AHH Kota Dumai sebesar 0.42 point pada tahun 2023. Lebih lanjut, bila dibandingkan persentase capaian AHH pada tahun 2022 yakni sebesar 100%, maka terlihat persentase capaian kinerja AHH pada tahun 2023 (100%) statis.

Sedangkan untuk Pencapaian Sasaran Strategis 2 yakni meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang ditunjukkan dengan indikator Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terlihat pencapaian Cakupan JKN pada tahun 2023 sebesar 100.02%. Bila dibandingkan dengan target Cakupan JKN pada tahun 2023 yakni sebesar 97%, maka persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% yang berarti pencapaian indikator Sasaran Strategis 2 yakni meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat sangat tinggi dengan atribut capaian indikator kinerja sangat berhasil. Bila dibandingkan dengan Cakupan JKN pada tahun 2022 yakni sebesar 95.80%, maka terlihat ada peningkatan pencapaian Cakupan JKN sebesar

4.22 point pada tahun 2023. Lebih lanjut, bila dibandingkan persentase capaian Cakupan JKN pada tahun 2022 yakni sebesar 100%, maka terlihat persentase capaian kinerja Cakupan JKN pada tahun 2023 (100%) statis.

Tabel 2.3
Evaluasi Pencapaian Indikator Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Kesehatan Kota Dumai 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target, Realisasi dan Persentase Pencapaian Indikator Kinerja								
					2021			2022			2023		
					Target	Realisasi	% Pencapaian	Target	Realisasi	% Pencapaian	Target	Realisasi	% Pencapaian
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan			0.79	0.77	97.47	0.785	0.771	98.22	0.789-0.790	0.778	98.61
			1 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	71.04	70.98	99.92	71.10	71.25	100.00	71.29-71.33	71.67	100.00
			2 Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Di Kota Dumai	92	87.55	95.16	92.2	95.8	100.00	97	100.02	100.00

2.2.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

Untuk pengukuran tingkat capaian kinerja IKU Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya. Penilaian pencapaian indikator sasaran IKU menggunakan Perubahan Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Tabel 2.4
Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	% Pencapaian Kinerja	Kategori Nilai
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1 Menurunnya Mortalitas (Angka Kematian)	%	100	99.45	99.45	Sangat Tinggi
		1.1 Angka Kematian Bayi per 1.000 KH	per 1.000 KH	17	11.36	100	Sangat Tinggi
		1.2 Angka Kematian Balita per 1.000 KH	per 1.000 KH	24	13.42	100	Sangat Tinggi
		1.3 Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	per 100.000 KH	101	103.23	97.79	Sangat Tinggi
		1.4 Umur Harapan Hidup	Tahun	71,29-71.33	71.67	100	Sangat Tinggi
		2 Menurunnya Morbiditas (Angka Kesakitan)	%	100	30.44	30.44	Sangat Rendah
		2.1 Angka Kesakitan Malaria (API) per 1.000 penduduk	per 1.000 penduduk	0.8	0.01	100	Sangat Tinggi
		2.2 Persentase Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +	%	88	72	81.82	Tinggi
		2.3 Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko	%	< 1	0.18	100	Sangat Tinggi
		2.4 Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk	55	198.03	-160.06	Sangat Rendah
		3 Meningkatnya Status Gizi Balita	%	100	100	100	Sangat Tinggi
		3.1 Persentase Balita dengan Gizi Buruk	%	1	0.07	100	Sangat Tinggi
		3.2 Persentase Balita dengan Gizi Kurang	%	3	1.10	100	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	4 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai	%	97	100.02	100	Sangat Tinggi

Berdasarkan data di atas, secara umum Dinas kesehatan cukup berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai diwujudkan dalam keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2023 ini. Dari 11 Indikator

Kinerja Utama (IKU), ada sebanyak 9 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang nilai pencapaian kinerjanya sangat tinggi (8 IKU tercapai 100% dan 1 IKU tercapai 97.79%)), dan sebanyak 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang nilai pencapaian kinerjanya tinggi. Namun, masih ada sebanyak 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang nilai pencapaian kinerjanya sangat rendah yakni Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD).

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang pencapaian kinerjanya sangat rendah tersebut merupakan tantangan bagi Dinas Kesehatan Kota Dumai mengingat dampak pasca pandemik COVID 19 mobilitas penduduk kembali tinggi. Ditambah lagi dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi COVID 19 di Indonesia, maka penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 dan penetapan status bencana non alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional secara resmi dicabut. Disamping itu, potensi Kota Dumai sebagai Kota Jasa dan Industri, daerah yang memiliki pelabuhan internasional dan sebagai pintu gerbang keluar masuknya bagi wisatawan asing maupun pelaut asing, sebagai daerah transit baik dalam negeri maupun luar negeri, tingginya kepadatan penduduk di daerah perkotaan. Kondisi tersebut berpengaruh pada penyebaran penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yang berdampak pada tidak tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan tersebut.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari pemenuhan indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk masing-masing sasaran tersebut. Dari 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan, Dinas Kesehatan Kota Dumai cukup berhasil mewujudkan hampir seluruh sasaran tersebut. Perumusan keberhasilan pencapaian sasaran jika indikator keberhasilannya dapat diwujudkan adalah 74.50% dengan kategori nilai *sedang* dan atribut capaian indikator kinerja *berhasil*. Bila dibandingkan dengan pencapaian sasaran IKU Dinas Kesehatan tahun 2022 yakni sebesar 94.92% (kategori nilai sangat tinggi dan atribut capaian indikator kinerja sangat berhasil), maka terlihat ada penurunan pencapaian sasaran IKU Dinas Kesehatan tahun 2023.

Pencapaian sasaran IKU Dinas Kesehatan Kota Dumai dari tahun 2020 s.d 2023 dan proyeksi tahun 2024 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Pencapaian sasaran IKU Dinas Kesehatan dari tahun 2020 s.d 2023 dan proyeksi tahun 2024 dan 2025

No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian				Proyeksi	
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Angka Kematian Bayi	IKU	IKK	SDG's Renstra Kes	19 per 1.000 KH	18 per 1.000 KH	17.5 per 1.000 KH	17 per 1.000 KH	7.35 per 1.000 KH	8.26 per 1.000 KH	9.96 per 1.000 KH	11.36 per 1.000 KH	8 per 1.000 KH	8 per 1.000 KH
2	Angka Kematian Balita	IKU	IKK	SDG's Renstra Kes	26 per 1.000 KH	25 per 1.000 KH	24.5 per 1.000 KH	24 per 1.000 KH	8.81 per 1.000 KH	9.82 per 1.000 KH	11.13 per 1.000 KH	13.42 per 1.000 KH	11 per 1.000 KH	10 per 1.000 KH
3	Angka Kematian Ibu	IKU	IKK	SDG's Renstra Kes	102 per 100.000 KH	102 per 100.000 KH	101.5 per 100.000 KH	101 per 100.000 KH	36.73 per 100.000 KH	263.41 per 100.000 KH	58.56 per 100.000 KH	103.23 per 100.000 KH	100.5 per 100.000 KH	100 per 100.000 KH
4	Angka Harapan Hidup Waktu Lahir (Umur)	IKU	-	RPJMD Renstra Kes	71.04 tahun	71.04 tahun	71.10 tahun	71.71.29-71.33 tahun	70.93 tahun	70.98 tahun	71.25 tahun	71.67 tahun	71.34-71.37 tahun	71.38-71.42 tahun
5	Angka Kesakitan Malaria	IKU	IKK	SDG's Renstra Kes	1 per 1.000 penduduk	1 per 1.000 penduduk	0.9 per 1.000 penduduk	0.8 per 1.000 penduduk	0.01 per 1.000 penduduk	0.003 per 1.000 penduduk	0.02 per 1.000 penduduk	0.01 per 1.000 penduduk	0.1 per 1.000 penduduk	0.1 per 1.000 penduduk
6	Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +	IKU	IKK	Renstra Kes	88%	88%	88%	88%	66.57%	9.35%	41.42%	72.00%	88%	88%
7	Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko	IKU	-	Renstra Kes	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	2.03%	0.17%	0.16%	0.18%	< 1%	< 1%
8	Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)	IKU	IKK	SDG's Renstra Kes	2 per 100.000 penduduk	55 per 100.000 penduduk	55 per 100.000 penduduk	55 per 100.000 penduduk	114.27 per 100.000 penduduk	15.56 per 100.000 penduduk	56.64 per 100.000 penduduk	198.03 per 100.000 penduduk	54 per 100.000 penduduk	54 per 100.000 penduduk
9	Persentase Balita dengan Gizi Buruk	IKU	-	Renstra Kes	2%	1%	1%	1%	0.01%	0.03%	0.12%	0.07%	1%	1%
10	Persentase Balita dengan Gizi Kurang	IKU	IKK	SDG's Renstra Kes	5%	3%	3%	3%	0.41%	0.38%	0.69%	1.10%	2%	2%
11	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai	IKU	-	RPJMD SDG's Renstra Kes	90%	92%	92.2%	97.0%	85.52%	87.55%	95.80%	100.02%	100%	100%

Rincian capaian kinerja masing-masing sasaran strategis dapat dilihat dari pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Dumai sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

1.1 Menurunnya Mortalitas (Angka Kematian)

Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi mencerminkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal. Pada tahun 2023 jumlah kasus kematian bayi yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 99 kasus dari 8.718 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kematian bayi di Kota Dumai sebesar 11.36 per 1.000 kelahiran hidup. Target indikator angka kematian bayi tahun 2023 yakni 17 per 1.000 kelahiran hidup, sehingga persentase pencapaiannya 100% yang berarti pencapaian indikator angka kematian bayi sangat tinggi dengan atribut capaian indikator kinerja sangat berhasil.

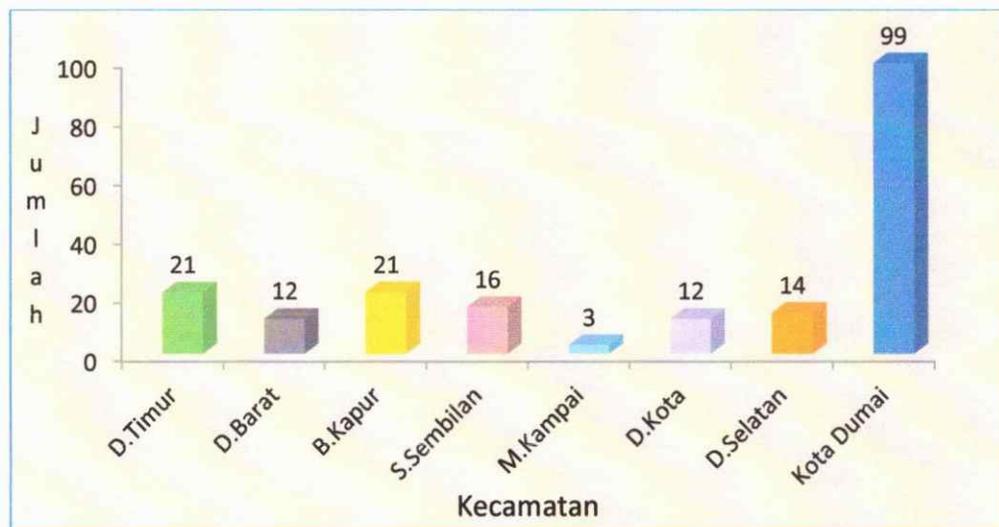
Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 dimana angka kematian bayi sebesar 9.96 per 1000 kelahiran hidup, terlihat angka kematian bayi pada tahun 2023 mengalami peningkatan. Bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2023 yakni 17 per 1.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian bayi di Kota Dumai masih di bawah target. Demikian juga bila dibandingkan dengan target Nasional sebesar 17.6 per 1.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian bayi di Kota Dumai masih di bawah target Target Nasional. Hal ini menggambarkan kualitas kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal di Kota Dumai masih baik. Pencapaian Angka Kematian Bayi Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2023 menunjukkan peningkatan, seperti terlihat pada grafik 2.1 berikut ini :

Grafik 2.1
Pencapaian Angka Kematian Bayi Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2023



Berdasarkan kecamatan, jumlah kasus kematian bayi terbanyak berada di Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Bukit Kapur masing-masing sebanyak 21 kasus (21.21%), disusul dengan Kecamatan Sungai Sembilan sebanyak 16 kasus (16.16%), seperti terlihat pada grafik 2.2 berikut ini :

Grafik 2.2
Jumlah Kematian Bayi Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai tahun 2023



Penyebab kematian bayi didominasi oleh kasus Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan Asfiksia

Angka Kematian Balita

Angka kematian balita menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi dan penyakit infeksi. Pada tahun 2023 jumlah kasus kematian balita yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 117 kasus dari 8.718 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kematian balita tahun 2023 di Kota Dumai sebesar 13.42 per 1.000 kelahiran hidup. Target kinerja angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup Kota Dumai pada tahun 2023 adalah sebesar 24 per 1.000 kelahiran hidup, sehingga persentase pencapaian kinerjanya 100% yang berarti pencapaian indikator angka kematian balita sangat tinggi dengan atribut capaian indikator kinerja sangat berhasil.

Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 dimana angka kematian balita sebesar 11.13 per 1000 kelahiran hidup, maka angka tersebut mengalami peningkatan. Lebih lanjut, bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2023 yakni 24 per 1.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian balita ini masih di bawah target. Pencapaian Angka Kematian Balita Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2023 menunjukkan peningkatan, seperti terlihat pada grafik 2.3 berikut ini :

Grafik 2.3
Pencapaian Angka Kematian Balita Kota Dumai
dari Tahun 2020 sampai dengan 2023



Berdasarkan Kecamatan, jumlah kasus kematian balita terbanyak berada di Kecamatan Dumai Timur sebanyak 24 kasus (20.51%), Kecamatan Bukit kapur sebanyak 23 kasus (19.66%), disusul Kecamatan Dumai Barat Dan

Kecamatan Dumai Kota masing-masing sebanyak 17 kasus (14.53%) seperti terlihat pada grafik 2.4 berikut ini :

Grafik 2.4
Jumlah kematian Balita Berdasarkan Kecamatan
di Kota Dumai Tahun 2023



Penyebab kematian balita masih didominasi oleh BBLR dan Asfiksia.

Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kondisi ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, waktu melahirkan dan masa nifas. Pada tahun 2023 jumlah kasus kematian ibu dengan penyebab langsung yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 9 kasus dari 8.718 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kematian ibu tahun 2023 di Kota Dumai sebesar 103.23 per 100.000 kelahiran hidup. Target kinerja angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup Kota Dumai pada tahun 2023 adalah sebesar 101 per 100.000 kelahiran hidup, sehingga persentase pencapaian kinerjanya 97.79% yang berarti pencapaian indikator angka kematian ibu sangat tinggi dengan atribut capaian indikator kinerja sangat berhasil.

Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022, di mana angka kematian ibu sebesar 58.56 per 100.000 kelahiran hidup, maka terlihat adanya peningkatan angka kematian ibu pada tahun 2023. Bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2023 yakni 101 per 100.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian ibu ini telah melebihi target (yang berarti tingkat pencapaiannya tidak baik). Namun bila dibandingkan dengan target

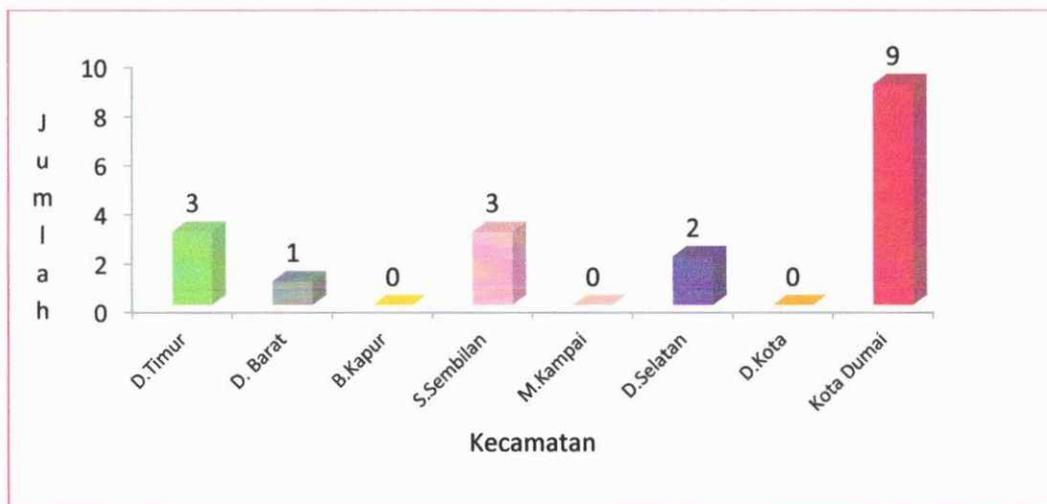
Nasional sebesar 194 per 100.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian ibu di Kota Dumai masih di bawah Target Nasional. Pencapaian Angka Kematian Ibu Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2023 menunjukkan fluktuasi dan cenderung meningkat seperti terlihat grafik 2.5 berikut ini :

Grafik 2.5
Pencapaian Angka Kematian Ibu di Kota Dumai
dari Tahun 2020 sampai dengan 2023



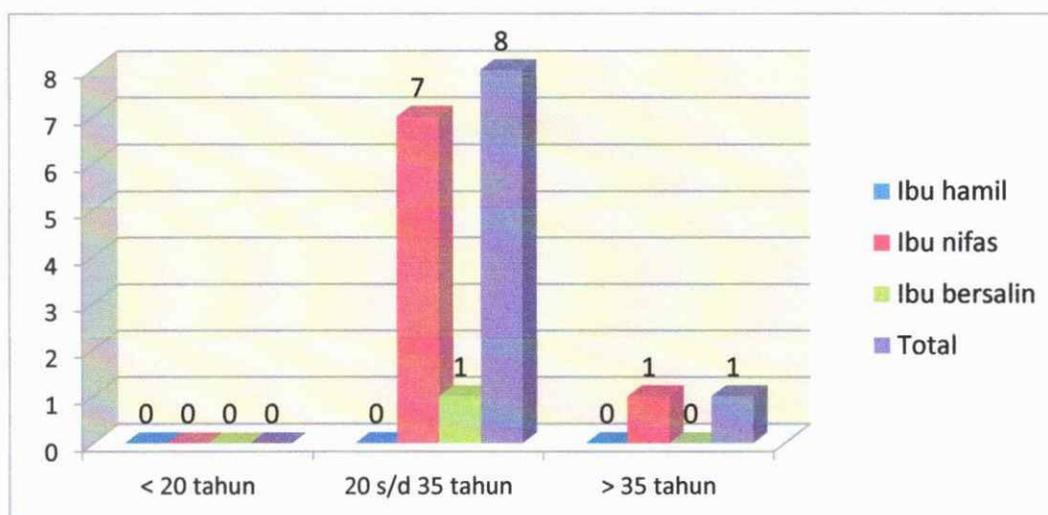
Berdasarkan kecamatan, jumlah kasus kematian ibu terbanyak di Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Sungai Sembilan masing-masing sebanyak 3 kasus (33.33%), disusul dengan Kecamatan Dumai Selatan sebanyak 2 kasus (22.22%) seperti terlihat pada grafik 2.6 berikut ini :

Grafik 2.6
Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Kecamatan
di Kota Dumai Tahun 2023



Penyebab kematian ibu adalah karena perdarahan sebanyak 4 kasus, gangguan hipertensi sebanyak 3 kasus dan lainnya sebanyak 2 kasus. Berdasarkan kelompok umur, kasus kematian ibu terbanyak terjadi pada kelompok umur 20-35 tahun yakni sebanyak 8 kasus, sedangkan berdasarkan kelompok kematian, mayoritas kasus kematian ibu seluruhnya terjadi pada kelompok ibu nifas sebanyak 8 kasus seperti terlihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.7
Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Jenis Kematian Ibu dan Kelompok Umur di Kota Dumai Tahun 2023



Berdasarkan tempat meninggal, sebanyak 7 kasus atau sebesar 77.78% kematian ibu merupakan kasus rujukan yang meninggal di RSUD Kota Dumai, dan sisanya sebanyak 2 kasus (22.22%) meninggal di rumah pasien. Hal tersebut menunjukkan masih belum optimalnya pelayanan ibu bersalin dan ibu nifas di Kota Dumai.

Umur Harapan Hidup

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau pencapaian kinerja Umur Harapan Hidup untuk Kota Dumai pada tahun 2023 adalah sebesar 71,67 tahun. Target kinerja Umur Harapan Hidup Kota Dumai pada tahun 2023 adalah sebesar 71.29-71,33 tahun, sehingga persentase pencapaian kinerjanya 100% yang berarti pencapaian indikator Umur Harapan Hidup sangat tinggi dengan atribut capaian indikator kinerja sangat berhasil.

Pencapaian Umur Harapan Hidup Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2023 menunjukkan peningkatan seperti terlihat pada grafik 2.8 berikut ini :

Grafik 2.8
Pencapaian Umur Harapan Hidup Kota Dumai
dari Tahun 2020 sampai dengan 2023



Tabel 2.7
Umur Harapan Hidup (UHH)
di Indonesia, Provinsi Riau dan Kota Dumai
dari Tahun 2020 sampai dengan 2023

No	Tahun	Indonesia	Provinsi Riau	Kota Dumai
1.	2020	71,47	71,60	70,93
2.	2021	71.57	71.67	70.98
3.	2022	71.85	71.95	71.25
4.	2023	73.93	72.24	71.67

Sumber : Badan Pusat Statistik Pusat Tahun 2023

Bila dibandingkan dengan pencapaian Umur Harapan Hidup Provinsi Riau pada tahun 2023 yakni sebesar 71,24 dan pencapaian Umur Harapan Hidup Indonesia pada tahun 2023 yakni sebesar 73.93, terlihat capaian Umur Harapan Hidup Kota Dumai masih di bawah angka Provinsi Riau dan angka Nasional.

1.2 Menurunnya Morbiditas (Angka Kesakitan)

Angka Kesakitan Malaria

Upaya kegiatan pengendalian vektor melalui penyemprotan rumah (IRS) dapat dinilai belum efektif bila dilihat dari dampak terhadap peningkatan angka malaria klinis. Pada tahun 2023 ditemukan sebanyak 155 kasus malaria klinis. Dari 155 kasus yang ada terdapat 5 kasus penderita malaria positif sehingga di dapatkan *Annual Parasite Incidence* (API) sebesar 0.01 per 1.000 penduduk. Target kinerja Angka Kesakitan Malaria atau API (*Annual Parasite Incidence*) Kota Dumai pada tahun 2023 adalah sebesar 0.8 per 1.000 penduduk, sehingga persentase pencapaian kinerjanya 100% yang berarti pencapaian indikator Angka Kesakitan Malaria (API) sangat tinggi dengan atribut capaian indikator kinerja sangat berhasil.

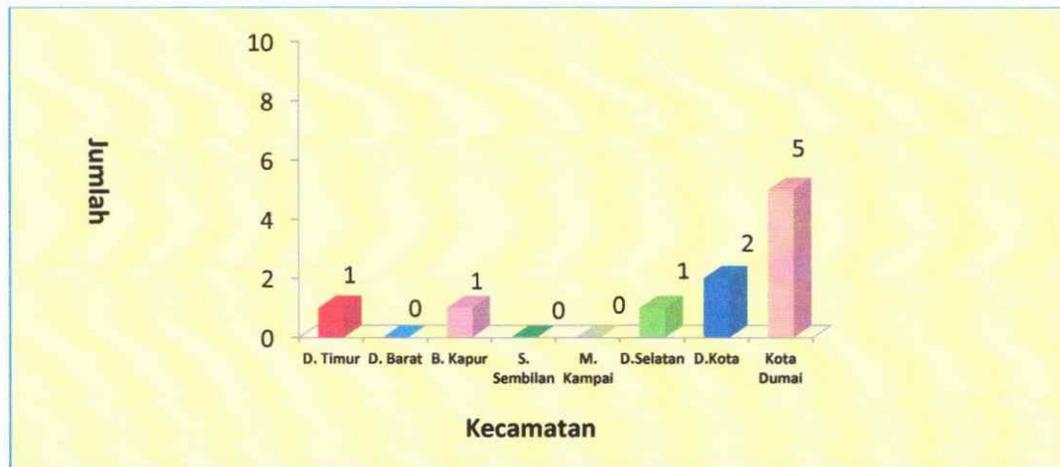
Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 di mana *Annual Parasite Incidence* (API) sebesar 0.02 per 1.000 penduduk, terlihat ada sedikit penurunan angka *Annual Parasite Incidence* (API) pada tahun 2023. Bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2023 yakni 0.8 per 1.000 penduduk maka pencapaian *Annual Parasite Incidence* (API) ini masih di bawah target (yang berarti tingkat pencapaiannya masih baik). Seluruh penderita Malaria (100%) telah mendapat pengobatan standar di puskesmas. Pencapaian Angka Kesakitan Malaria Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2023 berfluktuasi dan cenderung menurun seperti terlihat pada grafik 2.9 dibawah ini :

Grafik 2.9
Pencapaian Angka Kesakitan Malaria
Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023



Berdasarkan kecamatan, jumlah kasus Malaria positif ditemukan di 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Dumai Kota sebanyak 2 kasus, Kecamatan Dumai Timur sebanyak 1 kasus (kasus import), Kecamatan Dumai Selatan sebanyak 1 kasus, dan Kecamatan Bukit Kapur sebanyak 1 kasus seperti terlihat pada grafik 2.10 berikut ini:

Grafik 2.10
Jumlah Kasus Malaria Berdasarkan Kecamatan
Di Kota Dumai Tahun 2023

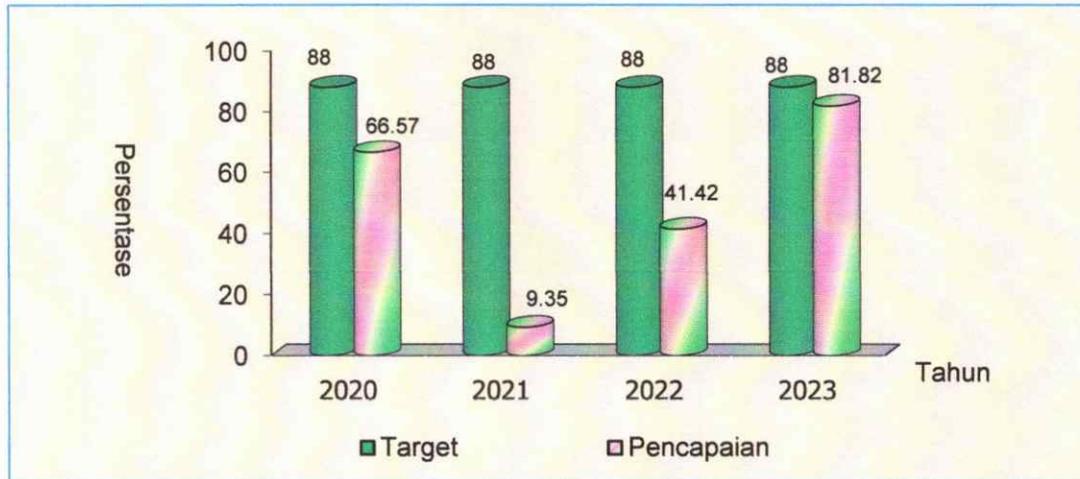


Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +

Pada tahun 2023 dari total 450 penderita TB Paru BTA+ yang ditemukan (12-15 bulan yang lalu) dan diberikan pengobatan dengan OAT selama 6 bulan, hasil evaluasi pengobatan menunjukkan sebanyak 324 orang dinyatakan sembuh (hasil pemeriksaan dahaknya menunjukkan 2 kali negatif). Dengan demikian pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA+ adalah sebesar 72%. Target kinerja Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA+ Kota Dumai pada tahun 2023 adalah sebesar 88%, sehingga persentase pencapaian kinerjanya sebesar 81.82%, yang berarti pencapaian indikator Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA+ tinggi dengan atribut capaian indikator kinerja berhasil.

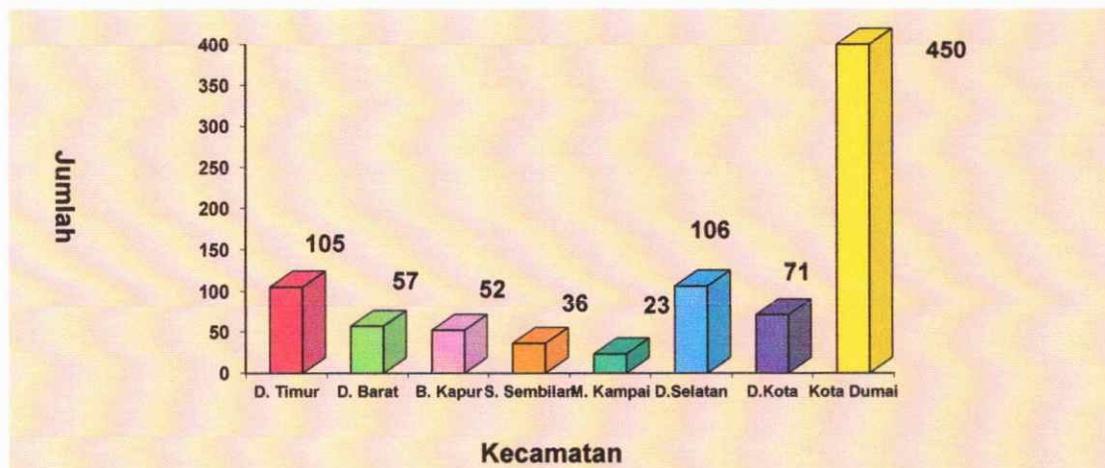
Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 sebesar 41.42%, maka terlihat ada peningkatan angka kesembuhan penderita TB Paru BTA+. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai sebesar 88%, maka pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA+ tahun 2023 belum mencapai target. Pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA+ dari tahun 2020 sampai dengan 2023 berfluktuasi dan cenderung meningkat seperti terlihat pada grafik 2.11 berikut ini :

Grafik 2.11
Pencapaian Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA + Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023



Berdasarkan kecamatan, kasus TB Paru BTA+ banyak terjadi di Kecamatan Dumai Selatan (106 kasus) disusul dengan Kecamatan Dumai Timur (105 kasus) dan Kecamatan Dumai Kota (58 kasus), seperti terlihat pada grafik 2.12 berikut ini :

Grafik 2.12
Jumlah Kasus TB Paru BTA+ Berdasarkan Kecamatan Di Kota Dumai Tahun 2023



Tingginya kasus TB Paru BTA+ di 3 (tiga) kecamatan tersebut disebabkan ke tiga kecamatan tersebut merupakan kecamatan dengan padat penduduk yang memudahkan penularan penyakit TB Paru BTA+.

Dari sebanyak 126 pasien TB Paru BTA+ yang dinyatakan belum sembuh, sebanyak 90 orang atau sebesar 71.43% tetap melakukan pengobatan

hingga akhir pengobatan dengan status pengobatan lengkap, sebanyak 0 orang dinyatakan gagal, sebanyak 22 orang atau sebesar 17.46% meninggal dunia, sebanyak 10 orang atau sebesar 7.94% Lost Follow Up (LFU) dan sebanyak 4 orang atau sebesar sebesar 3.17% pindah domisili.

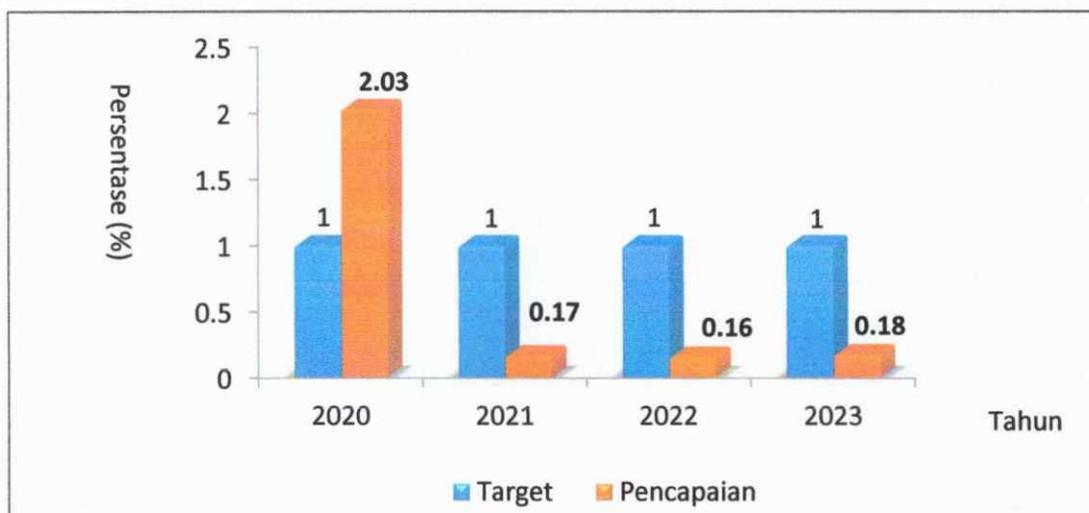
Prevalensi Penderita HIV terhadap Penduduk Beresiko

Sampai dengan akhir tahun 2023, jumlah kumulatif kasus HIV yang dijumpai di Kota Dumai sebanyak 595 kasus yang terdiri dari 547 kasus lama dan 48 kasus baru yang ditemukan tahun 2023. Dari 595 kasus HIV yang ditemukan, jumlah penderita HIV yang meninggal sebanyak 121 kasus, Lost Follow Up (LFU) sebanyak 98 kasus (hilang kontak) dan sebanyak 8 kasus berhenti minum obat ARV, sehingga jumlah penderita HIV yang hidup sampai saat ini adalah 368 orang terdiri penderita HIV Laki-laki sebanyak 191 orang (51.90%) dan penderita HIV Perempuan sebanyak 177 orang (48.10%). Dengan demikian prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko (sasaran kelompok usia produktif usia 15-59 tahun sebanyak 209.297 orang) pada tahun 2023 adalah sebesar 0.18%. Target kinerja Prevalensi Penderita HIV terhadap Penduduk Beresiko Kota Dumai pada tahun 2023 adalah sebesar <1%, sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar 100%, yang berarti pencapaian indikator Prevalensi Penderita HIV terhadap Penduduk Beresiko sangat tinggi dengan atribut capaian indikator kinerja sangat berhasil.

Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 dimana prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko sebesar 0.16%, maka terlihat ada peningkatan angka prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko pada tahun 2023. Lebih lanjut, bila dibandingkan dengan target Kota Dumai tahun 2023 sebesar <1%, maka pencapaian tersebut masih dibawah target.

Pencapaian Prevalensi Penderita HIV terhadap Penduduk Beresiko dari tahun 2020 sampai dengan 2023 menunjukkan bahwa Prevalensi Penderita HIV terhadap Penduduk Beresiko Kota Dumai berfluktuasi dan cenderung meningkat seperti terlihat pada grafik 2.13 berikut ini :

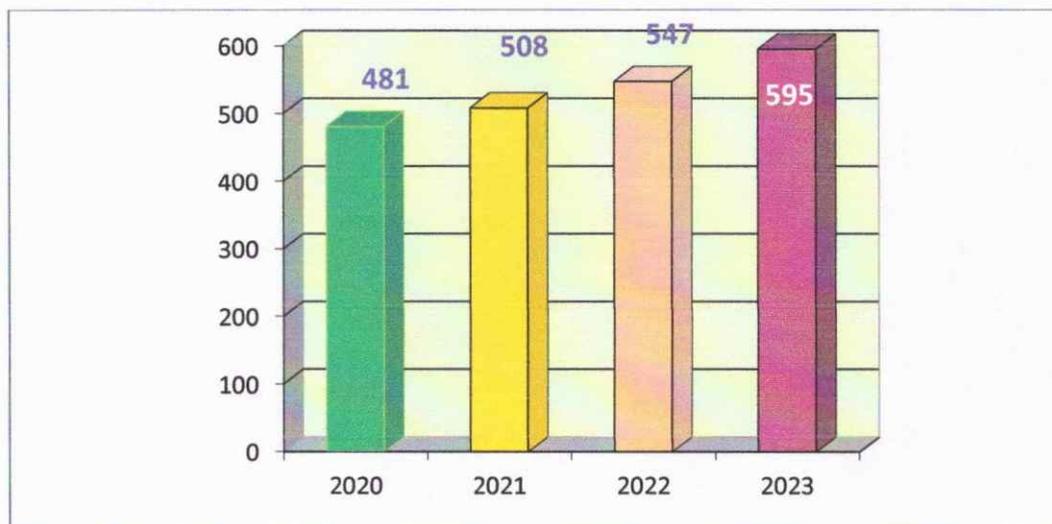
Grafik 2.13
Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Bersesiko
Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023



Melihat potensi Kota Dumai sebagai Kota Jasa dan Industri, daerah yang memiliki pelabuhan internasional dan sebagai pintu gerbang keluar masuknya bagi wisatawan asing maupun pelaut asing, serta mobilisasi penduduk dari dan ke kabupaten/kota yang memiliki angka prevalensi HIV/AIDS cukup tinggi seperti Kota Batam, Tanjung Balai Karimun, serta Kepulauan Riau, maka tidak tertutup besar kemungkinannya penyakit HIV/AIDS akan menjadi permasalahan di Kota Dumai. Meskipun pencapaian angka prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko Kota Dumai rendah, hal tersebut perlu tetap diwaspadai karena kasus HIV merupakan fenomena gunung es.

Pada tahun 2023 pencapaian angka insidensi HIV per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV di Kota Dumai sebesar 0.14 per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 dimana angka insidensi HIV per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV di Kota Dumai sebesar 0.10 per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV, maka terlihat ada peningkatan angka insidensi HIV per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV pada tahun 2023. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai tahun 2023 sebesar 0.13 per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV, maka pencapaian tersebut telah melebihi target.

Grafik 2.14
Data Kumulatif Kasus HIV Kota Dumai Dari Tahun 2020 s/d 2023



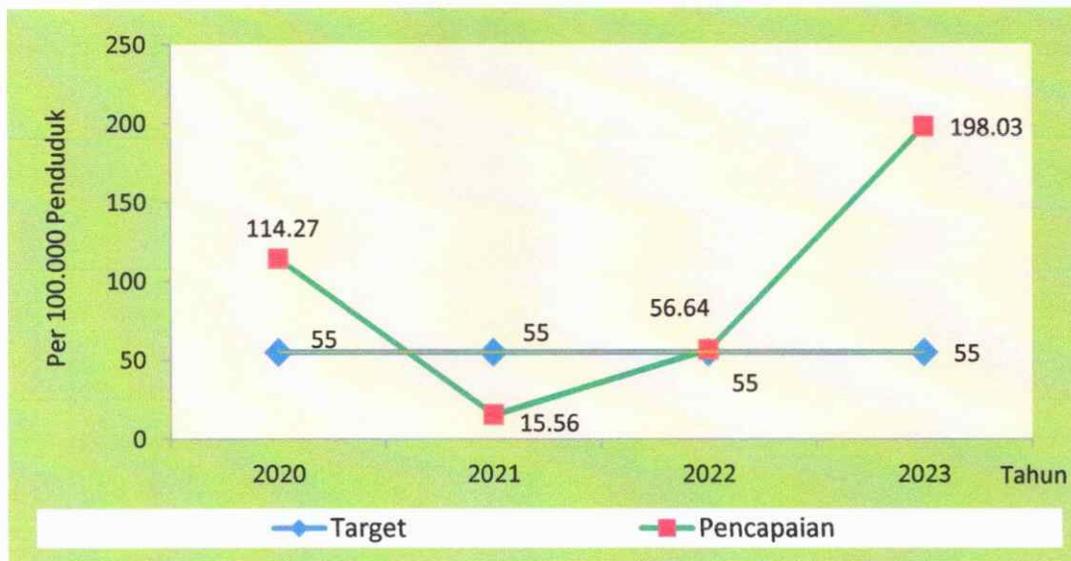
Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)

Kota Dumai merupakan daerah endemis Demam Berdarah Dengue (DBD). Pada tahun 2023 di Kota Dumai ditemukan kasus DBD sebanyak 664 kasus atau Incidence Rate (IR) = 198.03 per 100.000 penduduk dengan angka kematian sebanyak 9 orang atau CFR = 1.37%. Target kinerja Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) Kota Dumai pada tahun 2023 adalah sebesar 55 per 100.000 penduduk, sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar -160.06%, yang berarti pencapaian indikator Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) sangat rendah dengan atribut capaian indikator kinerja tidak berhasil.

Bila dibandingkan dengan tahun 2022 dimana ditemukan kasus DBD sebanyak 186 kasus atau IR = 56.64 per 100.000 penduduk dengan kematian sebanyak 0 orang atau CFR = 0 %, maka ada peningkatan angka kesakitan Demam Berdarah Dengue yang signifikan pada tahun 2023. Lebih lanjut, bila dibandingkan dengan target Kota Dumai tahun 2023 sebesar 55 per 100.000 penduduk, maka pencapaian tersebut telah melebihi target.

Pencapaian angka kesakitan DBD Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023 menunjukkan fluktuasi dan cenderung meningkat seperti terlihat pada grafik 2.15 berikut ini

Grafik 2.15
Pencapaian Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue
Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023

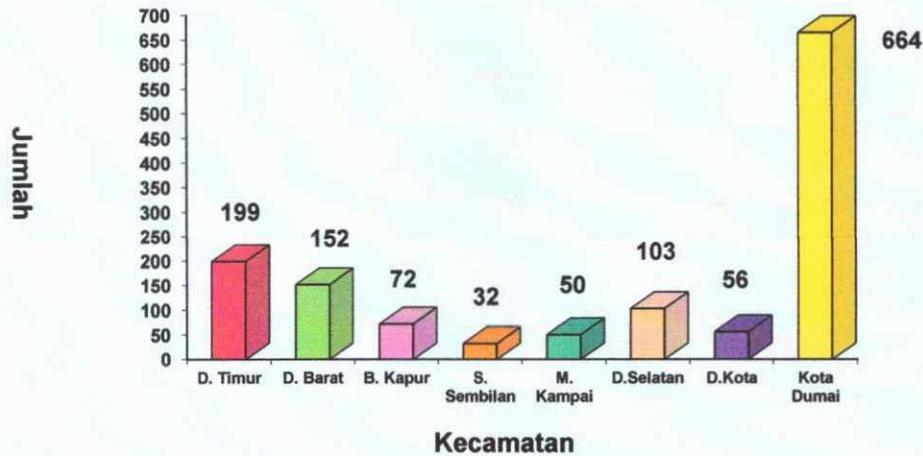


Tingginya angka kesakitan DBD terutama disebabkan oleh faktor perilaku, lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat yang masih mendukung sebagai tempat berkembang biaknya nyamuk vektor DBD seperti $\pm 80\%$ penduduk Dumai masih menggunakan bak-bak penampung air hujan (PAH) dalam memenuhi kebutuhan air bersih, serta tingginya mobilitas penduduk. Di samping itu, dampak dari global warming juga memicu meningkatnya angka kesakitan DBD. Dari hasil pengamatan data jumlah kasus DBD dalam kurun waktu tertentu menunjukkan grafik naik turun. Berdasarkan pengamatan tersebut, ada suatu masa yang menunjukkan pola jumlah kasus DBD yang lebih tinggi di banding waktu-waktu lainnya, yang biasanya muncul setiap lima tahun. Inilah yang kemudian di sebut dengan siklus lima tahunan DBD.

Berdasarkan kecamatan, jumlah kasus DBD terbanyak ditemukan di Kecamatan Dumai Timur yakni sebanyak 199 kasus (29.97%), disusul dengan Kecamatan Dumai Barat sebanyak 152 kasus (22.89%) dan Kecamatan Dumai Selatan sebanyak 103 kasus (15.51%), seperti terlihat pada grafik 2.16 berikut ini

:

Grafik 2.16
Jumlah Kasus DBD Berdasarkan Kecamatan
Di Kota Dumai Tahun 2023



Untuk meminimalisir dan mencegah penularan kasus DBD dilakukan dengan metode fogging focus. Fogging atau pengasapan dilakukan untuk memutuskan rantai penularan dengan cara membunuh nyamuk dewasa yang telah Infektif (terinfeksi Virus Dengue). Nyamuk yang telah menggigit penderita akan menjadi infektif dan apabila tidak dibunuh maka selama hidup nyamuk tersebut akan menjadi sumber penyebaran penyakit DBD. Kegiatan fogging focus dilakukan setiap ditemukan kasus tersangka DBD berdasarkan rekomendasi hasil penyelidikan epidemiologi (PE) dengan luas daerah penyemprotan atau radius 200 M2 dan dilakukan di 250 fokus sebanyak 2 siklus dengan interval 1 (satu) minggu. Namun demikian, fogging/ pengasapan bukanlah solusi dalam upaya pengendalian penyakit demam berdarah, upaya yang paling efektif adalah dengan pemberantasan sarang nyamuk secara serentak oleh seluruh warga masyarakat dan secara terus menerus.

1.3 Meningkatnya Status Gizi Balita

Persentase Balita Dengan Gizi Buruk

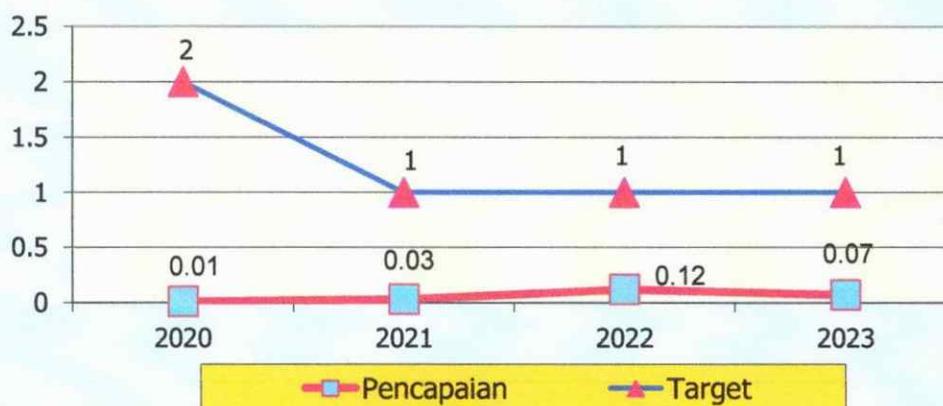
Status gizi sangat erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan secara umum, karena disamping merupakan faktor predisposisi yang dapat memperparah penyakit infeksi secara langsung dan juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan individual. Bahkan status gizi janin yang masih berada dalam kandungan dan bayi yang sedang menyusui sangat dipengaruhi oleh

status gizi ibu hamil dan ibu menyusui. Pengukuran gizi pada balita difokuskan pada tingkat kecukupan gizinya yang diukur melalui berat badan terhadap umur atau berat badan terhadap tinggi badan yang dilakukan di posyandu. Menurut Departemen Kesehatan RI (2008), gizi buruk adalah suatu keadaan kurang gizi tingkat berat pada anak berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) ≤ 3 standar deviasi WHO-NCHS dan ditemukan tanda-tanda klinis marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwashiorkor.

Pada tahun 2023 ditemukan kasus balita dengan gizi buruk sebanyak 13 kasus dari 19.267 balita yang ditimbang. Dengan demikian persentase balita dengan gizi buruk di Kota Dumai adalah sebesar 0,07%. Target kinerja persentase balita dengan gizi buruk Kota Dumai pada tahun 2023 adalah sebesar 1%, sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar 100%, yang berarti pencapaian indikator persentase balita dengan gizi buruk sangat tinggi dengan atribut capaian indikator kinerja sangat berhasil.

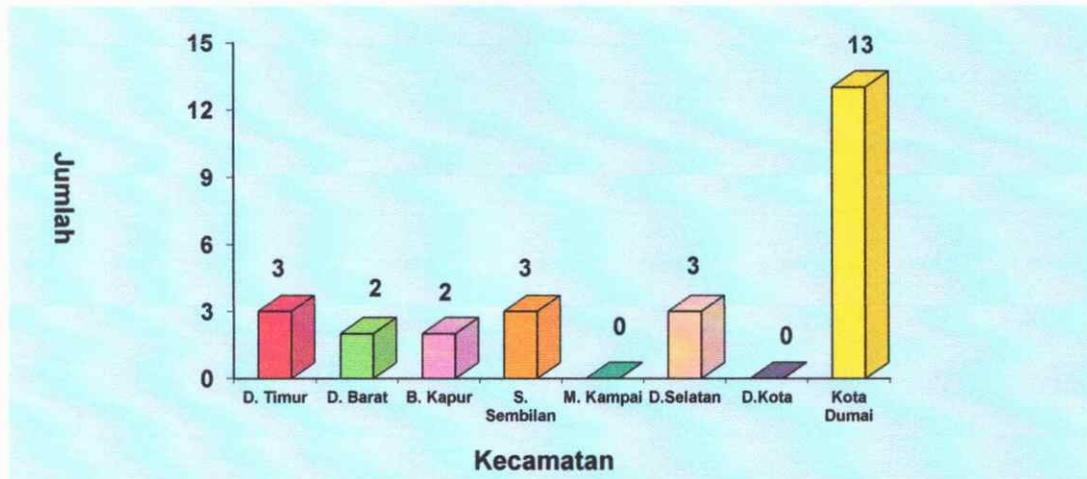
Bila dibandingkan dengan tahun 2022 dimana ditemukan kasus gizi buruk sebanyak 23 kasus dengan persentase balita dengan gizi buruk sebesar 0.12%, maka ada penurunan kasus gizi buruk pada tahun 2023. Lebih lanjut, bila dibandingkan dengan target Kota Dumai Tahun 2023 yakni sebesar 1%, maka pencapaian tersebut masih di bawah target. Pencapaian persentase balita dengan gizi buruk Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023 menunjukkan bahwa persentase balita dengan gizi buruk mengalami fluktuasi seperti terlihat pada grafik 2.17 berikut ini

Grafik 2.17
Pencapaian Persentase Balita Dengan Gizi Buruk
Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2023



Berdasarkan kecamatan, kasus balita dengan gizi buruk terbanyak ditemukan di Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Dumai Selatan dan Kecamatan Sungai Sembilan masing-masing sebanyak 3 kasus, seperti terlihat pada grafik 2.18 berikut ini :

Grafik 2.18
Jumlah Kasus Balita dengan Gizi Buruk Berdasarkan Kecamatan Di Kota Dumai Tahun 2023



Terhadap 13 kasus gizi buruk tersebut telah dilakukan intervensi berupa pemberian PMT pemulihan berupa susu bubuk formula 100 kkal/100 ml atau 150 gram per hari dan biskuit) selama 90 hari, pemberian larutan F100 dan pemantauan setiap minggunya oleh Tim Pemantau Gizi (TPG) puskesmas dengan cara melakukan pengukuran antropometri yaitu menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan balita, pemeriksaan klinis oleh dokter puskesmas, dan pemberian konseling serta penyuluhan gizi kepada ibu atau pengasuhnya. Dari 13 balita gizi buruk yang diintervensi sampai akhir tahun 2023, tinggal sebanyak 4 balita yang masih berstatus gizi buruk karena balita tersebut juga menderita penyakit penyerta. Agar status gizi balita tersebut dapat ditingkatkan menjadi gizi baik, maka penyakit penyertanya harus disembuhkan terlebih dahulu.

Persentase Balita Dengan Gizi Kurang

Gizi Kurang adalah gangguan kesehatan akibat kekurangan atau ketidakseimbangan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, aktivitas berfikir dan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan. Kekurangan zat gizi

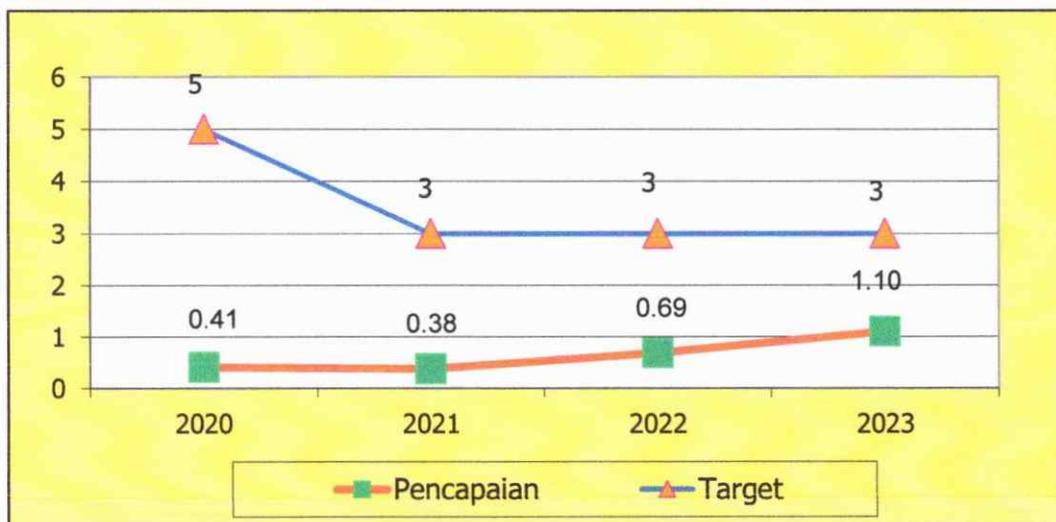
adaptif bersifat ringan sampai dengan berat. Gizi kurang banyak terjadi pada anak usia kurang dari 5 tahun. Menurut Departemen Kesehatan RI (2008), gizi kurang adalah suatu keadaan kurang gizi tingkat berat pada anak berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) < 2 s/d -3 standar deviasi WHO-NCHS.

Pada tahun 2023 ditemukan kasus balita dengan gizi kurang sebanyak 212 kasus dari 19.267 balita yang ditimbang. Dengan demikian persentase balita dengan gizi kurang di Kota Dumai adalah sebesar 1.10%. Target kinerja persentase balita dengan gizi kurang Kota Dumai pada tahun 2023 adalah sebesar 3%, sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar 100%, yang berarti pencapaian indikator persentase balita dengan gizi kurang sangat tinggi dengan atribut capaian indikator kinerja sangat berhasil.

Bila dibandingkan dengan tahun 2022 dimana kasus balita dengan gizi kurang yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 133 kasus dengan persentase balita dengan gizi kurang sebesar 0.69%, terlihat ada peningkatan kasus balita dengan gizi kurang pada tahun 2023. Lebih lanjut, bila dibandingkan dengan target Kota Dumai Tahun 2023 yakni sebesar 3%, maka pencapaian tersebut masih di bawah target.

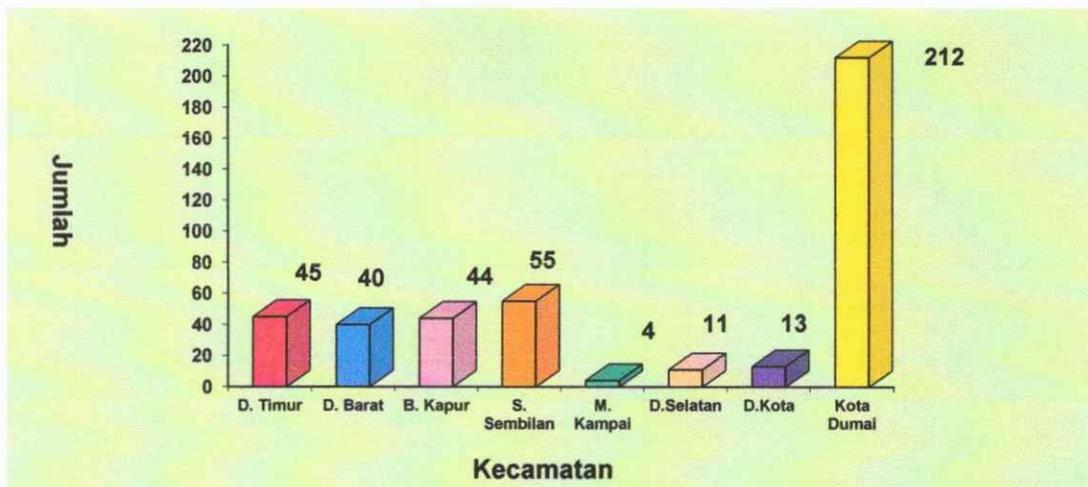
Pencapaian Persentase Balita Dengan Gizi Kurang Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023 menunjukkan fluktuasi dan cenderung meningkat seperti terlihat pada grafik 2.19 berikut ini:

Grafik 2.19
Pencapaian Persentase Balita Dengan Gizi Kurang Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2023



Berdasarkan kecamatan, kasus balita dengan gizi kurang terbanyak ditemukan di Kecamatan Sungai Sembilan sebanyak 55 kasus (25.94%) disusul dengan Kecamatan Dumai Timur sebanyak 45 kasus (21.23%), dan Kecamatan Bukit Kapur sebanyak 44 kasus (20.75%) seperti terlihat pada grafik 2.20 berikut ini :

Grafik 2.20
Jumlah Kasus Balita dengan Gizi Kurang Berdasarkan Kecamatan Di Kota Dumai Tahun 2023



Terhadap balita gizi kurang tersebut dilakukan intervensi berupa pemberian PMT pemulihan berupa pemberian makanan tambahan lokal dan pabrikan dan pemantauan setiap minggunya dengan cara melakukan pengukuran antropometri yaitu menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan balita. Dari 212 balita gizi kurang yang diintervensi sampai akhir tahun 2023, sebanyak 92 balita mengalami peningkatan status gizi menjadi gizi baik dan hanya 120 balita yang tetap dalam keadaan status gizi kurang.

Ada beberapa faktor penyebab kasus balita gizi kurang antara lain karena pola makan balita yang salah, ketidaktepatan pola asuh, faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi terhadap kemampuan membeli pangan keluarga, serta adanya penyakit penyerta yang diderita balita. Dengan demikian dalam upaya mencapai target penurunan persentase gizi kurang tersebut, perlu adanya penanganan intensif terhadap permasalahan gizi kurang yang ada di Kota Dumai. Selain itu, untuk menekan agar potensi terjadinya kasus balita dengan gizi kurang tidak menjadi lebih besar tetap perlu diperlukan upaya-upaya yang strategis. Upaya yang sudah dilaksanakan adalah dengan

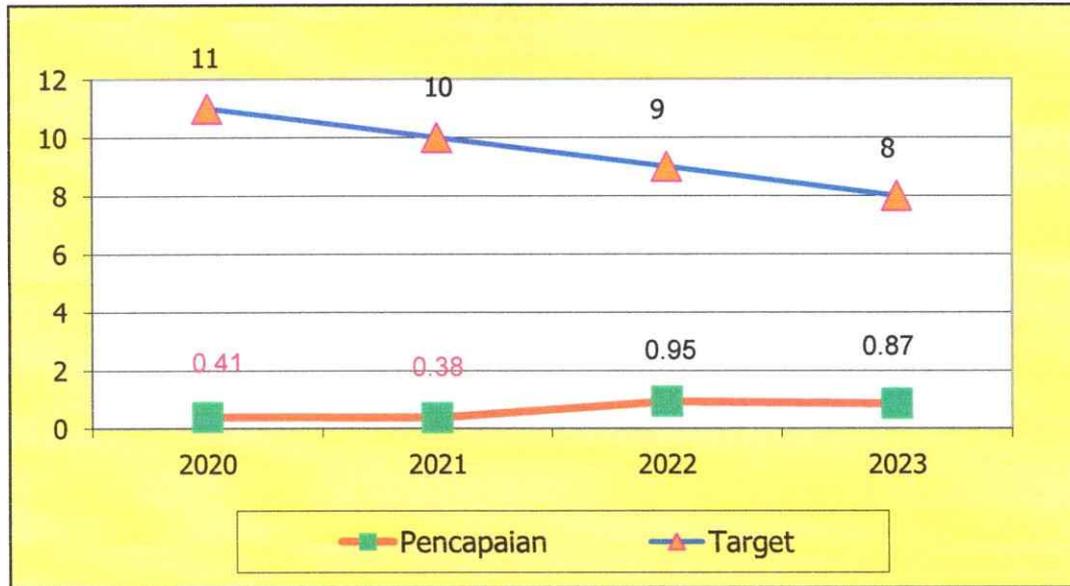
pemberian makanan tambahan, konseling dan pengobatan di puskesmas, serta perawatan di Kota Dumai.

Perbaikan status gizi masyarakat merupakan salah satu prioritas baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah. Salah satu kondisi gizi kurang yang menjadi issue strategis baik Gobal, Nasional maupun Provinsi adalah balita pendek atau stunting. Menurut WHO (2015), stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi bdannya berada di bawah standar. Selanjutnya menurut WHO (2020), stunting adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang/tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 standar deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan WHO yang terjadi dikarenakan kondisi irreversible akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan/atau infeksi berulang / kronis yang terjadi dalam 1000 HPK.

Berdasarkan data e-PPGBM per Desember Tahun 2023 diperoleh status gizi balita stunting (pendek dan sangat pendek) di Kota Dumai sebanyak 168 orang dari 19.267 balita yang ditimbang (prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita sebesar 0.87%). Bila dibandingkan dengan data e-PPGBM tahun 2022 dimana status gizi balita stunting (pendek dan sangat pendek) di Kota Dumai sebanyak 185 orang dari 19.381 balita yang ditimbang (prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita sebesar 0.95%), maka terlihat ada penurunan kasus stunting pada Tahun 2023. Adanya penurunan jumlah kasus stunting pada tahun 2023 karena ada balita stunting yang mengalami peningkatan panjang badan/tinggi badan dan ada balita yang sudah tidak berada pada umur 0-60 bulan. Target kinerja prevalensi stunting pada balita Kota Dumai pada tahun 2023 adalah sebesar 8%, sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar 100%, yang berarti pencapaian indikator prevalensi stunting pada balita sangat tinggi dengan atribut capaian indikator kinerja sangat berhasil.

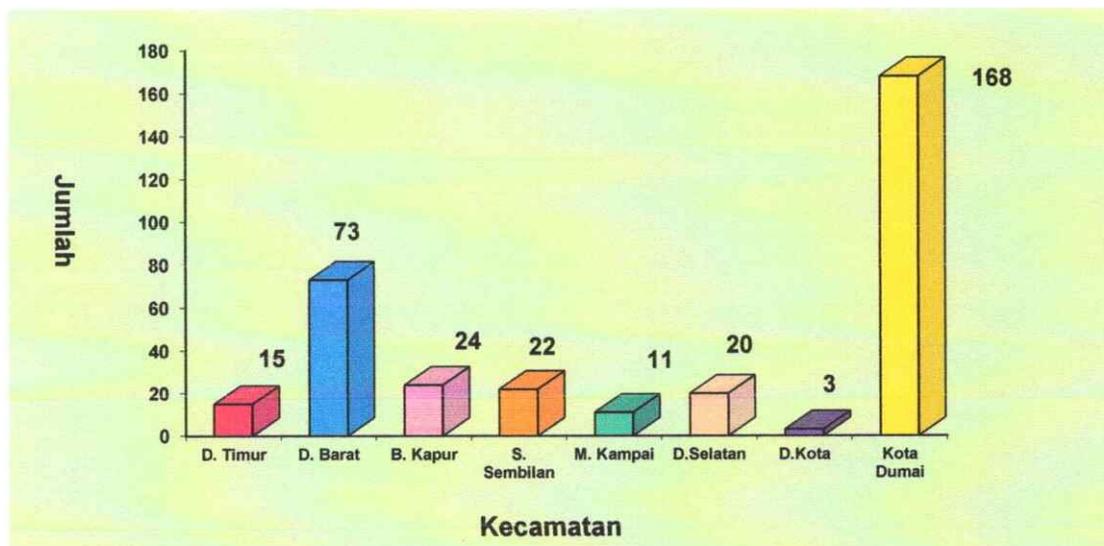
Pencapaian prevalensi stunting pada balita Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023 menunjukkan fluktuasi dan cenderung meningkat seperti terlihat pada grafik 2.21 berikut ini:

Grafik 2.21
Pencapaian Prevalensi Stunting Pada Balita
Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2023



Berdasarkan kecamatan, kasus balita stunting banyak ditemukan di Kecamatan Dumai Barat sebanyak 73 kasus (43.45%) disusul dengan Kecamatan Bukit Kapur sebanyak 24 kasus (14.29%), dan Kecamatan Sungai Sembilan sebanyak 22 kasus (13.10%) seperti terlihat pada grafik 2.22 berikut ini:

Grafik 2.22
Jumlah Kasus Balita Stunting Berdasarkan Kecamatan
Di Kota Dumai Tahun 2023



Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat

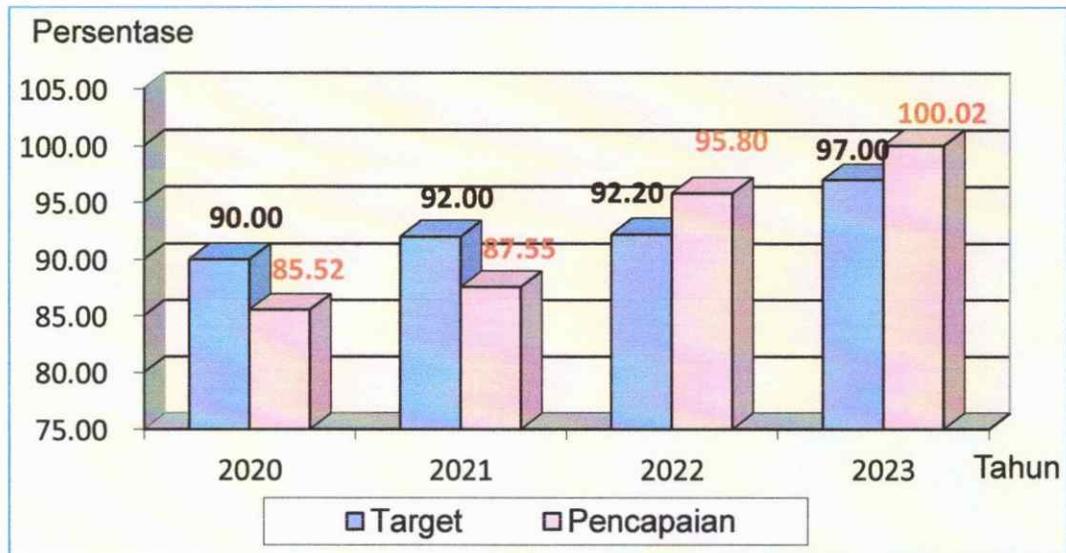
2.1 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai.

Selain merupakan salah satu indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Dumai, indikator Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional juga merupakan salah satu indikator “Sustainable Development Goal’s” (SDG’s). Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berupa jaminan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Peserta JKN terdiri dari:

- Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN : Masyarakat miskin dan tidak mampu yang iurannya dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui APBN
- Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD : Peserta JKN yang iurannya dibiayai oleh Pemerintah Daerah melalui APBD.
- Pekerja Penerima Upah (PPU) : Peserta JKN yang terdiri dari PNS, TNI/ POLRI, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang iurannya dibiayai oleh pemberi kerja dan peserta yang bersangkutan.
- Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/Mandiri : Peserta JKN yang bekerja mandiri dan iurannya dibiayai oleh peserta yang bersangkutan.
- Bukan Pekerja (BP) : Peserta JKN yang terdiri dari investor, pemberi pajak, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan dan bukan pekerja lainnya yang iurannya dibiayai oleh peserta yang bersangkutan.

Sampai dengan tahun 2023 jumlah penduduk Kota Dumai yang telah mempunyai jaminan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS baik itu sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI APBN dan PBI APBD) ada sebanyak 213.513 orang, dan Non PBI (pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah/mandiri dan bukan pekerja) ada sebanyak 124.618 orang, sehingga total peserta Jaminan Kesehatan Kota Dumai ada sebanyak 338.131 dari 338.064 orang penduduk Kota Dumai berdasarkan Data Agregat Kependudukan (DAK) semester I Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai. Dengan demikian pencapaian cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kota Dumai sebesar 100.02%. Target kinerja persentase Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai pada tahun 2023 sebesar 97%, sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar 100%, yang berarti pencapaian indikator cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) di Kota Dumai sangat tinggi dengan atribut capaian indikator kinerja sangat berhasil.

Grafik 2.23 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kota Dumai Tahun 2020 – 2023



Tabel 2.8
Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk
Menurut Jenis Kepesertaan Kota Dumai Tahun 2020 – 2023

No	Jenis Kepesertaan	Peserta Jaminan Kesehatan			
		2020	2021	2022	2023
Penerima Bantuan Iuran (PBI)					
1	PBI APBN	74,766	75,857	85.175	103.498
2	PBI APBD	84,057	89,238	108.456	110.015
Sub Jumlah PBI		158,823	165,095	193.631	213.513
Non PBI					
1	Pekerja Penerima Upah (PPU)	82,728	86,623	94.250	97.128
2	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri	26,429	26,350	26.479	22.846
3	Bukan Pekerja (BP)	702	3,188	3.159	4.644
Sub Jumlah Non PBI		109,859	116,161	123.888	124.618
Total Peserta Kota Dumai		268,682	281,256	317.519	338.131
Jumlah Penduduk Kota Dumai		314,166	321,238	331.445	338.064
% JKN di Kota Dumai		85.52	87.55	95.80	100.02
% JKN PBI		50.55	51.39	58.42	63.16

Berdasarkan jenis kepesertaan JKN, terlihat peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 63.14% lebih banyak jumlahnya daripada Non PBI (36.86%). Hal ini menunjukkan beban Pemerintah pusat maupun pemerintah Kota Dumai masih besar dalam menyediakan jaminan kesehatan bagi masyarakat.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2022 dimana jumlah penduduk Kota Dumai yang telah mempunyai jaminan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 317.519 orang atau sebesar 95.80%, maka jumlah penduduk Kota Dumai yang telah mempunyai jaminan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengalami peningkatan pada tahun 2023. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai yakni sebesar 97%, maka angka tersebut telah mencapai target Kota Dumai. Pada tahun 2022, BPJS Indonesia telah menetapkan target bahwa kabupaten/kota dinyatakan mencapai Universal Health Coverage (UHC) apabila persentase penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 95%. Dengan pencapaian UHC Kota Dumai tersebut, berarti Kota Dumai sudah mencapai UHC.

Dinas Kesehatan Kota Dumai telah menetapkan kebijakan untuk lebih memfokuskan perhatian pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat dengan persyaratan peserta mau dirawat di kelas III terutama penduduk miskin dan tidak mampu. Dasar pemikirannya adalah bukan saja memenuhi kewajiban pemerintah tetapi juga berdasarkan kajian dan pengalaman bahwa akan terjadi percepatan perbaikan indikator kesehatan apabila lebih memperhatikan dan fokus pada pelayanan kesehatan masyarakat.

Pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin dan tidak mampu yang mendapatkan akses pelayanan kesehatan gratis melalui kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baik sebagai peserta PBI APBN (KIS) sebanyak 103.498 orang atau sebesar 30.61% dan peserta PBI APBD sebanyak 110.015 orang atau sebesar 32.54%, sehingga total penduduk miskin dan tidak mampu yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis (menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran/PBI) sebanyak 213.513 orang. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai pada tahun 2023 yakni sebanyak 188.500 orang, maka telah terealisasi sebesar 113.27% yang artinya telah melebihi target. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022 dimana jumlah penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis (menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran/PBI) sebanyak 193.631 orang, maka jumlah penduduk miskin dan tidak mampu yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut sebagai dampak dari pandemi COVID 19 dimana penduduk yang sebelumnya menjadi peserta BPJS secara mandiri (PBPU), karena kehilangan mata pencahariannya menjadi tidak mampu membayar iuran bulanan BPJS yang mengakibatkan banyak peserta BPJS PBPU menunggak. Dengan kebijakan Walikota Dumai yakni mengalihkan kepesertaan peserta BPJS dari PBPU menjadi PBI baik PBI APBN maupun PBI APBD, sehingga terjadi peningkatan kepesertaan JKN PBI pada tahun 2023.

Sesuai metadata indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Pilar Pembangunan Sosial (Bappenas, 2017) proporsi penduduk miskin dan tidak mampu dari total penduduk adalah sebesar 40% yang dibayar oleh pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan. Sejak tahun 2017 pencapaian persentase kepesertaan JKN PBI Kota Dumai sudah melebihi 40% dan angka tersebut terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2023 persentase kepesertaan JKN PBI Kota Dumai mencapai angka 63.16% yang artinya sudah melampaui target Nasional.

2.2.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Sebagai suatu kebutuhan dasar, setiap individu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang – orang yang menjadi tanggung jawabnya. Sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung jawab setiap warganegara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2016 tentang Stándar Pelayanan Minimal dan Nomor 4 tahun 2019 tentang Stándar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warganegara.

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan (SPM) Dinas Kesehatan Kota Dumai

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian			Proyeksi	
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Pelayanan Kesehatan ibu Hamil	SPM	IKK	SDG's Renstra Kes	100%	100%	100%	100%	88.53%	90.48	90.59	100%	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	SPM	-	Renstra Kes	100%	100%	100%	100%	92.57%	90.36	90.88	100%	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	SPM	IKK	Renstra Kes	100%	100%	100%	100%	90.86%	92.74	93.67	100%	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	SPM	IKK	Renstra Kes	100%	100%	100%	100%	41.82%	88.71	84.96	100%	100%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	SPM	-	Renstra Kes	100%	100%	100%	100%	48.32%	86.65	75.16	100%	100%
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	SPM	-	Renstra Kes	100%	100%	100%	100%	56.38%	81.77	93.95	100%	100%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	SPM	-	Renstra Kes	100%	100%	100%	100%	66.74%	85.94	93.66	100%	100%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	SPM	-	Renstra Kes	100%	100%	100%	100%	18.03%	46.93	52.89	100%	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	SPM	-	Renstra Kes	100%	100%	100%	100%	100%	94.66	97.83	100%	100%
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat	SPM	-	Renstra Kes	100%	100%	100%	100%	88.38%	97.57	100.00	100%	100%
11	Pelayanan Kesehatan orang dengan Terduga Tuberkulosis	SPM	-	Renstra Kes	100%	100%	100%	100%	59.56%	100.00	100.00	100%	100%
12	Pelayanan Kesehatan orang beseriko terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	SPM	-	Renstra Kes	100%	100%	100%	100%	40.52%	79.35	100.00	100%	100%

Kinerja program kesehatan dituangkan dalam target – target SPM. Pencapaian target SPM bidang kesehatan merupakan kinerja Pemerintah Daerah. Pencapaian SPM bidang kesehatan Kota Dumai mulai tahun 2020 s/d 2023 sebagai berikut:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

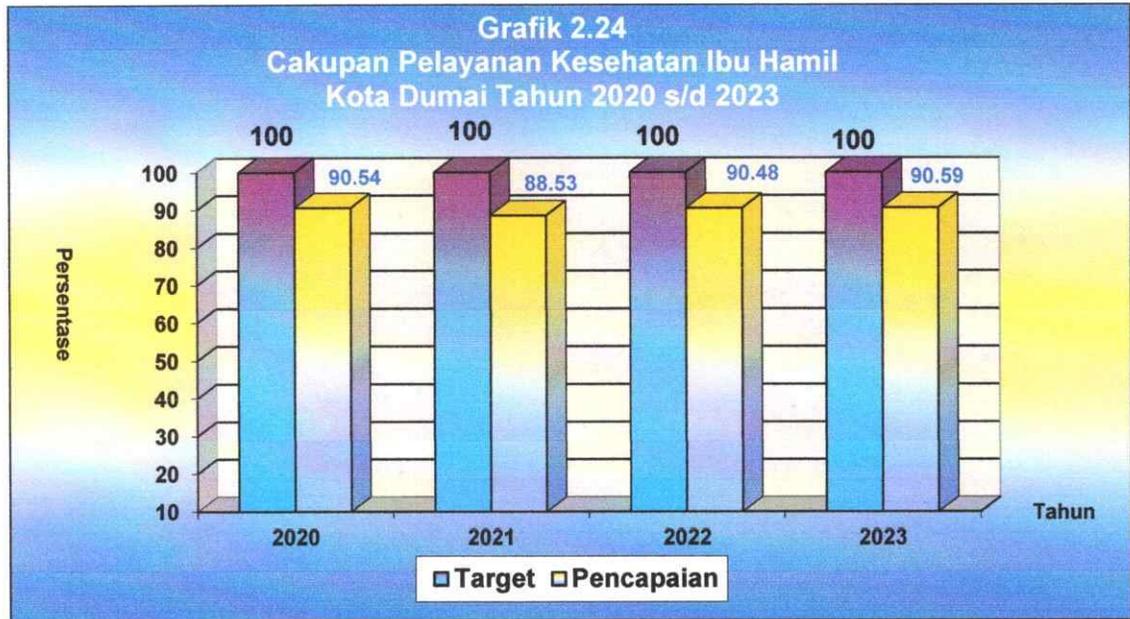
Pelayanan kesehatan pada ibu hamil meliputi pelayanan antenatal merupakan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan untuk ibu selama masa kehamilannya, dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan antenatal yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Kebidanan (SPK). Sedangkan tenaga kesehatan yang berkompeten memberikan pelayanan antenatal kepada ibu hamil antara lain dokter spesialis kebidanan, dokter, bidan dan perawat.

Pelayanan antenatal yang sesuai standar meliputi “10 T” timbang berat badan, pengukuran tinggi badan, tekanan darah, nilai status gizi (ukur lingkaran lengan atas), tinggi fundus uteri (puncak rahim), menentukan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ), skrining status imunisasi tetanus dan memberikan imunisasi Tetanus diphteri (Td) bila diperlukan, pemberian tablet zat besi minimal 90 tablet selama kehamilan, test laboratorium (rutin dan khusus), tatalaksana kasus, serta temu wicara (konseling), termasuk Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), serta KB pasca persalinan.

Hasil pencapaian program pelayanan kesehatan ibu dapat dinilai dengan menggunakan indikator cakupan K1 dan K4 yang dihitung dengan membagi jumlah ibu hamil yang melakukan pemeriksaan antenatal pertama kali oleh tenaga kesehatan (untuk penghitungan indikator K1) atau jumlah ibu hamil yang melakukan pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali sesuai standar oleh tenaga kesehatan di satu wilayah pada kurun waktu tertentu (untuk penghitungan indikator K4) dengan jumlah sasaran ibu hamil yang ada di wilayah kerja dalam 1 tahun.

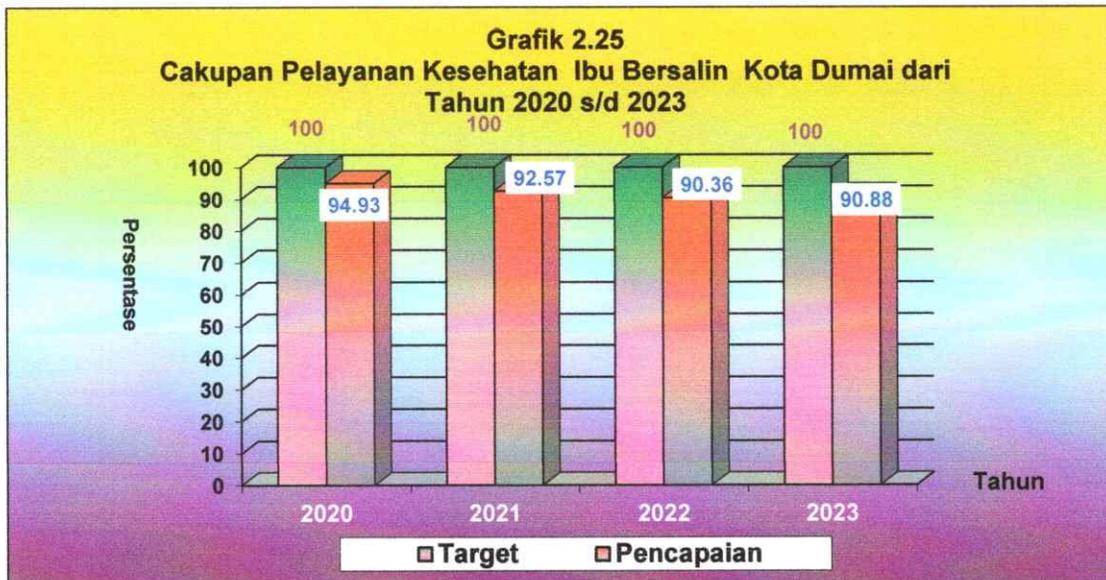
Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil di Kota Dumai dari tahun 2020 s/d 2023 berfluktuasi cenderung meningkat namun belum mencapai target 100%. Hal ini disebabkan masih ada ibu hamil yang tidak mau ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk memeriksakan kehamilan. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil di Kota Dumai dari tahun 2020 s/d 2023 seperti

terlihat pada grafik berikut ini.



2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Pemerintah daerah bertanggung jawab memberikan pelayanan kesehatan standar kepada ibu bersalin di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan pada ibu bersalin meliputi persalinan normal, persalinan komplikasi. Standar persalinan normal yang dilakukan dengan Acuan Persalinan Normal (APN) yang dilakukan, sedangkan persalinan komplikasi mengacu pada buku saku pelayanan kesehatan ibu di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.



Dari grafik di atas terlihat perkembangan cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin tahun 2020 s.d 2022 cenderung mengalami penurunan, sedangkan pada tahun 2023 kembali meningkat tetapi belum mencapai target 100%. Hal ini disebabkan masih ada ibu bersalin yang tidak mau ke fasilitas pelayanan kesehatan dan adanya mobilitas ibu bersalin karena faktor budaya dimana ibu melakukan persalinan di tempat orang tuanya berada (luar wilayah Kota Dumai) sehingga tidak tercatat di MPDN/e-kohort (tidak dilaporkan) baik di fasilitas kesehatan maupun sesuai alamat wilayah kerja.

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Setiap bayi memperoleh pelayanan kesehatan minimal 4 kali dalam setahun, yaitu satu kali pada umur 29 hari–3 bulan, 1 kali pada umur 3-6 bulan, 1 kali pada umur 6-9 bulan, dan 1 kali pada umur 9-11 bulan. Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/HB1-3, Polio 1-4, dan Campak), stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK), manajemen program KIA dalam melindungi bayi sehingga kesehatannya terjamin melalui penyediaan pelayanan kesehatan. Perkembangan cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir di Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023 berfluktuasi dan cenderung meningkat, belum mencapai target 100%. Hal ini disebabkan kegiatan posyandu belum berjalan secara optimal dan masih ada orang tua yang tidak mau membawa bayinya ke fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu, adanya mobilitas ibu bersalin karena faktor budaya dimana ibu melakukan persalinan di tempat orang tuanya berada (luar wilayah Kota Dumai) sehingga pelayanan kesehatan bayi lahir tidak tercatat di e-kohort (tidak dilaporkan) baik di fasilitas kesehatan maupun sesuai alamat wilayah kerja.

Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir di Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023 seperti terlihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.26
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Kota Dumai Dari Tahun 2020 s/d 2023

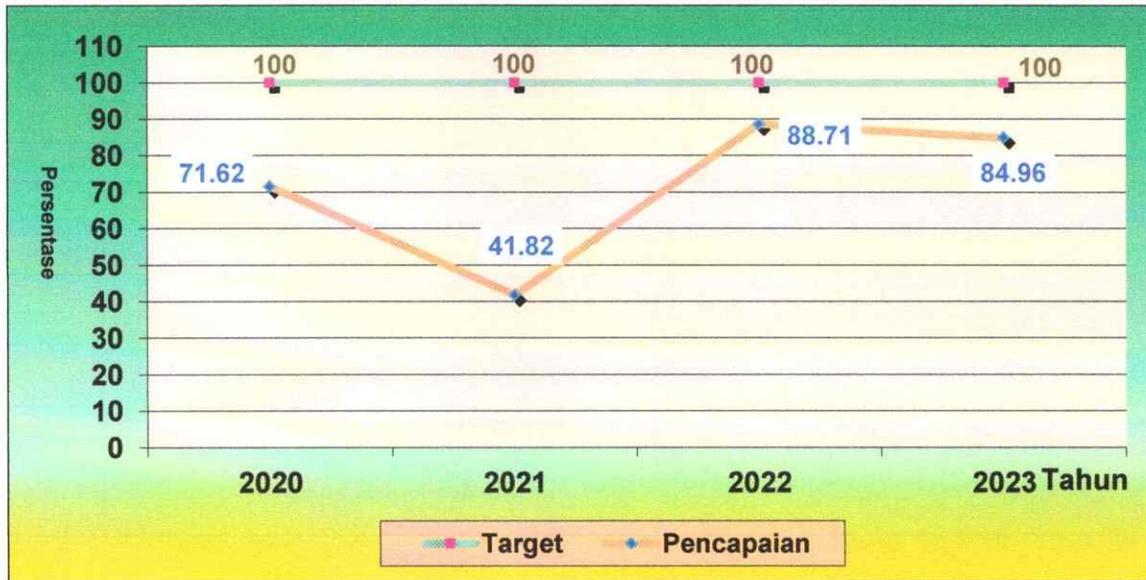


4. Pelayanan Kesehatan Balita

Pelayanan kesehatan balita adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS). Setiap balita (0-59 bulan) memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang meliputi pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali dalam setahun, pemantauan perkembangan minimal 2 kali setahun, pemberian kapsul Vitamin A, pemberian imunisasi dasar lengkap, penimbangan minimal 8 kali dalam setahun yang dilaksanakan melalui pelayanan SDIDTK oleh tenaga kesehatan, ahli gizi, penyuluh kesehatan masyarakat dan petugas sektor lain yang dalam menjalankan tugasnya melakukan stimulasi dan deteksi dini penyimpangan tumbuh kembang anak.

Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan balita di Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023 berfluktuasi, belum mencapai target 100%. Hal ini disebabkan kegiatan pemantauan deteksi dini tumbuh kembang anak balita melalui pemantauan pertumbuhan balita di posyandu belum terlaksana secara optimal dan masih adanya orang tua yang tidak mau membawa balitanya ke fasilitas pelayanan kesehatan. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan balita di Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023 seperti terlihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.27
Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita
Kota Dumai Dari Tahun 2020 s/d 2023



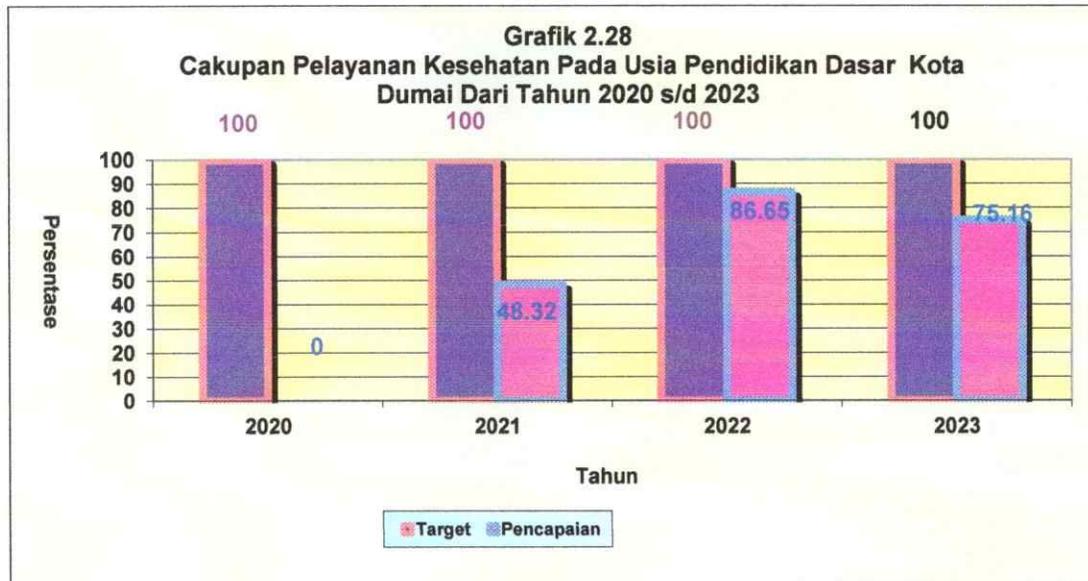
5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Setiap anak pada usia pendidikan dasar usia 7 tahun – 15 tahun. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar meliputi skrining kesehatan dan tindak lanjut hasil skrining kesehatan dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun di luar sekolah.

Pelaksanaan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dilaksanakan di satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) dan luar satuan pendidikan dasar (pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LKPA) dan lainnya meliputi penilaian status gizi, penilaian tanda vital, penilaian kesehatan gigi dan mulut, penilaian ketajaman indera. Tindak lanjut hasil skrining kesehatan meliputi memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan, melakukan rujukan bila diperlukan, memberikan penyuluhan kesehatan.

Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar di kota Dumai tahun 2020 – 2022 cenderung meningkat namun pada tahun 2023 mengalami penurunan. Penjaringan anak sekolah untuk siswa baru sudah dilaksanakan oleh seluruh puskesmas, namun ada beberapa puskesmas yang tidak melakukan penjaringan berkala karena sibuk mempersiapkan akreditasi puskesmas. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan

dasar di Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini.



6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Setiap warganegara usia 15 tahun – 59 tahun berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai estandar. Pemerintah memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi, dan skrining kesehatan. Pelayanan kesehatan pada usia produktif meliputi skrining faktor resiko penyakit menular dan tidak menular, edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana. Pelayanan edukasi pada usia produktif dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan dan/ atau UKBM.

Pelaksanaan skrining kesehatan pada usia produktif adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun meliputi pengukuran tinggi, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, anamnesa perilaku beresiko. Wanita usia 30 – 50 tahun yang sudah menikah atau mempunyai riwayat berhubungan seksual beresiko dilakukan pemeriksaan SADANIS dan IVA test. Tindak lanjut skring meliputi melakukan rujukan jika diperlukan dan melakukan penyuluhan kesehatan.

Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif di Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023 cenderung meningkat namun belum mencapai 100%. Hal ini disebabkan kegiatan pelayanan kesehatan usia produktif di posbindu belum terlaksana secara optimal dan masih adanya penduduk usia produktif yang tidak mau memeriksakan kesehatannya ke fasilitas pelayanan

kesehatan. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif di Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.29
Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
Kota Dumai Tahun 2020 – 2023



7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Pelayanan kesehatan standar pada usia lanjut dilakukan pada penduduk usia 60 tahun keatas. Pemerintah memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi, dan skrining kesehatan. Pelayanan kesehatan pada usia produktif meliputi skrining usia lanjut.

Pelaksanaan skrining kesehatan pada usia lanjut adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun meliputi pengukuran tinggi, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan gangguan mental, pemeriksaan gangguan kognitif, pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut, anamnesa perilaku beresiko. Tindak lanjut skrining meliputi melakukan rujukan jika diperlukan dan melakukan penyuluhan kesehatan.

Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut di Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023 cenderung meningkat namun belum mencapai 100%. Hal ini disebabkan kegiatan pelayanan kesehatan pada usia lanjut di posyandu lansia belum terlaksana secara optimal dan masih ada penduduk usia lanjut yang tidak mau memeriksakan kesehatannya ke fasilitas

pelayanan kesehatan. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut di Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.30
Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
Kota Dumai Tahun 2020 – 2023



8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Selain penyakit menular yang masih merupakan masalah utama kesehatan di Kota Dumai, penyakit tidak menular seperti penyakit degeneratif menunjukkan kecenderungan meningkat dan juga menjadi permasalahan di Kota Dumai seperti penyakit Hipertensi. Hal tersebut menunjukkan telah terjadi transisi epidemiologi yakni perubahan pola penyakit dan kematian yang ditandai dengan beralihnya penyebab penyakit dan kematian yang semula didominasi oleh penyakit infeksi/menular bergeser ke penyakit non infeksi/menular. Perubahan pola penyakit tersebut sangat dipengaruhi oleh keadaan demografi, sosial ekonomi, dan sosial budaya seperti meningkatnya umur harapan hidup, adanya kondisi lingkungan yang merugikan kesehatan seperti pencemaran udara dan rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat serta makin tingginya paparan faktor resiko seperti merokok, pola aktifitas fisik (kurang olah raga), pola makan yang tinggi lemak dan rendah serat.

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun keatas. Pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi pengukuran tekanan darah yang dilakukan

minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan. Edukasi perubahan gaya hidup dan/ atau kepatuhan minum obat, melakukan rujukan jika diperlukan. Diagnosa Hipertensi ditegakkan jika Tekanan Darah Sewaktu (TDS) lebih dari 140 mmHg, pelayanan yang dilakukan dengan terapi farmakologi.

Perkembangan cakupan pelayanan penderita hipertensi di Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023 berfluktuasi dan cenderung meningkat namun belum mencapai 100%. Hal ini disebabkan pelayanan kesehatan hipertensi di posbindu dan posyandu lansia belum terlaksana secara optimal. Disamping itu kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya dan masih adanya penduduk yang tidak mau memeriksakan kesehatannya ke fasilitas pelayanan kesehatan. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi di Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.31
Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Kota Dumai Tahun 2020 – 2023



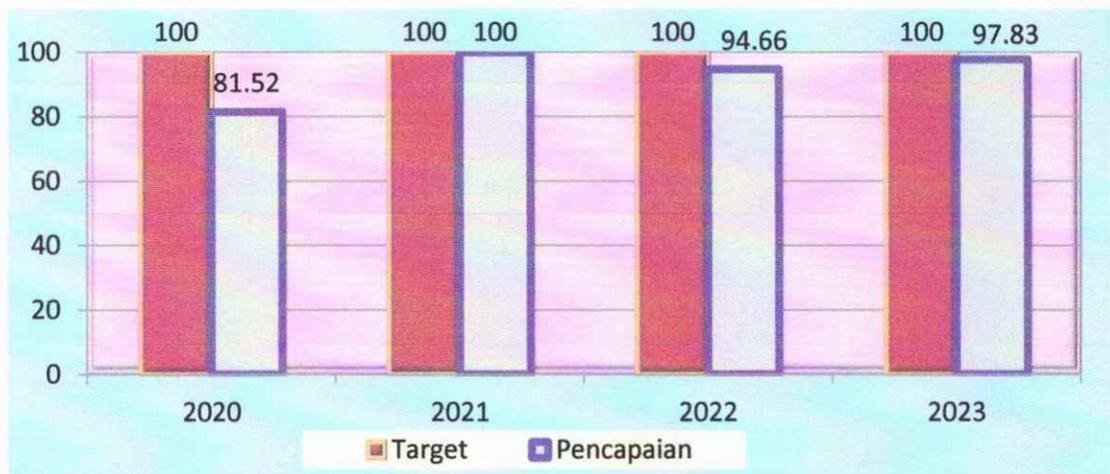
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai stándar kepada seluruh penderita Diabetes Mellitus (DM) usia 15 tahun keatas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun . Pelayanan kesehatan sesuai stándar meliputi pengukuran gula darah yang dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan. Edukasi perubahan gaya hidup dan/ atau nutrisi, melakukan rujukan jika diperlukan. Diagnosa DM ditegakkan jika Gula

Darah Sewaktu (GDS) lebih dari 200 mg/dl, pelayanan yang dilakukan dengan terapi farmakologi.

Perkembangan cakupan pelayanan penderita Diabetes Mellitus di Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023 berfluktuasi dan belum mencapai 100%. Hal ini disebabkan kegiatan pelayanan kesehatan Diabetes Mellitus di posbindu dan posyandu lansia belum terlaksana secara optimal. Disamping itu kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya dan masih adanya penduduk yang tidak mau memeriksakan kesehatannya ke fasilitas pelayanan kesehatan. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus di Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.32
Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Kota Dumai Tahun 2020 – 2023



10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar oleh Pemerintah sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan skizoprenia meliputi pemeriksaan kesehatan jiwa diantaranya pemeriksaan status mental, wawancara, edukasi kepatuhan minum obat, melakukan rujukan jika diperlukan.

Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat di Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023 cenderung meningkat dan sudah mencapai 100% pada tahun 2023. Namun demikian masih

ada stigma di masyarakat, sehingga keluarga pasien malu atau enggan untuk membawa keluarganya dengan gangguan jiwa ke fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tantangan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat di Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.33
Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa
Kota Dumai Tahun 2020 – 2023



10. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Untuk penanggulangan Tuberkulosis Pemerintah memberikan otoritas terhadap kabupaten/kota. Dalam penanggulangan tuberkulosis, WHO telah menetapkan strategi, yang merupakan strategi cost-efektif yaitu strategi DOTS (Directly Observed Treatment Shortcourse) yang artinya pengobatan jangka pendek dengan pengawasan minum obat langsung yang memberikan angka kesembuhan yang tinggi.

Setiap orang terduga Tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pelayanan orang terduga TBC meliputi pemeriksaan klinis dilakukan minimal 1 kali dalam setahun berupa pemeriksaan gejala dan tanda, pemeriksaan penunjang dengan pemeriksaan dahak secara bakteriologis dan/ atau radiologis, edukasi perilaku beresiko dan pencegahan penularan, melakukan rujukan jika diperlukan.

Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis di Kota Dumai tahun 2020 sampai dengan 2023 cenderung meningkat, bahkan

pada tahun 2022 dan 2023 pencapaiannya sudah mencapai 100%. Hal tersebut karena kondisi dan situasi di masyarakat mulai berangsur normal setelah adanya pandemi COVID 19, sehingga masyarakat sudah mau berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk memeriksakan kesehatan dirinya. Selain itu, petugas TB puskesmas sudah dapat melaksanakan kegiatan turun kontak serumah dan melakukan skrining massal dengan tetap mengatur jaga jarak dan melaksanakan protokol kesehatan. Lebih lanjut, puskesmas bekerja sama dan melakukan koordinasi dengan LSM PKBI dalam melakukan penjarangan TB dan investigasi kontak dengan terjun langsung ke masyarakat di tempat-tempat yang beresiko tinggi dengan TB. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis di Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini.



11. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)

Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan kesehatan sesuai stándar oleh pemerintah daerah. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV meliputi skrining dengan tes cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun pada orang dengan risiko terinfeksi HIV pada ibu hamil, pasien TBC, pasien IMS, penaja seks, lelaki yang bergubungan seks dengan lelaki (LSL), transgender/waria, pengguna napza suntik (penasun), warga binaan pemyarakatan (WBP), pelayanan edukasi perilaku berisiko dan pencegahan

penularan, melakukan rujukan jika diperlukan .

Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV di kota Dumai tahun 2020 sampai dengan 2023 cenderung meningkat dan sudah mencapai 100% pada tahun 2023. Namun demikian masih berkembangnya stigma dan diskriminasi bagi penderita HIV merupakan tantangan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan orang terinfeksi HIV di Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini.



2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Dumai

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Kesehatan Kota Dumai tidak terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Perumusan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Dumai, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan, dan tantangan yang harus diminimalisir dampaknya dalam pelaksanaan pencapaian program.

Isu strategis terkait dengan urusan kesehatan yang perlu ditangani sebagai berikut:

1. Akses terhadap pelayanan kesehatan belum merata di seluruh Kota Dumai, terutama di wilayah kerja puskesmas yang memiliki daerah sulit dijangkau karena kondisi geografis, terbatasnya transportasi dan infrastruktur (jalan, jembatan dan listrik) seperti wilayah kerja Puskesmas Sungai Sembilan, Bukit Kapur, Bukit Kayu Kapur dan Medang Kampai.
2. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan serta pelayanan medis yang bermutu dan merata di setiap puskesmas. Sarana dan prasarana kesehatan yang ada belum memenuhi standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
3. Pelayanan kesehatan ibu dan anak belum optimal yang ditunjukkan dengan pencapaian Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita dan Kematian Ibu yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
4. Adanya tripple burden penyakit akibat adanya transisi epidemiologi penyakit yang signifikan dimana penyakit tidak menular telah menjadi beban utama, meskipun beban penyakit menular masih berat juga seperti Malaria, TB Paru, HIV/AIDS dan DBD.
5. Masih belum terkendalinya status gizi balita dimana jumlah kasus balita dengan gizi kurang mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan masih ditemukannya kasus balita dengan gizi buruk dan kasus balita stunting.
6. Penggunaan Obat Rasional dan Pengawasan Obat dan Makanan belum optimal.
7. Masih rendahnya peran serta aktif masyarakat (PHBS) dalam pembangunan kesehatan.

8. Masih belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM kesehatan sesuai kompetensi serta ketersediaan SDM Kesehatan belum sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

Adapun permasalahan yang masih dijumpai dalam pelaksanaan kinerja dinas Kesehatan Kota Dumai pada tahun 2023 antara lain adalah :

1. Meskipun pencapaian kinerja Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita masih dibawah target Kota Dumai, namun kecenderungan kasus kematian bayi dan kematian balita menunjukkan peningkatan di Kota Dumai. Demikian juga kasus kematian ibu menunjukkan peningkatan bahkan telah melebihi target Kota Dumai. Kematian bayi dan kematian ibu sangat erat keterkaitannya. Sebagian besar kematian bayi diakibatkan kelainan pada kehamilan, lahir prematur dan berat badan lahir rendah, pada saat persalinan, maupun di minggu pertama kehidupan (akibat gangguan pernafasan, infeksi, kongenital, dan lainnya). Hal ini mengindikasikan belum optimalnya kualitas pelayanan maternal dan neonatal sebagai dampak pandemi COVID 19, dimana masih ada ibu-ibu yang tidak mau memeriksakan kehamilannya ke fasilitas pelayanan kesehatan atau ke praktek bidan karena takut tertular COVID 19. Isu “tiga terlambat” masih menjadi masalah utama layanan kesehatan maternal, yaitu terlambat mengambil keputusan, terlambat sampai ke tempat rujukan, dan terlambat mendapat pelayanan yang dibutuhkan di fasilitas kesehatan.
2. Kota Dumai masih menjadi daerah rawan terjadinya penularan penyakit DBD dan Malaria, karena kota Dumai merupakan daerah dengan mobilisasi penduduk yang sangat tinggi dan daerah endemis DBD dan Malaria. Hal tersebut didukung oleh kondisi kesehatan lingkungan dan sosial budaya penduduk kota Dumai dimana ± 80% penduduk Kota Dumai dalam memenuhi kebutuhan air bersih menggunakan bak penampungan air yang potensial sebagai tempat berkembangbiaknya nyamuk vektor Demam Berdarah. Kondisi ini menjadikan Kota Dumai sebagai daerah endemis penyakit Demam Berdarah dan Malaria dan bila tidak dilakukan upaya-upaya secara intensif dapat terjadi peningkatan kasus dan potensial menimbulkan KLB.
3. HIV-AIDS merupakan fenomena gunung es, artinya kasus yang ditemukan saat ini hanya sebagian kecil, belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya karena masih adanya stigma dan diskriminasi terhadap HIV-AIDS di masyarakat. Sejak

tahun 2006 s/d 2018 Dinas Kesehatan secara kontinyu melakukan surveilans secara aktif melalui layanan VCT (*Voluntary Counseling Testing*)/konseling testing sukarela yang ada di 10 (sepuluh) Puskesmas di Kota Dumai, 1 KKP (Kantor kesehatan pelabuhan) dan RSUD Kota Dumai untuk melakukan penjangkauan dan pemeriksaan/tes HIV secara sukarela baik secara mobile maupun statis di masyarakat. Namun sejak tahun 2019 sampai tahun 2022 kegiatan tersebut sempat vakum karena tidak aktifnya lagi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) akibat tidak adanya dukungan dana dari Global Fund. Pada tahun 2023 melalui dana Hibah, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) mulai kembali aktif. Namun karena keterbatasan anggaran, pelaksanaan kegiatan di Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) belum optimal, bahkan ada kegiatan yang tetap dilaksanakan meskipun tidak ada anggaran. Selain itu petugas kesehatan dan KPA sering mengalami kesulitan dalam melakukan pemeriksaan kesehatan (skrining) HIV pada hotspot tempat-tempat hiburan seperti karaoke, hotel/penginapan, panti pijat dan tempat hiburan malam lainnya.

4. Permasalahan penduduk pendatang atau illegal merupakan permasalahan terbesar dalam pelaksanaan program kesehatan di Kota Dumai. Apabila permasalahan penduduk pendatang atau illegal ini tidak ditangani secara serius oleh Pemerintah Kota Dumai, maka dapat berdampak pada kegagalan pencapaian pelaksanaan program kesehatan yang diukur melalui indikator Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, Angka Kematian Ibu, serta persentase balita dengan gizi buruk dan gizi kurang. Pada umumnya permasalahan kesehatan yang ada banyak merupakan kontribusi dari penduduk pendatang (illegal) tersebut karena mereka jarang mengakses pelayanan kesehatan dasar karena status mereka yang illegal yang otomatis tidak mempunyai kartu identitas seperti KTP. Berdasarkan data dari puskesmas, selama tahun 2023 ada sebanyak 736 orang bukan penduduk Kota Dumai yang mengakses pelayanan kesehatan dasar di puskesmas atau sebesar 0.25% dari total kunjungan rawat jalan puskesmas. Angka tersebut turun dibandingkan dengan tahun 2022 dimana ada sebanyak 1.479 orang bukan penduduk Kota Dumai yang mengakses pelayanan kesehatan dasar di puskesmas. Penduduk pendatang tersebut terbanyak berdomisili di Kecamatan Dumai Selatan (203 orang), Kecamatan Dumai Kota (140 orang), dan Kecamatan Dumai Timur (110 orang).

Rekomendasi atas permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan kinerja Dinas Kesehatan Kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Penyebab kematian bayi dapat dicegah dengan meningkatkan kualitas pelayanan pemeriksaan kehamilan salah satunya dengan meningkatkan cakupan kunjungan enam kali pemeriksaan kehamilan (K6) di fasilitas kesehatan. Penyebab kematian ibu sebagian besar dapat dicegah (seperti hipertensi dalam kehamilan, perdarahan, komplikasi, dan infeksi) apabila cakupan pelayanan disertai mutu pelayanan yang baik. Disamping itu perlu penguatan edukasi ke masyarakat tentang deteksi ibu hamil resiko tinggi, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan khususnya bidan dalam penanganan kasus ibu hamil dengan resiko tinggi dan komplikasi, peningkatan antenatal care berkualitas dan jaminan kesehatan bagi ibu yang bertujuan untuk menekan angka kematian ibu dan bayi serta penguatan manajemen kesehatan ibu dan anak.
2. Permasalahan DBD baru bisa teratasi apabila tersedianya sarana dan prasarana sanitasi yang layak juga tersedianya sarana air bersih yang layak dan diterapkannya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) oleh seluruh masyarakat. Permasalahan DBD tidak bisa diselesaikan hanya oleh Dinas Kesehatan sendiri, tapi memerlukan kolaborasi dan koordinasi dengan OPD terkait lainnya seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Pemukiman dan Dinas Lingkungan Hidup.
3. Permasalahan HIV/AIDS memerlukan dukungan dari berbagai pihak seperti Kantor Kesehatan Pelabuhan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan pihak swasta (pengusaha karaoke, hotel/penginapan, panti pijat dan tempat hiburan malam lainnya). Sehingga perlu dukungan dari Pemerintah Kota Dumai berupa anggaran dan regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan skrining HIV/AIDS di tempat-tempat hiburan dan hotel/penginapan. Serta, dukungan dari aparat penegak hukum sangat diperlukan agar petugas kesehatan dapat mengakses hotspot dimaksud.
4. Permasalahan penduduk pendatang atau illegal sejak lama belum ada solusinya sampai sekarang. Kolaborasi dan koordinasi antar Dinas terkait yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan pihak kelurahan beserta Rt/Rw dalam mengawasi dan mengontrol penduduk pendatang atau penduduk tanpa KTP sangat diperlukan. Demikian juga dukungan dari aparat penegak hukum untuk melaksanakan razia KTP secara kontinyu sangat diperlukan. Mungkin diperlukan

strategi baru untuk menjangkau penduduk Kota Dumai yang tidak memiliki KTP melalui pelayanan KTP mobile oleh dinas terkait.

2.4 Review Terhadap Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024 telah mempedomani dan selaras dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021-2026 dan dokumen Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026. Dalam prosesnya, penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan RKPD Kota Dumai. Oleh karena itu penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD Kota Dumai, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Kesehatan, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Kesehatan.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024 didasarkan kepada Review Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021-2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Proses penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan dan anggaran dalam perencanaan kinerja disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari setiap bidang yang ada di Dinas Kesehatan. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan didiskusikan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan pada pembahasan Perubahan Renja dengan masing-masing bidang dan UPT di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Dumai guna menyelaraskan Renja Dinas Kesehatan Kota Dumai dengan RKPD Kota Dumai.

Pagu anggaran penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan mengacu pada pagu APBD Dinas Kesehatan Kota Dumai tahun 2024 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun 2024 yakni sebesar Rp 146.531.802.600,- terdiri dari terdiri dari pagu Dinas Kesehatan sebesar Rp 131.447.444.490,- dan

pagu BLUD 10 puskesmas dan BLUD Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A sebesar Rp 15.084.358.110,-.

Berapa hal yang melatarbelakangi adanya perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024 antara lain:

1. Terjadi beberapa kali pergeseran APBD Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024 yang mengakibatkan perubahan pagu APBD Dinas Kesehatan Kota Dumai. Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 4 Tahun 2024 tanggal 29 Februari 2024 terjadi pergeseran kedua APBD Dinas Kesehatan Kota Dumai, dimana ada penambahan anggaran sebesar Rp 80.057.992,560 pada sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Penambahan anggaran tersebut dikarenakan sesuai peraturan yang berlaku untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN pada RSUD Kota Dumai harus berada pada Dinas Kesehatan Kota Dumai karena RSUD Kota Dumai merupakan salah satu UPT Dinas Kesehatan Kota Dumai bersifat khusus, sehingga dilakukan pemindahan anggaran penyediaan gaji dan tunjangan ASN dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD Kota Dumai ke Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kota Dumai. Dengan demikian total anggaran pada sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN bertambah menjadi sebesar Rp 135,155,929,600,-. Selain itu ada pengurangan anggaran sebesar Rp 8,996,406,720,- pada sub kegiatan Pembangunan Puskesmas. Pengurangan anggaran tersebut dikarenakan ada refocusing kegiatan pembangunan Puskesmas Dumai Kota. Dengan demikian total anggaran pada sub kegiatan Pembangunan Puskesmas berkurang menjadi sebesar Rp 2,929,586,538,-. Dengan adanya pergeseran tersebut di atas pagu anggaran Dinas Kesehatan Kota Dumai bertambah menjadi sebesar Rp 202,509,030,330,- (bertambah sebanyak Rp 89,054,399,280,-), sehingga total APBD Dinas Kesehatan Kota Dumai termasuk UPT BLUD bertambah menjadi sebesar Rp 217,593,388,440,-. Kemudian, berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 27 Maret 2024 terjadi pergeseran ketiga APBD Dinas Kesehatan Kota Dumai, dimana ada penambahan anggaran bersumber APBN yakni Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Non Fisik sebesar Rp 15.545.212.444,- terdiri dari penambahan DAK Dinas Kesehatan sebesar Rp 8.749.174.444,- dan penambahan DAK puskesmas sebesar Rp 6.796.038.000,-. Selain itu ada

penambahan anggaran sebesar Rp 375.993.258,- pada sub kegiatan Pembangunan Puskesmas karena ada penambahan BTT untuk pembayaran hutang kegiatan pembangunan Puskesmas Bukit Kayu Kapur sehingga total anggaran pada sub kegiatan Pembangunan Puskesmas bertambah menjadi sebesar Rp 3,529,586,538,-. Dengan adanya pergeseran tersebut di atas total APBD Dinas Kesehatan Kota Dumai bertambah menjadi sebesar Rp 233.514.594.142,- (bertambah sebanyak Rp 15.921.205.702,-), terdiri dari penambahan anggaran Dinas Kesehatan sebesar Rp 9.125.167.702,- dan penambahan anggaran puskesmas sebesar Rp 6.796.038.000,-. Sehingga total anggaran Dinas Kesehatan bertambah menjadi sebesar Rp 211.634.198.032,- dan anggaran BLUD Puskesmas se Kota Dumai dan BLUD Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A bertambah menjadi sebesar sebesar Rp 21.880.396.110,-. Lebih lanjut, pada bulan Mei 2024 terjadi pergeseran kelima APBD Dinas Kesehatan Kota Dumai, dimana ada pengurangan anggaran sebesar Rp 1.539.217.075,- pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Pengurangan anggaran tersebut dikarenakan gaji dan tunjangan ASN RSUD Kota Dumai untuk bulan Januari 2024 sudah terealisasi di RSUD Kota Dumai sehingga tidak bisa dilakukan pemindahan anggaran pada aplikasi SIPD. Dengan adanya pergeseran tersebut di atas total anggaran Dinas Kesehatan Kota Dumai berkurang menjadi sebesar Rp 210.094.980,957,- sehingga total APBD Dinas Kesehatan termasuk UPT BLUD Kota Dumai berkurang menjadi sebesar Rp 231,975,377,067,-

2. Pemberlakuan Kebijakan Pusat tentang Pemetaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2024. Dalam rangka pelaksanaan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024 oleh Pemerintah Daerah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri telah melakukan pemetaan menu DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2024 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI Nomor RI PR.01/A/45113/2023 tanggal 26 September 2023 tentang Informasi Rincian Alokasi per menu Dana Alokasi Khusus (DAK) Non

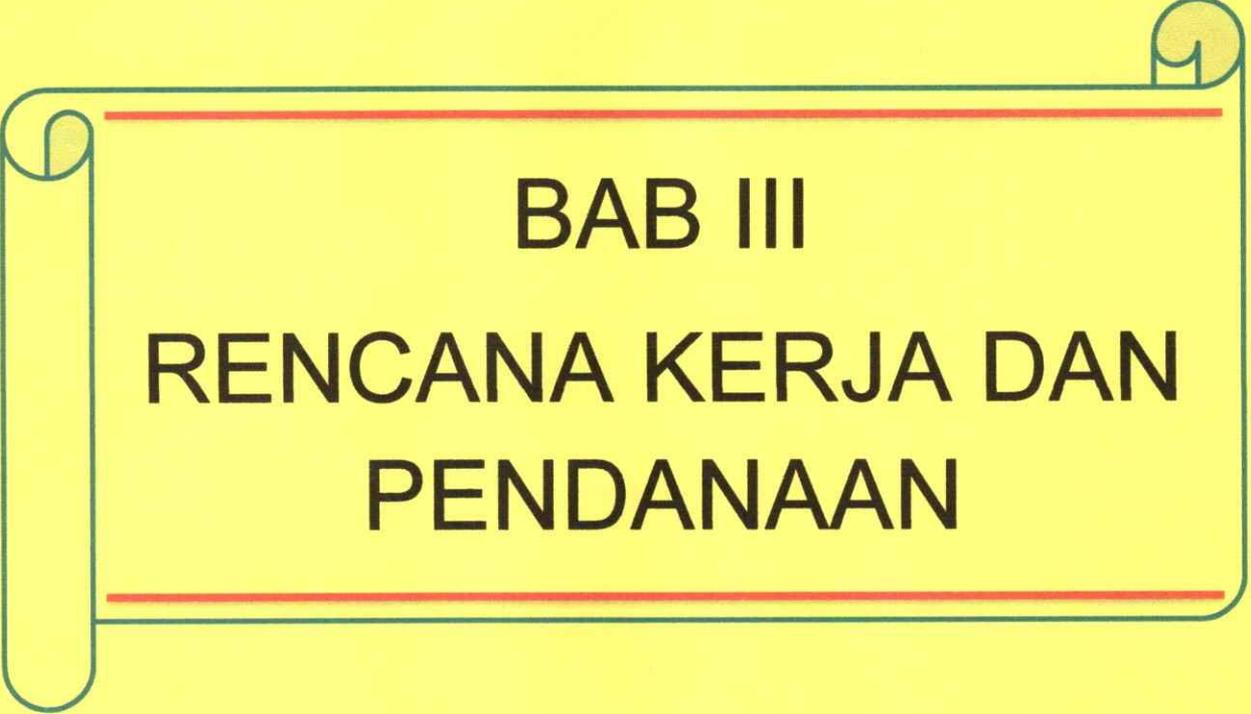
Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024, ada 22 sub kegiatan hasil Pemetaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2024 yang dijadikan acuan dalam penyusunan penganggaran kegiatan bersumber DAK Non Fisik Bidang Kesehatan dalam APBD Tahun 2024. Seluruh sub kegiatan hasil Pemetaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik tersebut sudah ada pemetaannya pada Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021-2026. Namun ada sebanyak 8 sub kegiatan yang belum terpetakan pada Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024. Sub kegiatan yang belum terpetakan tersebut antara lain: 1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA, 2) Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional, 3) Operasional Pelayanan Puskesmas, 4) Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya, 5) Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal), 6) Pengelolaan Upaya Kesehatan Reproduksi, 7) Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak dan 8) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota. Agar DAK Non Fisik tersebut bisa disalurkan ke daerah, maka daerah harus memunculkan sub kegiatan baru tersebut pada dokumen rencana kerja (renja) perangkat daerah.

3. Adanya penambahan anggaran belanja BLUD puskesmas karena adanya penambahan pendapatan BLUD puskesmas sehubungan dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dan penambahan kapitasi peserta BPJS serta adanya penggunaan SILVA BLUD (Puskesmas Dumai Barat, Puskesmas Bukit Kapur, Puskesmas Bumi Ayu, Puskesmas Jaya Mukti dan Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A).
4. Adanya belanja kebutuhan rutin yang masih kurang seperti Gaji Tenaga P3K sebanyak 495 orang terdiri dari tenaga P3K Dinas Kesehatan sebanyak 314 orang dan tenaga P3K RSUD Kota Dumai sebanyak 181 orang, pemenuhan kebutuhan dalam rangka pencapaian indikator SPM, indikator SDG's, IKU, program prioritas Walikota Dumai yang belum terakomodir (Khidmat Kesehatan), kegiatan HKN, kegiatan stunting dan kegiatan PIN Polio

5. Pemberlakuan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan yang berdampak adanya perubahan definisi operasional dan rumus penghitungan indeks pencapaian SPM sehingga ada perubahan target atau sasaran SPM pada Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024.

Mengacu pada pasal 343 angka (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasar hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Dari hasil pembahasan perubahan anggaran Tahun 2024 dengan TAPD Kota Dumai ada penambahan anggaran pada Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024 sebesar Rp 4.000.000.000,- yang dialokasikan pada 8 sub kegiatan yakni sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, pengembangan puskesmas, pengembangan fasilitas kesehatan lainnya, rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya, pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan, pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman ke fasilitas kesehatan, pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif, dan pengelolaan surveilans kesehatan. Dengan demikian, pagu anggaran penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai mengacu pada Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2024 sebesar Rp 239,018,135,031,- terdiri dari pagu untuk Dinas Kesehatan sebesar Rp 210,920,013,281,- dan pagu BLUD 10 puskesmas dan BLUD Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A sebesar Rp 28,098,121,750,-.



BAB III
RENCANA KERJA DAN
PENDANAAN

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang selanjutnya diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai pada hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024 juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai juga sebagai pedoman dalam mengatasi isu-isu strategis di bidang kesehatan menerapkan paradigma pembangunan kesehatan baru yang mengacu pada agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA presiden terutama dalam point 5 **“Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”** dan dengan menerapkan kebijakan pembangunan berwawasan kesehatan untuk mendukung visi Kementerian Kesehatan Sesuai Edaran Menteri PPN/ Bappenas No. B.899/ M.PPN/ Ses/ PP.03.02/ 12/2019 tanggal 20 Desember 2019 **“Terwujudnya Masyarakat Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan untuk Menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”**.

Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan di semua tingkatan administratif adalah dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional bidang kesehatan yakni mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI telah menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan serta program – program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu

lima tahun yang akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten) melaksanakan pembangunan kesehatan sesuai dengan kewenangan masing - masing. Visi dari Kementerian Kesehatan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024 adalah :

“ Menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan untuk Menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Adapun sasaran strategis yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat
2. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan
3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat.
4. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan
5. Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar
6. Terjaminnya pembiayaan kesehatan
7. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik dan bersih
8. Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan

Sasaran strategis dari Kementerian Kesehatan sejalan dengan sasaran RPJMD Kota Dumai bidang kesehatan. Adapun faktor pendorong adalah adanya dukungan dana dari Pemerintah Pusat (Kementerian Kesehatan RI) berupa dana DAK. Sedangkan faktor penghambat adalah keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan yang masih rendah terutama pada daerah sulit dijangkau atau daerah perbatasan seperti Sungai Sembilan, Bukit Kayu Kapur dan Medang Kampai, seringkali mutasi pegawai terutama tenaga teknis fungsional dan pemberdayaan masyarakat serta kemitraan swasta dan lintas sektor yang masih rendah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Kota Dumai

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi pembangunan Kota Dumai yang hendak dicapai pada tahun 2026 khususnya dalam rangka mencapai misi 2 mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berjiwa melayu, maka dirumuskan tujuan dan dan sasaran pembangunan Kota Dumai tahun 2021-2026. Adapun tujuan pembangunan Kota Dumai berkaitan dengan kesehatan adalah tujuan ketiga “Membangun masyarakat Dumai yang produktif berdaya saing dan sejahtera” dengan sasaran yang terkait dengan kesehatan yakni “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Dumai”. Tujuan dan dan sasaran pembangunan Kota Dumai tahun 2021-2026 selanjutnya dijabarkan dalam sasaran jangka menengah pelayanan Perangkat Daerah (PD). Sasaran pembangunan Kota Dumai terkait dengan kesehatan tersebut menjadi tujuan pembangunan Dinas Kesehatan Kota Dumai pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021-2026 yakni **Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat** dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Kesehatan. Sasaran pembangunan Dinas Kesehatan Kota Dumai adalah:

1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, yang diukur dengan indikator kinerja Angka Harapan Hidup.
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, yang diukur dengan indikator kinerja Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai.

Tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun kedepan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi pemerintah Kota Dumai serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis yang tertuang dalam RPJMD Kota Dumai dan Dinas Kesehatan Kota Dumai dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.10 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022 s/d 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Capaian Setiap Tahun					
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Dumai		Indeks Kesehatan	0.788	0.789- 0.790	0.790- 0.791	0.790- 0.791	0.791- 0.792	
		1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	71.25 tahun	71.29- 71.33 tahun	71.34- 71.37 tahun	71.38- 71.42 tahun	71.42- 71.46 tahun
		2	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai	92.2%	97%	100%	100%	100%

Untuk Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai tahun 2024, target indikator tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Dumai yang diukur melalui Indeks Kesehatan adalah sebesar 0.790-0.791. Sedangkan target indikator sasaran 1 meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat yang diukur melalui Angka Harapan Hidup adalah sebesar 71.34-71.37 tahun, dan target indikator sasaran 2 meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang diukur melalui Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai adalah sebesar 100%.

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan Kota Dumai pada tahun 2026 serta memperhatikan pencapaian hasil pembangunan bidang kesehatan di Kota Dumai, maka pada tahun 2024 akan dilaksanakan strategi dengan fokus pada prioritas pembangunan bidang kesehatan Kota Dumai yang dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kesehatan Kota Dumai.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai untuk tahun 2024 masih di prioritaskan pada :

1. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 12 indikator dan pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kesehatan.

2. Pencapaian target Sustainable Development Goals (SDG's) tahun 2024, dengan perhatian khusus sektor kesehatan pada :
 - a. Goal 1 : Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun
 - b. Goal 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Baik serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan.
 - c. Goal 3 : Menjamin Kehidupan Yang Sehat Dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia.
 - d. Goal 6 : Menjamin Ketersediaan Serta pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Yang Berkelanjutan Untuk Semua.
3. Peningkatan keterjangkauan pemerataan dan mutu pelayanan
Masih diprioritaskan pada peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di daerah sulit, pembangunan dan rehabilitasi puskesmas dan jaringannya (puskesmas pembantu dan poskeskel), dan pengadaan peralatan kesehatan (medis dan non medis) untuk puskesmas dan jaringannya (puskesmas pembantu dan poskeskel) serta mempertahankan akreditasi puskesmas.
4. Peningkatan dan pemerataan Sumber Daya Kesehatan
Pemerataan penempatan tenaga kesehatan di sarana pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya (puskesmas pembantu, poskeskel dan polindes) terutama di daerah sulit agar memenuhi standar ketenagaan kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
5. Pengentasan kemiskinan
Pengentasan kemiskinan dilaksanakan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), perbaikan gizi masyarakat (pemberian PMT balita dan bumil resti masyarakat miskin), dan sunatan massal untuk masyarakat miskin.
Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kesehatan 2021-2026 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan juga mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 merupakan ketentuan implementatif dari penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju single kode base untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024 terdiri dari: Non Urusan dan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari **5 program, 24 kegiatan dan 107 sub kegiatan** dengan perincian: **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** sebanyak 1 program, 9 kegiatan dan 42 Sub Kegiatan; dan **Program Urusan Wajib** terdiri dari 4 program, 15 kegiatan dan 65 Sub Kegiatan, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3.11 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Dumai Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

No	Nomor Rekening Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
I.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1)	1.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
2	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
3	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
4	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan penyusunan dokume DPA-SKPD
5	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD
6	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
7	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi kinerja perangkat daerah
2)	1.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
9	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
3)	1.02.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
10	1.02.01.2.03.0001	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD
11	1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD
4)	1.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
12	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya

No	Nomor Rekening Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
13	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai
14	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
5)	1.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
15	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
16	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
17	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan peralatan rumah tangga
18	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan bahan logistik kantor
19	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
20	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
21	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
22	1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
6)	1.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
23	1.02.01.2.07.0001	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
24	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
25	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan mebel
26	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
7)	1.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
27	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
28	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
29	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
8)	1.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
30	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
31	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
9)	1.02.01.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
32	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Dumai Kota
33	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Dumai Barat
34	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Bukit Kapur
35	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Sungai Sembilan
36	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Medang Kampai
37	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Bumi Ayu
38	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Bukit Timah
39	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Jaya Mukti
40	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Purnama
41	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Bukit Kayu Kapur
42	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Laboratorium kesehatan pemeriksaan kualitas air kelas A

No	Nomor Rekening Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
II.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
10)	1.02.02.2.01	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota
43	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas
44	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya
45	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
46	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan puskesmas
47	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya
48	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas
49	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya
50	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah dinas tenaga kesehatan
51	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan
52	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi
53	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan
54	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
55	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
11)	1.02.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
56	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil
57	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin
58	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
59	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita
60	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
61	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif
62	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut
63	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi
64	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
65	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
66	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
67	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV
68	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)
69	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
70	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat
71	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga
72	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan
73	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan
74	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)

No	Nomor Rekening Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
75	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza
76	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular
77	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat
78	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/Nasional
79	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan kabupaten/kota sehat
80	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
81	1.02.02.2.02.0033	Operasional pelayanan Puskesmas
82	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
83	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
84	1.02.02.2.02.0036	Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)
85	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
86	1.02.02.2.02.0039	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
87	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis
88	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)
89	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria
90	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Upaya Kesehatan Reproduksi
91	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak
12)	1.02.02.2.03	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
92	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi kesehatan
13)	1.02.02.2.04	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota
93	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
94	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan tata kelola rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota
95	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan
96	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan
III.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
14)	1.02.03.2.01	Kegiatan Pemberian izin praktek tenaga kesehatan di wilayah kabupaten Kota
97	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan
15)	1.02.03.2.02	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
98	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan
16)	1.02.03.2.03	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

No	Nomor Rekening Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
99	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
IV.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
17)	1.02.04.2.01	Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
100	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)
18)	1.02.04.2.03	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
101	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga
19)	1.02.04.2.04	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
102	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penertiban sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM)
20)	1.02.04.2.05	Kegiatan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
103	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penertiban stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan
21)	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
104	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan
V.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
22)	1.02.05.2.01	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
105	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat
23)	1.02.05.2.02	Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
106	1.02.05.2.02.0002	Pertumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat

No	Nomor Rekening Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
24)	1.02.05.2.03	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
107	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)

Review terhadap Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran Tabel T-C 31.

3.4 Rencana Kinerja Tahun 2024

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan 2021–2026, Rencana Kinerja yang di ukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) disusun setiap tahunnya. Rencana Kinerja ini menjabarkan target yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini mempresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan benchmark bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Rencana Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Tahun 2023 Dinas Kesehatan Kota Dumai adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12 Rencana Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Tahun 2024 Dinas Kesehatan Kota Dumai

No	Sasaran Strategis	Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1. Menurunnya Mortalitas (Angka Kematian)	%	100
		1.1 Angka Kematian Bayi per 1.000 KH	per 1.000 KH	8
		1.2 Angka Kematian Balita per 1.000 KH	per 1.000 KH	11
		1.3 Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	per 100.000 KH	101
		1.4 Umur Harapan Hidup	Tahun	71.34-71.37
		2. Menurunnya Morbiditas (Angka Kesakitan)	%	100
		2.1 Angka Kesakitan Malaria (API) per 1.000 penduduk	per 1.000 penduduk	0.1
		2.2 Persentase Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +	%	88
		2.3 Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko	%	< 1
		2.4 Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk	54
		3. Meningkatnya Status Gizi Balita	%	100
		3.1 Persentase Balita dengan Gizi Buruk	%	1
		3.2 Persentase Balita dengan Gizi Kurang	%	2
		2.	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	4. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

3.5 Kerangka Pendanaan Perubahan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024

Pagu anggaran penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024 sebesar Rp 239,018,135,031,- bertambah sebanyak Rp 92,486,332,431,- dari pagu APBD Murni sebesar Rp 146.531.802.600,- atau bertambah sebanyak Rp 6,849,957,964,- dari pagu APBD Pergeseran ketujuh sebesar Rp 232.168.177.067,-. Pagu Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai Kota Dumai tahun 2024 tersebut terdiri dari pagu untuk Dinas Kesehatan sebesar Rp 210,920,013,281,- dan pagu untuk BLUD sebesar Rp 28.098.121.750,- (terdiri dari pagu BLUD 10 Puskesmas se Kota Dumai sebesar Rp 27.872.613.750,-, dan pagu BLUD Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A sebesar Rp 225.508.000,-).

Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp 157,317,662,364,- atau sebesar 65,82% dialokasikan untuk Non Urusan. Anggaran Non Urusan dialokasikan untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota dengan 9 kegiatan dan 39 sub kegiatan. Sedangkan sisanya sebesar Rp 81,700,472,667.00,- atau sebesar 34,18% dialokasikan untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan 4 program, 14 kegiatan serta 52 sub kegiatan. Kerangka Pendanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai Kota Dumai tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut:

TABEL 3.12
KERANGKA PENDANAAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2024

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ Berkurang (Rp)	Keterangan
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	100%	63,582,447,315	100%	136,208,378,614	72,625,931,299	
1.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	28 dokumen	232,376,700	28 dokumen	229,808,400	(2,568,300)	
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 dokumen	137,472,400	7 dokumen	130,093,100	(7,379,300)	ada pengurangan anggaran kegiatan
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	22,972,000	2 dokumen	39,322,000	16,350,000	ada penambahan anggaran untuk belanja honorarium
1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	5,141,000	2 dokumen	5,141,000	-	adanya pergeseran dalam sub kegiatan
1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan penyusunan dokume DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	1,781,000	2 dokumen	1,781,000	-	adanya pergeseran dalam sub kegiatan
1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	1,781,000	2 dokumen	1,781,000	-	adanya pergeseran dalam sub kegiatan
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	19,709,200	4 laporan	19,709,200	-	adanya pergeseran dalam sub kegiatan
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 laporan	43,520,100	9 laporan	31,981,100	(11,539,000)	ada pengurangan anggaran kegiatan
1.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan administrasi keuangan perangkat daerah	2 laporan	55,150,987,040	2 laporan	125,491,026,664	70,340,039,624	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	600 orang/bulan	55,097,937,040	1370 orang/bulan	125,399,726,664	70,301,789,624	ada Penambahan Gaji RSUD dan Gaji P3K
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	53,050,000	2 Laporan	91,300,000	38,250,000	ada penambahan kegiatan FGD aspek hukum dalam pengelolaan keuangan daerah
1.02.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 dokumen	28,400,000	4 dokumen	28,400,000	-	
1.02.01.2.03.0001	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	13,400,000	2 dokumen	13,400,000	-	adanya pergeseran dalam sub kegiatan
1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	15,000,000	2 laporan	15,000,000	-	
1.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	1 dokumen	382,622,310	1 dokumen	343,234,310	10,612,000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ Berkurang (Rp)	Keterangan
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1.02.01.2.05.0005	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	166,166,770	1 dokumen	166,166,770	-	
1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 orang	166,455,540	9 orang	177,067,540	10,612,000	Adanya penambahan biaya perjalanan dinas pelatihan
1.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 dokumen	964,256,932	3 dokumen	1,662,978,640	698,721,708	
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	18,797,900	1 paket	28,764,600	9,966,700	adanya penambahan belanja alat listrik kantor
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	277,753,700	3 paket	492,901,500	215,147,800	adanya penambahan belanja HKN
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	20,105,000	3 paket	30,081,800	9,976,800	adanya penambahan peralatan kebersihan
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	55,395,000	4 paket	140,262,500	84,867,500	penambahan makan minum HKN
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	59,995,532	4 paket	111,694,440	51,698,908	penambahan anggaran untuk HKN
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	3,000,000	1 dokumen	3,540,000	540,000	penambahan koran MX
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	473,529,800	1 laporan	793,529,800	320,000,000	adanya pergeseran dalam sub kegiatan
1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	55,680,000	1 dokumen	62,204,000	6,524,000	
1.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32 unit	250,000,000	57 unit	969,514,600	719,514,600	
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 unit	150,000,000	1 unit	50,000,000	(100,000,000)	pengurangan anggaran kegiatan
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 unit	100,000,000	56 unit	919,514,600	819,514,600	ada penambahan anggaran untuk pengadaan peralatan dan mesin lainnya
1.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	5,574,240,000	3 Laporan	5,744,525,000	170,285,000	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	379,600,000	1 laporan	430,100,000	50,500,000	penambahan jasa publikasi, telepon dan paket zoom meeting
1.02.01.2.08.0003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	458,640,000	1 laporan	578,425,000	119,785,000	penambahan honor pengelola keuangan dan kegiatan HKN
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	4,736,000,000	1 laporan	4,736,000,000	-	
1.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19 unit	1,049,564,333	19 unit	1,738,891,000	689,326,667	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ Berkurang (Rp)	Keterangan
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 unit	639,563,500	18 unit	735,891,000	96,327,500	penambahan pemeliharaan mobil dinas
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	410,000,833	1 unit	1,003,000,000	592,999,167	penambahan pembuatan gedung aset, pemeliharaan tiang baleho, perbaikan halaman kantor dan perbaikan gedung kantor
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)	84%	59,007,579,650	84%	66,327,266,542	7,319,686,892	
1.02.02.2.01	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah untuk UKM dan UKP	12 sarana	21,899,912,000	12 sarana	23,656,933,707	1,757,021,707	
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang dibangun	1 unit	12,150,000,000	1 unit	4,129,586,538	(8,020,413,462)	adanya refocusing pembatalan pembangunan Puskesmas Dumai Kota + pembebasan tanah pembangunan dumai kota (600.000.000)
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun	1 unit	400,000,000	2 unit	704,088,000	304,088,000	Penambahan anggaran teknokratik
1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah rumah dinas kesehatan yang dibangun	1 unit	250,000,000	1 unit	250,000,000	-	
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan puskesmas	Jumlah puskesmas yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	6 unit	1,000,000,000	4 unit	1,220,000,000	220,000,000	Ada penambahan anggaran untuk pembangunan tempat parkir puskesmas Bukit Kapur
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	9 unit	200,000,000	92 unit	2,759,308,444	2,559,308,444	Ada penambahan DAK IFK (1,753,236,444) dan penambahan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana kesehatan
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5 unit	1,000,000,000	5 unit	1,000,000,000	-	
1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	7 unit	1,800,000,000	10 unit	2,020,000,000	220,000,000	Ada penambahan anggaran untuk rehabilitasi Poskeskel Tanjung Penyembal dan Tanjung Palas
1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah dinas tenaga kesehatan	Jumlah sarana dan Prasarana rumah dinas tenaga kesehatan yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	1 unit	200,000,000	1 unit	200,000,000	-	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	47 unit	2,000,000,000	150 unit	4,199,900,000	2,199,900,000	Ada penambahan DAK Fisik pengadaan sanitarian KIT (199,900,000) Dan penambahan anggaran untuk pembelian alat kesehatan
1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance	280 unit	100,032,000	285 unit	100,032,000	-	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ Berkurang (Rp)	Keterangan
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	10 unit	100,600,000	36 unit	148,468,000	47,868,000	ada penambahan DAK Non Fisik (47,868,000)
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai,vaksin, makanan dan minuman ke fasilitas kesehatan	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	4 paket	2,600,000,000	4 paket	6,714,670,725	4,114,670,725	ada penambahan DAK Non Fisik (2,184,670,725), penambahan belanja obat dan BMHP yang baru mengakomodir kebutuhan puskesmas selama 7 bulan
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman Yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	10 paket	99,280,000	10 paket	210,880,000	111,600,000	ada penambahan DAK Non Fisik (111,600,000)
1.02.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	10 puskesmas	35,462,446,148	10 puskesmas	40,886,107,033	5,423,660,885	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9.581 orang	75,000,000	9.938 orang	75,000,000	-	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9.145 orang	202,797,250	9.938 orang	202,797,250	-	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8.710 orang	83,880,100	9.537 orang	157,413,900	73,533,800	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK) (73,533,800)
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	36.178 orang	65,560,750	25.998 orang	215,560,750	150,000,000	penambahan anggaran untuk cetak buku KIA
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	60.966 orang	61,775,000	62.722 orang	61,775,000	-	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	209.094 orang	53,050,000	221.241 orang	283,050,000	230,000,000	Ada penambahan anggaran untuk pengadaan BMHP yakni stik pemeriksaan kolesterol
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15.341 orang	29,849,900	24.179 orang	29,849,900	-	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	72,492 orang	100,000,000	79.271 orang	100,000,000	-	ada pergeseran belanja dalam sub kegiatan
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.815 orang	100,000,000	4.172 orang	623,232,000	523,232,000	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK) (523,232,000)
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	503 orang	83,670,000	529 orang	83,670,000	-	ada pergeseran belanja dalam sub kegiatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	8.034 orang	100,000,000	6.471 orang	1,146,912,300	1,046,912,300	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK) (1,046,912,300) dan pergeseran belanja dalam sub kegiatan

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ Berkurang (Rp)	Keterangan
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9.228 orang	313,107,500	13.070 orang	439,557,500	126,450,000	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK) (126,450,000)
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 dokumen	558,440,000	1 dokumen	558,440,000	-	Pergeseran belanja dalam sub kegiatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 dokumen	355,797,250	1 dokumen	2,897,437,250	2,541,640,000	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK) (41,640,000) dan penambahan anggaran untuk kegiatan stunting sebesar Rp 2.500.000.000,-
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 dokumen	181,988,800	5 dokumen	448,108,800	266,120,000	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK) (266,120,000)
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	55,569,230	1 dokumen	293,074,530	237,505,300	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK) (237,505,300)
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan surveilans kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 dokumen	287,966,400	1 dokumen	649,855,400	361,889,000	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK) (61,608,000) dan pergeseran belanja dalam sub kegiatan serta penambahan kegiatan PIN Polio dan BIAS
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan jiwa dan NAPZA	Jumlah penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			8 orang	54,746,800	54,746,800	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK)
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 dokumen	460,931,366	1 dokumen	1,612,347,866	1,151,416,500	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK) (401,697,500) dan penambahan apbd untuk kegiatan foging dan pembelian BMHP Abate
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 dokumen	31,380,142,202	1 dokumen	30,030,726,412	(1,349,415,790)	adanya pengurangan anggaran karena adanya mutasi kepesertaan PBI dan BP kelas 3 sampai bulan juni
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			1 paket	39,200,000	39,200,000	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK)
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/kota sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kabupaten/kota sehat	1 dokumen	29,999,200	1 dokumen	29,999,200	-	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			1 dokumen	12,605,000	12,605,000	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK)
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 laporan	8,550,000	8,550,000	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK)
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan pengelolaan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT)	Jumlah Public safety center (PSC119) tersedia, terkelola dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT)	1 unit	714,413,700	1 unit	563,319,700	(151,094,000)	adanya pengurangan anggaran belanja jasa tenaga kesehatan yang lulus P3K di PSC 119

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ Berkurang (Rp)	Keterangan
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1488 orang	100,000,000	1488 orang	100,000,000	-	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	609 orang	47,457,500	609 orang	47,457,500	-	
1.02.02.2.02.0042	Pelayanan kesehatan malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan malaria	2 orang	21,050,000	2 orang	67,717,975	46,667,975	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK)
1.02.02.2.02.0045	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			1 dokumen	53,702,000	53,702,000	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK)
1.02.02.2.03	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan SIK secara terintegrasi	11 sarana	185,772,000	11 sarana	139,480,300	(46,291,700)	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	8 dokumen	185,772,000	8 dokumen	139,480,300	(46,291,700)	pengurangan anggaran kegiatan
1.02.02.2.04	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana rumah sakit, puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	103 sarana	1,459,449,502	103 sarana	1,644,745,502	185,296,000	
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	18 unit	51,124,000	20 unit	51,124,000	-	Pergeseran uraian belanja sub kegiatan
1.02.02.2.04.0002	Peningkatan tata kelola rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	75 unit	81,000,000	107 unit	81,000,000		
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	11 unit	1,111,838,302	11 unit	1,207,138,302	95,300,000	ada penambahan anggaran untuk kegiatan perjalanan dinas petugas medis dan paramedis dukungan kegiatan pelayanan kesehatan MTQ dan Hari lahir pancasila
1.02.02.2.04.0004	Penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	2 dokumen	215,487,200	2 dokumen	305,483,200	89,996,000	penambahan anggaran untuk operasional OPLET SIPAI dimana di APBD murni baru dianggarkan untuk 8 bulan
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan di puskesmas dan jaringannya sesuai standar	84%	8,031,183,400	84%	4,994,208,000	(3,036,975,400)	
1.02.03.2.01	Kegiatan Pemberian Izin praktek tenaga kesehatan di wilayah kabupaten Kota	Jumlah tempat praktek tenaga kesehatan yang memenuhi persyaratan perizinan	30 tempat	22,500,000	40 tempat	43,050,000	20,550,000	
1.02.03.2.01.0001	Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 dokumen	22,500,000	1 dokumen	43,050,000	20,550,000	penambahan honorarium tim verifikasi perizinan tenaga kesehatan
1.02.03.2.02	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas yang menerapkan aplikasi SDMK	10 puskesmas	8,008,683,400	10 puskesmas	4,313,192,400	-3,695,491,000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ Berkurang (Rp)	Keterangan
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan	387 orang	7,959,600,000	125 orang	4,057,600,000	(3,902,000,000)	ada pengurangan tenaga TKPK menjadi P3K
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 dokumen	49,083,400	2 dokumen	255,592,400	206,509,000	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK).
1.02.03.2.03	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan			1 kegiatan	637,965,600	637,965,600	
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya			150 orang	637,965,600	637,965,600	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK)
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotik dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	80%	484,186,100	80%	978,517,100	494,331,000	
1.02.04.2.01	Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, dan UMOT yang memenuhi persyaratan perizinan	117 sarana	84,263,000	117 sarana	153,248,000	68,985,000	
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	3 dokumen	84,263,000	3 dokumen	153,248,000	68,985,000	Ada penambahan DBH dan DAK Non Fisik (BOK)
1.02.04.2.03	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah industri rumah tangga pangan (IRTP) yang memenuhi persyaratan perizinan	50 sarana	111,357,900	50 sarana	357,537,900	246,180,000	
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 dokumen	111,357,900	1 dokumen	357,537,900	246,180,000	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK)
1.02.04.2.04	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah dokumen pelaksanaan pengawasan kualitas air minum dan air bersih, pelaksanaan pengawasan TTU dan TP2M	4 dokumen	139,499,800	4 dokumen	139,499,800		
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	4 dokumen	139,499,800	4 dokumen	139,499,800		

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ Berkurang (Rp)	Keterangan
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1.02.04.2.05	Kegiatan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah dokumen pelaksanaan penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	1 dokumen	115,489,900	1 dokumen	115,489,900	-	
1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penertiban stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 dokumen	115,489,900	1 dokumen	115,489,900	-	
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen pelaksanaan pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	1 dokumen	33,575,500	1 dokumen	212,741,500	179,166,000	
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	30 unit	33,575,500	30 unit	212,741,500	179,166,000	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK)
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio posyandu per 1000 balita	4.68	342,048,025	4.68	2,411,643,025	2,069,595,000	
1.02.05.2.01	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kelurahan siaga aktif	36 kelurahan	130,123,500	36 kelurahan	1,801,248,500	1,671,125,000	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	6 dokumen	130,123,500	6 dokumen	1,801,248,500	1,671,125,000	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK) ((21,125,000) serta penambahan anggaran kegiatan HKN dan jambore kader
1.02.05.2.02	Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang melaksanakan PHBS	38.262 rumah tangga	157,264,625	38.262 rumah tangga	157,264,625	-	
1.02.05.2.02.0002	Pertumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	Jumlah keluarga yang mengikuti pertumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	38.262 keluarga	157,264,625	38.262 keluarga	157,264,625	-	
1.02.05.2.03	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah posyandu mandiri	196 posyandu	54,659,900	197 posyandu	453,129,900	398,470,000	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3 dokumen	54,659,900	3 dokumen	453,129,900	398,470,000	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK) (148,470,000) dan penambahan anggaran untuk kegiatan ILP
			TOTAL DINKES (I)	131,447,444,490		210,920,013,281	79,472,568,791	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Dumai Kota

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ Berkurang (Rp)	Justifikasi
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	100%	1,804,279,500.00	100%	2,535,460,000.00	731,180,500.00	
1.02.01.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah peningkatan pelayanan BLUD	11 unit kerja	1,804,279,500.00	11 unit kerja	2,535,460,000.00	731,180,500.00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Dumai Kota	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1,804,279,500.00	1 unit kerja	2,535,460,000.00	731,180,500.00	Ada penambahan pendapatan BLUD puskesmas karena pemberlakuan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dan penambahan kapitasi peserta BPJS
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)	84%		84%	931,103,000.00	931,103,000.00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	10 puskesmas		10 puskesmas	930,874,000.00	930,874,000.00	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK Puskesmas bersumber APBN)
1.02.02.2.03	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan SIK secara terintegrasi	11 sarana		11 sarana	229,000.00	229,000.00	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK Puskesmas bersumber APBN)
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rasio posyandu per 1000 balita	4.68		4.68	17,325,000.00	17,325,000.00	
1.02.05.2.03	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah posyandu mandiri	196 posyandu		197 posyandu	17,325,000.00	17,325,000.00	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK Puskesmas bersumber APBN)
			TOTAL	1,804,279,500.00		3,483,888,000.00	1,679,608,500.00	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Dumai Barat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ Berkurang (Rp)	Justifikasi
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	100%	1,331,000,000.00	100%	1,800,000,000.00	469,000,000.00	
1.02.01.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah peningkatan pelayanan BLUD	11 unit kerja	1,331,000,000.00	11 unit kerja	1,800,000,000.00	469,000,000.00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Dumai Barat	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1,331,000,000.00	1 unit kerja	1,800,000,000.00	469,000,000.00	Ada penambahan pendapatan BLUD puskesmas karena pemberlakuan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dan penambahan kapitasi peserta BPJS serta penggunaan SILPA TA 2023 sebesar Rp 50.000.000
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)	84%		84%	542,392,000.00	542,392,000.00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	10 puskesmas		10 puskesmas	542,312,000.00	542,312,000.00	Ada penambahan DAK Non fisik (BOK Puskesmas bersumber APBN)
1.02.02.2.03	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan SIK secara terintegrasi	11 sarana		11 sarana	80,000.00	80,000.00	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK Puskesmas bersumber APBN)
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rasio posyandu per 1000 balita	4.68		4.68	3,300,000.00	3,300,000.00	
1.02.05.2.03	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah posyandu mandiri	196 posyandu		197 posyandu	3,300,000.00	3,300,000.00	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK Puskesmas bersumber APBN)
			TOTAL	1,331,000,000.00		2,345,692,000.00	1,014,692,000.00	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Bukit Kapur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ Berkurang (Rp)	Justifikasi
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	100%	1,450,800,000.00	100%	2,119,000,000.00	669,000,000.00	
1.02.01.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah peningkatan pelayanan BLUD	11 unit kerja	1,450,000,000.00	11 unit kerja	2,119,000,000.00	669,000,000.00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Bukit Kapur	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1,450,000,000.00	1 unit kerja	2,119,000,000.00	669,000,000.00	Ada penambahan pendapatan BLUD puskesmas karena pemberlakuan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dan penambahan kapitasi peserta BPJS serta penggunaan SIIPA TA 2023 sebesar Rp 269.000.000
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)	84%		84%	574,011,000.00	574,011,000.00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	10 puskesmas		10 puskesmas	572,516,000.00	572,516,000.00	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK Puskesmas bersumber APBN)
1.02.02.2.03	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan SIK secara terintegrasi	11 sarana		11 sarana	1,495,000.00	1,495,000.00	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK Puskesmas bersumber APBN)
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rasio posyandu per 1000 balita	4.68		4.68	7,350,000.00	7,350,000.00	
1.02.05.2.03	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah posyandu mandiri	196 posyandu		197 posyandu	7,350,000.00	7,350,000.00	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK Puskesmas bersumber APBN)
		TOTAL		1,450,000,000.00		2,700,361,000.00	1,250,361,000.00	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Sungai Sembilan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ Berkurang (Rp)	Justifikasi
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	100%	2,454,374,960.00	100%	3,185,907,750.00	731,532,790.00	
1.02.01.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah peningkatan pelayanan BLUD	11 unit kerja	2,454,374,960.00	11 unit kerja	3,185,907,750.00	731,532,790.00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Sungai Sembilan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	2,454,374,960.00	1 unit kerja	3,185,907,750.00	731,532,790.00	Ada penambahan pendapatan BLUD puskesmas karena pemberlakuan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dan penambahan kapitasi peserta BPJS
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)	64%		64%	821,046,000.00	821,046,000.00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	10 puskesmas		10 puskesmas	820,575,000.00	820,575,000.00	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK Puskesmas bersumber APBN)
1.02.02.2.03	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan SIK secara terintegrasi	11 sarana		11 sarana	471,000.00	471,000.00	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK Puskesmas bersumber APBN)
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rasio posyandu per 1000 balita	4.68		4.68	915,000.00	915,000.00	
1.02.05.2.03	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah posyandu mandiri	196 posyandu		197 posyandu	915,000.00	915,000.00	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK Puskesmas bersumber APBN)
		TOTAL		2,454,374,960.00		4,007,868,750.00	1,553,493,790.00	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Medang Kampai

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ Berkurang (Rp)	Justifikasi
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
1.02.01.2.10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	100%	922,500,000.00	100%	1,419,168,000.00	496,668,000.00	
1.02.01.2.10.0001	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah peningkatan pelayanan BLUD	11 unit kerja	922,500,000.00	11 unit kerja	1,419,168,000.00	496,668,000.00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Medang Kampai	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	922,500,000.00	1 unit kerja	1,419,168,000.00	496,668,000.00	Ada penambahan pendapatan BLUD puskesmas karena pemberlakuan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dan penambahan kapitasi peserta BPJS
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)	84%		84%	541,032,000.00	541,032,000.00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	10 puskesmas		10 puskesmas	540,952,000.00	540,952,000.00	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK Puskesmas bersumber APBN)
1.02.02.2.03	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan SIK secara terintegrasi	11 sarana		11 sarana	80,000.00	80,000.00	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK Puskesmas bersumber APBN)
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rasio posyandu per 1000 balita	4.88		4.88	4,050,000.00	4,050,000.00	
1.02.05.2.03	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah posyandu mandiri	196 posyandu		197 posyandu	4,050,000.00	4,050,000.00	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK Puskesmas bersumber APBN)
			TOTAL	922,500,000.00		1,964,250,000.00	1,041,750,000.00	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Bumi Ayu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ Berkurang (Rp)	Justifikasi
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
1.02.01.2.10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	100%	1,111,875,000.00	100%	1,611,500,000.00	499,625,000.00	
1.02.01.2.10.0001	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah peningkatan pelayanan BLUD	11 unit kerja	1,111,875,000.00	11 unit kerja	1,611,500,000.00	499,625,000.00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Bumi Ayu	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1,111,875,000.00	1 unit kerja	1,611,500,000.00	499,625,000.00	Ada penambahan pendapatan BLUD puskesmas karena pemberlakuan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dan penambahan kapitasi peserta BPJS serta penggunaan SILPA TA 2023 sebesar Rp 65.000.000
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)	84%		84%	736,865,000.00	736,865,000.00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	10 puskesmas		10 puskesmas	733,410,000.00	733,410,000.00	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK Puskesmas bersumber APBN)
1.02.02.2.03	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan SIK secara terintegrasi	11 sarana		11 sarana	3,455,000.00	3,455,000.00	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK Puskesmas bersumber APBN)
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rasio posyandu per 1000 balita	4.88		4.88	7,975,000.00	7,975,000.00	
1.02.05.2.03	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah posyandu mandiri	196 posyandu		197 posyandu	7,975,000.00	7,975,000.00	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK Puskesmas bersumber APBN)
			TOTAL	1,111,875,000.00		2,356,340,000.00	1,244,465,000.00	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Bukit Timah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ Berkurang (Rp)	Justifikasi
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	100%	609,500,000.00	100%	995,300,000.00	385,800,000.00	
1.02.01.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah peningkatan pelayanan BLUD	11 unit kerja	609,500,000.00	11 unit kerja	995,300,000.00	385,800,000.00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Bukit Timah	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	609,500,000.00	1 unit kerja	995,300,000.00	385,800,000.00	Ada penambahan pendapatan BLUD puskesmas karena pemberlakuan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dan penambahan kapitasi peserta BPJS
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)	84%		84%	531,249,000.00	531,249,000.00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	10 puskesmas		10 puskesmas	531,180,000.00	531,180,000.00	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK Puskesmas bersumber APBN)
1.02.02.2.03	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan SIK secara terintegrasi	11 sarana		11 sarana	69,000.00	69,000.00	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK Puskesmas bersumber APBN)
			TOTAL	609,500,000.00		1,526,549,000.00	517,649,000.00	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Purnama

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ Berkurang (Rp)	Justifikasi
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	100%	1,110,500,000.00	100%	1,534,255,000.00	423,755,000.00	
1.02.01.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah peningkatan pelayanan BLUD	11 unit kerja	1,110,500,000.00	11 unit kerja	1,534,255,000.00	423,755,000.00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Purnama	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1,110,500,000.00	1 unit kerja	1,534,255,000.00	423,755,000.00	Ada penambahan pendapatan BLUD puskesmas karena pemberlakuan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dan penambahan kapitasi peserta BPJS
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)	84%		84%	523,791,000.00	523,791,000.00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	10 puskesmas		10 puskesmas	519,732,000.00	519,732,000.00	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK Puskesmas bersumber APBN)
1.02.02.2.03	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan SIK secara terintegrasi	11 sarana		11 sarana	4,059,000.00	4,059,000.00	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK Puskesmas bersumber APBN)
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rasio posyandu per 1000 jiwa	4.88		4.68	6,820,000.00	6,820,000.00	
1.02.05.2.03	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah posyandu mandiri	196 posyandu		197 posyandu	6,820,000.00	6,820,000.00	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK Puskesmas bersumber APBN)
			TOTAL	1,110,500,000.00		2,064,866,000.00	954,366,000.00	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Jaya Mukti

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ Berkurang (Rp)	Justifikasi
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	100%	2,461,150,000.00	100%	3,857,565,000.00	1,396,415,000	
1.02.01.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah peningkatan pelayanan BLUD	11 unit kerja	2,461,150,000.00	11 unit kerja	3,857,565,000.00	1,396,415,000	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Jaya Mukti	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	2,461,150,000.00	1 unit kerja	3,857,565,000.00	1,396,415,000	Ada penambahan pendapatan BLUD puskesmas karena pemberlakuan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dan penambahan kapitasi peserta BPJS serta penggunaan SIUPA TA 2023 sebesar Rp 250.000.000
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)	84%		84%	1,106,079,000.00	1,106,079,000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	10 puskesmas		10 puskesmas	1,103,853,000.00	1,103,853,000	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK Puskesmas bersumber APBN)
1.02.02.2.03	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan SIK secara terintegrasi	11 sarana		11 sarana	5,226,000.00	5,226,000.00	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK Puskesmas bersumber APBN)
			TOTAL	2,461,150,000.00		4,966,644,000.00	2,505,494,000	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Bukit Kayu Kapur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ Berkurang (Rp)	Justifikasi
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	100%	1,640,538,650.00	100%	1,825,620,000.00	185,081,350.00	
1.02.01.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah peningkatan pelayanan BLUD	11 unit kerja	1,640,538,650.00	11 unit kerja	1,825,620,000.00	185,081,350.00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1,640,538,650.00	1 unit kerja	1,825,620,000.00	185,081,350	Ada penambahan pendapatan BLUD puskesmas karena pemberlakuan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dan penambahan kapitasi peserta BPJS
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)	84%		84%	629,410,000.00	629,410,000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	10 puskesmas		10 puskesmas	629,240,000.00	629,240,000	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK Puskesmas bersumber APBN)
1.02.02.2.03	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan SIK secara terintegrasi	11 sarana		11 sarana	170,000.00	170,000.00	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK Puskesmas bersumber APBN)
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rasio posyandu per-1000 balita	4.60		4.60	1,125,000.00	1,125,000.00	
1.02.05.2.03	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah posyandu mandiri	196 posyandu		197 posyandu	1,125,000.00	1,125,000.00	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK Puskesmas bersumber APBN)
			TOTAL	1,640,538,650.00		2,456,155,000.00	815,616,350	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 UPT. Laboratorium Kesehatan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ Berkurang (Rp)	Justifikasi
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	100%	188,640,000.00	100%	225,508,000.00	36,868,000.00	
1.02.01.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah peningkatan pelayanan BLUD	11 unit kerja	188,640,000.00	11 unit kerja	225,508,000.00	36,868,000.00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Laboratorium kesehatan pemeriksaan kualitas air kelas A	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	188,640,000.00	1 unit kerja	225,508,000.00	36,868,000.00	Ada penggunaan SIPA TA 2023 sebesar Rp 36.868.000
		TOTAL		188,640,000.00		225,508,000.00	36,868,000.00	
		TOTAL BLUD (1)		15,064,358,110.00		28,098,121,750.00	13,033,763,640.00	



BAB IV
PENUTUP

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024 merupakan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021-2026 untuk tahun 2024. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Walikota/Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Kesehatan Kota Dumai dalam menjalankan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan/sub kegiatan Perangkat Daerah. Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kota Dumai tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Dinas Kesehatan Kota Dumai serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

4.1 Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Menjaga sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di RPJMD dan Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai.
2. Sebagai pedoman dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) ini disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran, sebagaimana yang telah diamanatkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, Dinas kesehatan Kota Dumai berkewajiban untuk melaksanakan program-program Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2024 ini dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya.

4.2. Rencana tindak lanjut.

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024, akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen rincian belanja sub kegiatan satuan kerja perangkat daerah dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dumai, Agustus 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA DUMAI



Dr. SYAIFUL, MKM
Merbina Utama Muda/IV c
NIP. 197107242001121004



LAMPIRAN
TABEL T-C.31

Tabel T-C.31
 REVIEW TERHADAP PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024 KOTA DUMAI

NAMA OPD: DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

No	Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	100%	63,582,447,315	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	100%	136,208,378,614	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen dan laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	28 dokumen	232,376,700	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen dan laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	28 dokumen	229,808,400	
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 dokumen	137,472,400	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 dokumen	130,093,100	ada pengurangan anggaran kegiatan
2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	22,972,000	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	39,322,000	ada penambahan anggaran untuk belanja honorarium
3	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	5,141,000	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	5,141,000	adanya penggeseran dalam sub kegiatan
4	Koordinasi dan penyusunan dokume DPA-SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	1,781,000	Koordinasi dan penyusunan dokume DPA-SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	1,781,000	adanya penggeseran dalam sub kegiatan
5	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	1,781,000	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	1,781,000	adanya penggeseran dalam sub kegiatan
6	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	19,709,200	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	19,709,200	adanya penggeseran dalam sub kegiatan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
7	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 laporan	43,520,100	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 laporan	31,981,100	ada pengurangan anggaran kegiatan
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen/laporan administrasi keuangan perangkat daerah	2 laporan	55,150,987,040	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen/laporan administrasi keuangan perangkat daerah	2 laporan	125,491,026,664	
8	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	600 orang/bulan	55,097,937,040	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1370 orang/bulan	125,399,726,664	ada Penambahan Gaji RSUD dan Gaji P3K
9	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	53,050,000	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	91,300,000	ada penambahan kegiatan FGD aspek hukum dalam pengelolaan keuangan daerah
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 dokumen	28,400,000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 dokumen	28,400,000	
10	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	13,400,000	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	13,400,000	adanya pergeseran dalam sub kegiatan
11	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	15,000,000	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	15,000,000	
3	Kegiatan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	1 dokumen	332,622,310	Kegiatan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	1 dokumen	343,234,310	
12	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	166,166,770	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	166,166,770	
13	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 orang	166,455,540	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 orang	177,067,540	Adanya penambahan biaya perjalanan dinas pelatihan
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 dokumen	964,256,932	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 dokumen	1,662,978,640	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
14	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	18,797,900	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	28,764,600	adanya penambahan belanja alat listrik kantor
15	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	277,753,700	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	492,901,500	adanya penambahan belanja HKN
16	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	20,105,000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	30,081,800	adanya penambahan peralatan kebersihan
17	Penyediaan bahan logistik kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	55,395,000	Penyediaan bahan logistik kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	140,262,500	penambahan makan minum HKN
18	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	59,995,532	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	111,694,440	penambahan anggaran untuk HKN
19	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	3,000,000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	3,540,000	penambahan koran MX
20	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	473,529,800	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	793,529,800	adanya pergeseran dalam sub kegiatan
21	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	55,680,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	62,204,000	
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32 unit	250,000,000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57 unit	969,514,600	
22	Pengadaan Mebel	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 unit	150,000,000	Pengadaan Mebel	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	50,000,000	pengurangan anggaran kegiatan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
23	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 unit	100,000,000	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	56 unit	919,514,600	ada penambahan anggaran untuk pengadaan peralatan dan mesin lainnya
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	5,574,240,000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	5,744,525,000	
24	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	379,600,000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	430,100,000	penambahan jasa publikasi, telepon dan paket zoom meeting
25	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	458,640,000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	578,425,000	penambahan honor pengelola keuangan dan kegiatan HKN
26	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	4,736,000,000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	4,736,000,000	
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19 unit	1,049,564,333	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19 unit	1,738,891,000	
27	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 unit	639,563,500	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 unit	735,891,000	penambahan pemeliharaan mobil dinas
28	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	410,000,833	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1,003,000,000	penambahan pembuatan gedung aset, pemeliharaan tiang baleho, perbaikan halaman kantor dan perbaikan gedung kantor
II.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)	84%	59,007,579,650	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)	84%	66,327,266,542	
8	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		Jumlah penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah untuk UKM dan UKP	12 sarana	21,899,912,000	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		Jumlah penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah untuk UKM dan UKP	12 sarana	23,656,933,707	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
29	Pembangunan Puskesmas	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang dibangun	1 unit	12,150,000,000	Pembangunan Puskesmas	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang dibangun	1 unit	4,129,586,538	adanya refocusing pembatalan pembangunan Puskesmas Dumai Kota + pembebasan tanah pembangunan dumai kota (600.000.000)
30	Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun	1 unit	400,000,000	Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun	2 unit	704,088,000	Penambahan anggaran teknokratik
31	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah rumah dinas kesehatan yang dibangun	1 unit	250,000,000	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah rumah dinas kesehatan yang dibangun	1 unit	250,000,000	
32	Pengembangan puskesmas	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah puskesmas yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	6 unit	1,000,000,000	Pengembangan puskesmas	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah puskesmas yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	4 unit	1,220,000,000	Ada penambahan anggaran untuk pembangunan tempat parkir puskesmas Bukit Kapur
33	Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	9 unit	200,000,000	Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	92 unit	2,759,308,444	Ada penambahan DAK IFK (1,753,236,444) dan penambahan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana kesehatan
34	Rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5 unit	1,000,000,000	Rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5 unit	1,000,000,000	
35	Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	7 unit	1,800,000,000	Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	10 unit	2,020,000,000	Ada penambahan anggaran untuk rehabilitasi Poskeskel Tanjung Penyeimbang dan Tanjung Palas
36	Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah dinas tenaga kesehatan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana dan Prasarana rumah dinas tenaga Kesehatan yang Dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	1 unit	200,000,000	Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah dinas tenaga kesehatan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana dan Prasarana rumah dinas tenaga Kesehatan yang Dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	1 unit	200,000,000	
37	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	47 unit	2,000,000,000	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	150 unit	4,199,900,000	Ada penambahan DAK Fisik pengadaan sanitarian KIT (199,900,000) Dan penambahan anggaran untuk pembelian alat kesehatan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
38	Pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance	280 unit	100,032,000	Pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance	285 unit	100,032,000	
39	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	10 unit	100,600,000	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	36 unit	148,468,000	ada penambahan DAK Non Fisik (47,868,000)
40	Pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman ke fasilitas kesehatan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	4 paket	2,600,000,000	Pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman ke fasilitas kesehatan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	4 paket	6,714,670,725	ada penambahan DAK Non Fisik (2,184,670,725), penambahan belanja obat dan BMHP yang baru mengakomodir kebutuhan puskesmas selama 7 bulan
41	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	10 paket	99,280,000	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	10 paket	210,880,000	ada penambahan DAK Non Fisik (111,600,000)
9	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	10 puskesmas	35,462,446,148	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	10 puskesmas	40,886,107,033	
42	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9.581 orang	75,000,000	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9.938 orang	75,000,000	
43	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9.145 orang	202,797,250	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9.938 orang	202,797,250	
44	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8.710 orang	83,880,100	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9.537 orang	157,413,900	Ada penambahan DAK Non Fisik (80K) (73,533,800)

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
45	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	36.178 orang	65,560,750	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25.998 orang	215,560,750	penambahan anggaran untuk cetak buku KIA
46	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	60.966 orang	61,775,000	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	62.722 orang	61,775,000	
47	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	209.094 orang	53,050,000	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221.241 orang	283,050,000	Ada penambahan anggaran untuk pengadaan BMHP yakni stik pemeriksaan kolesterol
48	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15.341 orang	29,849,900	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24.179 orang	29,849,900	
49	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	72.492 orang	100,000,000	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	79.271 orang	100,000,000	ada pergeseran belanja dalam sub kegiatan
50	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.815 orang	100,000,000	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.172 orang	623,232,000	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK) (523,232,000)
51	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	503 orang	83,670,000	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	529 orang	83,670,000	ada pergeseran belanja dalam sub kegiatan
52	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	8.034 orang	100,000,000	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6.471 orang	1,146,912,300	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK) (1,046,912,300) dan pergeseran belanja dalam sub kegiatan
53	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9.228 orang	313,107,500	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	13.070 orang	439,557,500	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK) (126,450,000)
54	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 dokumen	558,440,000	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 dokumen	558,440,000	Pergeseran belanja dalam sub kegiatan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
55	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 dokumen	355,797,250	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 dokumen	2,897,437,250	Ada penambahan OAK Non Fisik (BOK) (41,640,000) dan penambahan anggaran untuk kegiatan stunting
56	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 dokumen	181,988,800	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 dokumen	448,108,800	Ada penambahan OAK Non Fisik (BOK) (266,120,000)
57	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	55,569,230	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	293,074,530	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK) (237,505,300)
58	Pengelolaan surveilans kesehatan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 dokumen	287,966,400	Pengelolaan surveilans kesehatan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 dokumen	649,855,400	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK) (61,608,000) dan pergeseran belanja dalam sub kegiatan serta penambahan kegiatan PIN Polio dan BIAS
59	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan jiwa dan NAPZA	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan jiwa dan NAPZA	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	8 orang	54,746,800	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK)
60	Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 dokumen	460,931,366	Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 dokumen	1,612,347,866	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK) (401,697,500) dan penambahan apbd untuk kegiatan foging dan pembelian BMHP Abate
61	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 dokumen	31,380,142,202	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 dokumen	30,030,726,412	adanya pengurangan anggaran karena adanya mutasi kepesertaan PBI dan BP kelas 3 sampai bulan juni
62	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 paket	39,200,000	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK)
63	Penyelenggaraan Kabupaten/kota sehat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kabupaten/kota sehat	1 dokumen	29,999,200	Penyelenggaraan Kabupaten/kota sehat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kabupaten/kota sehat	1 dokumen	29,999,200	
64	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 dokumen	12,605,000	Ada penambahan OAK Non Fisik (BOK)

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
65	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 laporan	8,550,000	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK)
66	Penyediaan dan pengelolaan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Public safety center (PSC119) tersedia, terkelola dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT)	1 unit	714,413,700	Penyediaan dan pengelolaan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Public safety center (PSC119) tersedia, terkelola dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT)	1 unit	563,319,700	adanya pengurangan anggaran belanja jasa tenaga kesehatan yang lulus P3K di PSC 119
67	Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan tuberkulosis	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1488 orang	100,000,000	Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan tuberkulosis	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1488 orang	100,000,000	
68	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	609 orang	47,457,500	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	609 orang	47,457,500	
69	Pelayanan kesehatan malaria	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan malaria	2 orang	21,050,000	Pelayanan kesehatan malaria	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan malaria	2 orang	67,717,975	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK)
70	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 dokumen	53,702,000	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK)
10	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan SIK secara terintegrasi	11 sarana	185,772,000	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan SIK secara terintegrasi	11 sarana	139,480,300	
71	Pengelolaan Sistem informasi kesehatan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	8 dokumen	185,772,000	Pengelolaan Sistem informasi kesehatan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	8 dokumen	139,480,300	ada pengurangan anggaran kegiatan
11	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah sarana rumah sakit, puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	103 sarana	1,459,449,502	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah sarana rumah sakit, puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	103 sarana	1,644,745,502	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
72	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	18 unit	51,124,000	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	20 unit	51,124,000	Pergeseran uraian belanja sub kegiatan
73	Peningkatan tata kelola rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	75 unit	81,000,000	Peningkatan tata kelola rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	107 unit	81,000,000	
74	Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	11 unit	1,111,838,302	Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	11 unit	1,207,138,302	ada penambahan anggaran untuk kegiatan perjalanan dinas petugas medis dan paramedis dukungan kegiatan pelayanan kesehatan MTQ dan Hari lahir pancasila
75	Penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	2 dokumen	215,487,200	Penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	2 dokumen	305,483,200	penambahan anggaran untuk operasional OPLET SIPAI dimana di APBD murni baru dianggarkan untuk 8 bulan
III.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase ketersediaan tenaga kesehatan di puskesmas dan jaringannya sesuai standar	84%	8,031,183,400	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase ketersediaan tenaga kesehatan di puskesmas dan jaringannya sesuai standar	84%	4,994,208,000	
12	Kegiatan Pemberian izin praktek tenaga kesehatan di wilayah kabupaten Kota		Jumlah tempat praktek tenaga kesehatan yang memenuhi persyaratan perizinan	30 tempat	22,500,000	Kegiatan Pemberian izin praktek tenaga kesehatan di wilayah kabupaten Kota		Jumlah tempat praktek tenaga kesehatan yang memenuhi persyaratan perizinan	40 tempat	43,050,000	
76	Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 dokumen	22,500,000	Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 dokumen	43,050,000	penambahan honorarium tim verifikasi perizinan tenaga kesehatan
13	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Jumlah puskesmas yang menerapkan aplikasi SDMK	10 puskesmas	8,008,683,400	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Jumlah puskesmas yang menerapkan aplikasi SDMK	10 puskesmas	4,313,192,400	
77	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan	387 orang	7,959,600,000	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan	387 orang	4,057,600,000	ada pengurangan tenaga TKPK menjadi P3K

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
78	Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 dokumen	49,083,400	Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 dokumen	255,592,400	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK).
14	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan			Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	1 kegiatan	637,965,600	
79	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	150 orang	637,965,600	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK)
IV.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotik dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	80%	484,186,100	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotik dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	80%	978,517,100	
15	Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Jumlah apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, dan UMOT yang memenuhi persyaratan perizinan	117 sarana	84,263,000	Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Jumlah apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, dan UMOT yang memenuhi persyaratan perizinan	117 sarana	153,248,000	
80	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	3 dokumen	84,263,000	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	3 dokumen	153,248,000	Ada penambahan OBH dan DAK Non Fisik (BOK)
16	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Jumlah industri rumah tangga pangan (IRTP) yang memenuhi persyaratan perizinan	50 sarana	111,357,900	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Jumlah industri rumah tangga pangan (IRTP) yang memenuhi persyaratan perizinan	50 sarana	357,537,900	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
81	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 dokumen	111,357,900	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 dokumen	357,537,900	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK)
17	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Jumlah dokumen pelaksanaan pengawasan kualitas air minum dan air bersih, pelaksanaan pengawasan TTU dan TP2M	4 dokumen	139,499,800	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Jumlah dokumen pelaksanaan pengawasan kualitas air minum dan air bersih, pelaksanaan pengawasan TTU dan TP2M	4 dokumen	139,499,800	
82	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penertiban sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	4 dokumen	139,499,800	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penertiban sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	4 dokumen	139,499,800	
18	Kegiatan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		Jumlah dokumen pelaksanaan penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	1 dokumen	115,489,900	Kegiatan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		Jumlah dokumen pelaksanaan penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	1 dokumen	115,489,900	
83	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penertiban stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 dokumen	115,489,900	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penertiban stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 dokumen	115,489,900	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
19	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		Jumlah dokumen pelaksanaan pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	1 dokumen	33,575,500	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		Jumlah dokumen pelaksanaan pemeriksaan post market pada produk makanan minuman Industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	1 dokumen	212,741,500	
84	Pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	30 unit	33,575,500	Pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	30 unit	212,741,500	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK)
V.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Rasio posyandu per 1000 balita	4.68	342,048,025	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Rasio posyandu per 1000 balita	4.68	2,411,643,025	
20	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah kelurahan siaga aktif	36 kelurahan	130,123,500	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah kelurahan siaga aktif	36 kelurahan	1,801,248,500	
85	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	6 dokumen	130,123,500	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	6 dokumen	1,801,248,500	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK) ((21,125,000) serta penambahan anggaran kegiatan HKN dan jambore kader
21	Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah rumah tangga yang melaksanakan PHBS	38.262 rumah tangga	157,264,625	Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah rumah tangga yang melaksanakan PHBS	38.262 rumah tangga	157,264,625	
86	Pertumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah keluarga yang mengikuti pertumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	38.262 keluarga	157,264,625	Pertumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah keluarga yang mengikuti pertumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	38.262 keluarga	157,264,625	
22	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah posyandu mandiri	196 posyandu	54,659,900	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah posyandu mandiri	197 posyandu	453,129,900	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
87	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3 dokumen	54,659,900	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3 dokumen	453,129,900	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK) { 148,470,000} dan penambahan anggaran untuk kegiatan ILP
TOTAL DINKES (I)					131,447,444,490					210,920,013,281	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Dumai Kota

No	Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (Dinas Kesehatan)	84%		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (Dinas Kesehatan)	84%	931,103,000.00	
1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	10 puskesmas		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	10 puskesmas	930,874,000.00	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK Puskesmas bersumber APBN)
3	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan SIK secara terintegrasi	11 sarana		Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan SIK secara terintegrasi	11 sarana	229,000.00	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK Puskesmas bersumber APBN)
II.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Rasio posyandu per 1000 balita	4.68		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Rasio posyandu per 1000 balita	4.68	17,325,000.00	
4	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah posyandu mandiri	196 posyandu		Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah posyandu mandiri	197 posyandu	17,325,000.00	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK Puskesmas bersumber APBN)
					TOTAL					3,483,888,000.00	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Dumai Barat

No	Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (Dinas Kesehatan)	100%		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (Dinas Kesehatan)	100%	1,800,000,000.00	
1	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD		Jumlah peningkatan pelayanan BLUD	11 unit kerja		Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD		Jumlah peningkatan pelayanan BLUD	11 unit kerja	1,800,000,000.00	
1	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Dumai Barat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja		Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Dumai Barat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1,800,000,000.00	Ada penambahan pendapatan BLUD puskesmas karena pemberlakuan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dan penambahan kapitasi peserta BPJS serta penggunaan SILPA TA 2023 sebesar Rp 50.000.000
II.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (Dinas Kesehatan)	84%		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (Dinas Kesehatan)	84%	542,392,000.00	
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	10 puskesmas		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	10 puskesmas	542,312,000.00	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK Puskesmas bersumber APBN)
3	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan SIK secara terintegrasi	11 sarana		Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan SIK secara terintegrasi	11 sarana	80,000.00	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK Puskesmas bersumber APBN)
III.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Rasio posyandu per 1000 balita	4.68		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Rasio posyandu per 1000 balita	4.68	3,300,000.00	
4	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah posyandu mandiri	196 posyandu		Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah posyandu mandiri	197 posyandu	3,300,000.00	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK Puskesmas bersumber APBN)
					TOTAL					2,345,692,000.00	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Bukit Kapur

No	Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	100%	1,450,000,000.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	100%	2,119,000,000.00	
1	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD		Jumlah peningkatan pelayanan BLUD	11 unit kerja	1,450,000,000.00	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD		Jumlah peningkatan pelayanan BLUD	11 unit kerja	2,119,000,000.00	
1	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Bukit Kapur	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1,450,000,000.00	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Bukit Kapur	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	2,119,000,000.00	Ada penambahan pendapatan BLUD puskesmas karena pemberlakuan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dan penambahan kapitasi peserta BPJS serta penggunaan SILPA TA 2023 sebesar Rp 269.000.000
II	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)	84%		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)	84%	574,011,000.00	
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	10 puskesmas		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	10 puskesmas	572,516,000.00	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK Puskesmas bersumber APBN)
3	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan SIK secara terintegrasi	11 sarana		Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan SIK secara terintegrasi	11 sarana	1,493,000.00	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK Puskesmas bersumber APBN)
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Rasio posyandu per 1000 balita	4.68		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Rasio posyandu per 1000 balita	4.68	7,350,000.00	
4	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah posyandu mandiri	196 posyandu		Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah posyandu mandiri	197 posyandu	7,350,000.00	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK Puskesmas bersumber APBN)
					TOTAL					2,700,961,000.00	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Sungai Sembilan

No	Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	100%	2,454,374,960.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	100%	3,185,907,750.00	
1	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD		Jumlah peningkatan pelayanan BLUD	11 unit kerja	2,454,374,960.00	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD		Jumlah peningkatan pelayanan BLUD	11 unit kerja	3,185,907,750.00	
1	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Sungai Sembilan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	2,454,374,960.00	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Sungai Sembilan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	3,185,907,750.00	Ada penambahan pendapatan BLUD puskesmas karena pemberlakuan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dan penambahan kapitasi peserta BPJS
II	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)	84%		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)	84%	821,044,000.00	
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	10 puskesmas		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	10 puskesmas	820,575,000.00	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK Puskesmas bersumber APBN)
3	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan SIK secara terintegrasi	11 sarana		Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan SIK secara terintegrasi	11 sarana	471,000.00	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK Puskesmas bersumber APBN)
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Rasio posyandu per 1000 balita	4.68		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Rasio posyandu per 1000 balita	4.68	916,000.00	
4	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah posyandu mandiri	196 posyandu		Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah posyandu mandiri	197 posyandu	915,000.00	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK Puskesmas bersumber APBN)
					TOTAL					4,007,868,750.00	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Medang Kampai

No	Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	100%	922,500,000.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	100%	1,419,168,000.00	
1	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD		Jumlah peningkatan pelayanan BLUD	11 unit kerja	922,500,000.00	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD		Jumlah peningkatan pelayanan BLUD	11 unit kerja	1,419,168,000.00	
1	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Medang Kampai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	922,500,000.00	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Medang Kampai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1,419,168,000.00	Ada penambahan pendapatan BLUD puskesmas karena pemberlakuan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dan penambahan kapitasi peserta BPJS
II.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)	84%		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)	84%	841,032,000.00	
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	10 puskesmas		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	10 puskesmas	540,952,000.00	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK Puskesmas bersumber APBN)
3	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan SIK secara terintegrasi	11 sarana		Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan SIK secara terintegrasi	11 sarana	80,000.00	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK Puskesmas bersumber APBN)
III.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Rasio posyandu per 1000 balita	4.88		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Rasio posyandu per 1000 balita	4.88	4,080,000.00	
4	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah posyandu mandiri	196 posyandu		Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah posyandu mandiri	197 posyandu	4,050,000.00	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK Puskesmas bersumber APBN)
				TOTAL	922,500,000.00					1,964,250,000.00	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Bumi Ayu

No	Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	100%	1,111,875,000.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	100%	1,611,500,000.00	
1	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD		Jumlah peningkatan pelayanan BLUD	11 unit kerja	1,111,875,000.00	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD		Jumlah peningkatan pelayanan BLUD	11 unit kerja	1,611,500,000.00	
1	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Bumi Ayu	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1,111,875,000.00	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Bumi Ayu	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1,611,500,000.00	Ada penambahan pendapatan BLUD puskesmas karena pemberlakuan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dan penambahan kapitasi peserta BPJS serta penggunaan SILPA TA 2023 sebesar Rp 65.000.000
II.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)	84%		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)	84%	734,888,000.00	
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	10 puskesmas		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	10 puskesmas	733,410,000.00	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK Puskesmas bersumber APBN)
3	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan SIK secara terintegrasi	11 sarana		Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan SIK secara terintegrasi	11 sarana	3,455,000.00	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK Puskesmas bersumber APBN)
III.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Rasio posyandu per 1000 balita	4.88		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Rasio posyandu per 1000 balita	4.88	7,975,000.00	
4	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah posyandu mandiri	196 posyandu		Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah posyandu mandiri	197 posyandu	7,975,000.00	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK Puskesmas bersumber APBN)
				TOTAL	1,111,875,000.00					2,356,340,000.00	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Bukit Timah

No	Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	100%	609,500,000.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	100%	995,300,000.00	
1	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD		Jumlah peningkatan pelayanan BLUD	11 unit kerja	609,500,000.00	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD		Jumlah peningkatan pelayanan BLUD	11 unit kerja	995,300,000.00	
1	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Bukit Timah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	609,500,000.00	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Bukit Timah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	995,300,000.00	Ada penambahan pendapatan BLUD puskesmas karena pemberlakuan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dan penambahan kapitasi peserta BPJS
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)	84%		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)	84%	631,248,000.00	
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	10 puskesmas		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	10 puskesmas	531,180,000.00	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK Puskesmas bersumber APBN)
3	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan SIK secara terintegrasi	11 sarana		Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan SIK secara terintegrasi	11 sarana	69,000.00	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK Puskesmas bersumber APBN)
				TOTAL	609,500,000.00					1,526,549,000.00	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Purnama

No	Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	100%	1,110,500,000.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	100%	1,534,255,000.00	
1	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD		Jumlah peningkatan pelayanan BLUD	11 unit kerja	1,110,500,000.00	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD		Jumlah peningkatan pelayanan BLUD	11 unit kerja	1,534,255,000.00	
1	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Purnama	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1,110,500,000.00	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Purnama	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1,534,255,000.00	Ada penambahan pendapatan BLUD puskesmas karena pemberlakuan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dan penambahan kapitasi peserta BPJS
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)	84%		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)	84%	523,791,000.00	
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	10 puskesmas		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	10 puskesmas	519,737,000.00	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK Puskesmas bersumber APBN)
3	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan SIK secara terintegrasi	11 sarana		Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan SIK secara terintegrasi	11 sarana	4,059,000.00	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK Puskesmas bersumber APBN)
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Rasio posyandu per 1000 balita	4.68		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Rasio posyandu per 1000 balita	4.68	6,820,000.00	
4	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah posyandu mandiri	196 posyandu		Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah posyandu mandiri	197 posyandu	6,820,000.00	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK Puskesmas bersumber APBN)
				TOTAL	1,110,500,000.00					2,064,866,000.00	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Jaya Mukti

No	Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	200%	2,461,150,000.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	180%	3,857,565,000.00	
1	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD		Jumlah peningkatan pelayanan BLUD	11 unit kerja	2,461,150,000.00	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD		Jumlah peningkatan pelayanan BLUD	11 unit kerja	3,857,565,000.00	
1	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Jaya Mukti	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	2,461,150,000.00	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Jaya Mukti	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	3,857,565,000.00	Ada penambahan pendapatan BLUD puskesmas karena pemberlakuan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dan penambahan kapitasi peserta BPJS serta penggunaan SILPA TA 2023 sebesar Rp 250.000.000
II	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)	84%		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)	84%	1,109,979,000.00	
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	10 puskesmas		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	10 puskesmas	1,103,853,000.00	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK Puskesmas bersumber APBN)
3	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan SIK secara terintegrasi	11 sarana		Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan SIK secara terintegrasi	11 sarana	5,226,000.00	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK Puskesmas bersumber APBN)
				TOTAL	2,461,150,000.00					4,966,644,000.00	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Bukit Kayu Kapur

No	Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	100%	1,640,538,650.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	100%	1,825,620,000.00	
1	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD		Jumlah peningkatan pelayanan BLUD	11 unit kerja	1,640,538,650.00	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD		Jumlah peningkatan pelayanan BLUD	11 unit kerja	1,825,620,000.00	
1	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1,640,538,650.00	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1,825,620,000.00	Ada penambahan pendapatan BLUD puskesmas karena pemberlakuan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dan penambahan kapitasi peserta BPJS
II	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)	84%		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)	84%	629,410,000.00	
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	10 puskesmas		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	10 puskesmas	629,240,000.00	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK Puskesmas bersumber APBN)
3	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan SIK secara terintegrasi	11 sarana		Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan SIK secara terintegrasi	11 sarana	170,000.00	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK Puskesmas bersumber APBN)
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Rasio posyandu per 1000 balita	4.68		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Rasio posyandu per 1000 balita	4.68	1,128,000.00	
4	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah posyandu mandiri	196 posyandu		Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah posyandu mandiri	197 posyandu	1,125,000.00	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK Puskesmas bersumber APBN)
				TOTAL	1,640,538,650.00					2,456,155,000.00	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 UPT. Laboratorium Kesehatan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A

No	Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	100%	188,640,000.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	100%	225,508,000.00	
1	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD		Jumlah peningkatan pelayanan BLUD	11 unit kerja	188,640,000.00	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD		Jumlah peningkatan pelayanan BLUD	11 unit kerja	225,508,000.00	
1	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Laboratorium kesehatan pemeriksaan kualitas air kelas A	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	188,640,000.00	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Laboratorium kesehatan pemeriksaan kualitas air kelas A	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	225,508,000.00	Ada penggunaan SILPA TA 2023 sebesar Rp 36.868.000
				TOTAL	188,640,000.00					225,508,000.00	
				TOTAL BLUD (II)	15,084,558,110.00					24,096,121,750.00	
				TOTAL I + II	15,273,198,110.00					24,321,629,750.00	